



UNIVERSITAS WIRARAJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 096/SP.HCP/LPPM/UNIJA/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**DASAR-DASAR TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 2%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 21 Maret 2022
Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.
NIDN. 0714077402

DASAR-DASAR TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN

by Mohammad Hidayaturrahman

Submission date: 21-Mar-2022 10:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 1788866819

File name: Dasar-Dasar_Teori_dan_Isu_Pembangunan-2.pdf (4.78M)

Word count: 34336

Character count: 229007



DASAR - DASAR TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN

Mohammad Hidayaturrahman



Dasar-Dasar Teori dan Isu Pembangunan

Author:

Mohammad Hidayaturrahman

Layouter:

Dewi

Editor:

Ika Devy Pramudiana & Alfina Mediyanti

12

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright© 2022

Penerbit



Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia

press@unitomo.ac.id

Telp: (031) 592 5970

Fax: (031) 593 8935

Cetakan Pertama : 10 Januari 2022

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : viii + 188 halaman

ISBN:

1

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

PRAKATA

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi anugerah, rejeki dan hidayah, sehingga kita semua bisa menikmati indahnya kehidupan, dan harmonisnya kehidupan sosial. Semoga dengan syukur yang kita lakukan, Allah SWT akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan membuat keberkahan pada setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur, tidak ingkar kepada kebaikan yang telah Allah SWT curahkan kepada kita semua.

Shalawat dan salam, semoga senantiasa tetap terlimpah dan curahkan kepada junjungan kita, teladan kebaikan dan kemanusiaan, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Berkat perjuangan dan kerja keras beliau, kita dapat menjalani kehidupan bertamadun dan berkemanusiaan. Semoga shalawat dan salam juga terlimpah kepada sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang setia dengan jalan perjuangan yang telah dirintis dan diperjuangkannya.

Terima kasih yang tidak terhingga dihaturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, khususnya kepada keluarga Center for Indonesian Reform (CIR), Universitas Wiraraja Madura, Yayasan Abu Hurairah Banyuwangi dan lain-lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat di dalam buku ini. Segala masukan, kritik dan saran diharapkan, untuk perbaikan pada masa mendatang.

Selanjutnya, buku ini diharapkan menjadi satu khazanah yang menambah sekian banyak perbendaharaan ilmu penge-

tahuan dan keilmuan mengenai pembangunan di Indonesia. Buku ini cocok untuk dibaca oleh kalangan akademisi, mahasiswa dan dosen, juga kalangan birokrasi pemerintah, serta masyarakat umum yang tertarik dengan tema pembangunan dan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan, baik secara teoritis, praktis dan empiris. Tema pembangunan memang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas dan didiskusikan, baik berkaitan dengan proses, aktor, tujuan, maupun hasil dari pembangunan.

Madura, 10 Januari 2022

21
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN.....	1
Pengertian Teori.....	3
Teori-Teori Pembangunan.....	4
Pengertian Isu.....	6
Isu-Isu Pembangunan.....	7
Pengertian Pembangunan.....	8
Sejarah Teori dan Isu Pembangunan.....	9
BAB II TEORI MODERNISASI.....	13
Pengertian Modernisasi.....	15
Sejarah Teori Modernisasi.....	16
Tokoh-Tokoh Teori Modernisasi.....	17
Karakteristik Modernisasi.....	19
BAB III TEORI DEPENDENSI.....	23
Pengertian Teori Dependensi.....	25
Sejarah Teori Dependensi.....	26
Tokoh-Tokoh Teori Dependensi.....	27
Karakteristik Teori Dependensi.....	28
BAB IV TEORI KRITIS.....	31
Pengertian Teori Kritis.....	33
Sejarah Teori Kritis.....	34
Tokoh-Tokoh Teori Kritis.....	35
Karakteristik Teori Kritis.....	38

BAB V TEORI PARTISIPASI	41
Pengertian Teori Partisipasi	43
Sejarah Teori Partisipasi	45
Pandangan Tokoh Mengenai Teori Partisipasi.....	46
Karakteristik Teori Partisipasi	48
BAB VI TEORI PEMBERDAYAAN	51
Pengertian Teori Pemberdayaan.....	53
Sejarah Teori Pemberdayaan	55
Tokoh Teori Pemberdayaan	56
Pemberdayaan Masyarakat Menurut Teori Aktor	58
Karakteristik Teori Pemberdayaan.....	58
BAB VII TEORI PENGEMBANGAN LEMBAGA.....	61
Pengertian Teori Pengembangan Lembaga	63
Sejarah Teori Pengembangan Lembaga	65
Tokoh Teori Pengembangan Lembaga.....	66
Karakteristik Teori Pengembangan Lembaga	68
BAB VIII ISU DEMOKRASI	73
Pengertian Demokrasi	75
Sejarah Demokrasi	75
Demokrasi Menurut Ahli	78
Karakteristik Demokrasi	80
Tantangan Pembangunan di Era Demokrasi.....	83
BAB IX ISU KEMISKINAN.....	89
Pengertian Kemiskinan	91
Sejarah Kemiskinan.....	93
Pemikiran Tokoh Mengenai Kemiskinan	96
Karakteristik Kemiskinan	98
Tantangan Pembangunan Menjawab Kemiskinan	100
BAB X ISU LINGKUNGAN HIDUP	105
Pengertian Lingkungan Hidup.....	107
Sejarah Isu Lingkungan Hidup.....	109
Pemikiran Tokoh Mengenai Lingkungan Hidup.....	111
Karakteristik Lingkungan Hidup.....	112
Problematika Pembangunan dan Isu Lingkungan Hidup	113

BAB XI ISU GLOBALISASI.....	117
Pengertian Globalisasi	119
Sejarah Globalisasi.....	120
Pemikiran Tokoh Mengenai Globalisasi.....	121
Karakteristik Globalisasi	122
Problematika Pembangunan dan Globalisasi.....	123
BAB XII ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	127
Pengertian Pembangunan Berkelanjutan	129
Sejarah Isu Pembangunan Berkelanjutan.....	131
Pemikiran Tokoh Mengenai Pembangunan Berkelanjutan.....	133
Karakteristik Pembangunan Berkelanjutan.....	134
Peluang dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan	136
BAB XIII ISU SUMBER DAYA ALAM.....	141
Pengertian Sumber Daya Alam	143
Sejarah Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	144
Pemikiran Tokoh Mengenai Isu Sumber Daya Alam.....	146
Karakteristik Pembangunan Berbasis Sumber Daya Alam	147
Peluang dan Tantangan Pembangunan Berbasis Sumber Daya Alam.....	149
BAB XIV ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	153
Pengertian Sumber Daya Manusia.....	155
Sejarah Pembangunan Sumber Daya Manusia	156
Pemikiran Tokoh Mengenai Sumber Daya Manusia	157
Karakteristik Pembangunan Berbasis Sumber Daya Manusia.....	158
Peluang dan Tantangan Pembangunan Berbasis SDM	160
DAFTAR PUSTAKA.....	163
GLOSARIUM	175
INDEX	176
TENTANG PENULIS.....	177



BAB I

Teori Dan Isu Pembangunan

BAB I TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai teori dan isu pembangunan.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik teori dan isu Pembangunan.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami teori dan isu pembangunan.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori dan isu pembangunan.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik dan isu pembangunan.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam pembangunan.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam pembangunan.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah pembangunan.

Pengertian Teori

Ada banyak orang salah kaprah mengartikan apa itu teori. Teori dianggap sebagai sesuatu yang hanya bersifat omong kosong, tidak ada landasan dan dasarnya. Teori disebut sebagai bujukan semata yang tidak memiliki landasan empiris. Bahkan ada yang salah total dalam menjelaskan teori, sesuatu yang tidak berhubungan dengan fakta dan data. Kekeliruan tersebut kemudian dijadikan kebiasaan, yang malah ada kecenderungan membenarkan. Sehingga pengertian teori yang selama ini dianut masuk di dalam kategori “kelirumologi” kekeliruan yang telah dianggap sebagai kebenaran.

Padahal teori merupakan serangkaian preposisi yang tersusun secara sintaksis dan logis, berdasarkan fakta empiris yang dapat dianalisis. Teori dapat dipergunakan untuk membaca fenomena yang sedang berlangsung dan memprediksi fenomena yang akan terjadi. Dari sini, dapat dipahami dengan baik, bahwa teori merupakan hal yang berkaitan erat dengan fakta dan data yang ada di lapangan, yang dapat dianalisis berdasarkan pengetahuan yang ada.

Teori memiliki dua fungsi dan peran yang terkait dengan fakta dan data empirik. *Pertama*, teori dapat digunakan untuk membaca fenomena yang sedang terjadi. Pengertian ini bermakna bahwa teori dapat menjadi semacam kaca mata bagi penggunaannya untuk melihat suatu persoalan. Dengan teori fenomena yang terjadi dapat dilihat secara benderang. *Kedua*, teori dapat berguna untuk meramal masa depan. Meramal masa depan bermakna positif, yaitu memprediksi apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Berdasarkan teori yang telah lahir. Kelahiran teori tentu saja juga didasari pada pengamatan terhadap fakta empiris yang terjadi sebelumnya.

Teori memang memiliki semacam keterbatasan (limitasi). Sehingga tidak ada teori yang berlaku secara keseluruhan pada setiap tempat dan masa. Bisa jadi teori yang telah berhasil digunakan pada 100 tahun lalu dapat berhasil pada masa kini.

Namun bisa pula teori tersebut, bisa relevan pada 1000 tahun yang akan datang.

Teori-Teori Pembangunan

Adam Smith: Kapitalisme dan Pertumbuhan

Dalam buku yang ditulisnya dengan judul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), Adam Smith beranggapan bahwa kebijakan dagang akan mendorong dan menguasai pergerakan tanpa batasan. Hal tersebut bisa terjadi dengan penetapan tarif yang baik dan harga barang yang bisa dijangkau. Menurut Adam Smith, kegiatan ekonomi yang berjalan di pasar memiliki hukum tersendiri yang berdasarkan pada hukum pasokan dan permintaan (*supply and demand*). Dengan kata lain, perekonomian di pasar diatur oleh suatu sistem yang dikenal dengan tangan yang tidak terlihat (*the invisible hand*). Invisible hand yang dimaksud adalah hukum pasar yang berjalan secara otomatis. Otomatisasi pasar ada pada dua hal. Bila permintaan tinggi, maka harga akan naik, dan bila pasokan yang tinggi maka harga akan turun. Begitu pula, saat pasokan kurang, maka harga akan naik, saat hal tersebut terjadi, maka akan ada pemasok lain yang akan masuk ke pasar, memenuhi permintaan yang tinggi, sehingga harga akan kembali stabil. Hal yang sebaliknya akan terjadi, pada saat pasokan banyak, maka harga akan rendah, saat hal tersebut terjadi, maka pemasok akan menahan untuk tidak melempar seluruh pasokan ke pasar, hingga harganya kembali normal dan stabil. Smith meyakini, jika barang yang tersedia mahal, maka tidak akan ada yang meminatinya (Smith, 1776).

David Ricardo: Diminishing Return dan Comparative Advantage

Sama dengan Adam Smith, David Ricardo merupakan pendukung perdagangan bebas. Perdagangan bebas, yang tidak diatur oleh negara sesungguhnya menguntungkan bagi pelaku ekonomi dan pasar. Sebab siapa saja bisa melakukan transaksi di

pasar. Dan setiap pelaku pasar, memiliki kelebihan dan keunggulan terhadap barang yang dijual di pasar. David Ricardo, melalui "*Principles of Political Economy and Taxation*" (1817), menjelaskan mengenai perekonomian yang tumbuh dengan adanya kelebihan setiap produk yang dihasilkan. Kelebihan produk yang dihasilkan sekaligus menutup kekurangan produk lain, atau produksi di negara lain.

Robert Malthus: Populasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Robert Malthus melalui teori populasi dan pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan ramalan yang berharga bagi masyarakat dunia. Menurut Malthus, populasi akan terus bertumbuh dari perolehan subsisten. Pada saat yang sama akan terjadi kekurangan pangan pada manusia. Sebab lahan yang tersedia untuk menanam pangan banyak digunakan untuk keperluan manusia yang terus bertambah. Digunakan untuk membangun rumah, kantor, taman dan lain sebagainya. Sehingga pada masanya akan terjadi kelangkaan pangan. Diperlukan semacam upaya serius yang dilakukan oleh manusia modern, untuk mengatasi kekurangan pangan.

Karl Marx: Kelas dan Konflik

Karl Marx menilai bahwa realitas sosial menunjukkan bahwa ada dua kelas dalam kehidupan sosial. Kelas pertama adalah kelas yang memiliki harta dan tanah serta modal yang dikenal dengan kelas borjuis. Kelas kedua adalah kelas masyarakat yang tidak memiliki aset, dan hanya memiliki tenaga yang digunakan untuk bekerja kepada pemilik tanah dan harta, yang dikenal dengan kelas proletar. Kedua kelas tersebut memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain, tidak bisa disatukan. Dengan kata lain, saling berlawanan atau berada pada kondisi konflik. Kelas borjuis berada pada posisi di atas dan menang terhadap kelas proletar. Hal ini memungkinkan terjadi karena aset dan harta yang dimiliki. Secara tidak langsung hal tersebut juga

menciptakan ketidaksetaraan di dalam pengelolaan ekonomi. Bila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka keinginan untuk menciptakan kesejahteraan tidak akan pernah tercapai. Salah satu diantaranya karena ada konsentrasi, atau penumpukan kekayaan pada segelintir orang kaya. Sehingga, menurut Marx, kaum buruh perlu mengambil alih aset produksi, yang kemudian dikelola oleh buruh dan digunakan untuk mensejahterakan buruh yang selama ini hidup dalam kondisi miskin dan marginal. Selama alat produksi dan distribusi tetap dimiliki oleh orang-orang kaya, dan belum dikuasai oleh buruh, maka kesejahteraan tidak akan pernah terwujud. Sehingga ada paradigma konflik di dalam masyarakat yang dilihat oleh Marx.

Pengertian Isu

Sama dengan teori, ada banyak pemahaman yang salah di kalangan masyarakat mengenai isu. Isu disamakan dengan rumor, kabar burung atau gosip yang tidak jelas sumbernya. Padahal isu adalah sesuatu yang nyata. Isu dimaknai sebagai suatu persoalan yang sedang diperbincangkan oleh publik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya isu kesehatan, maka publik sedang memperbincangkan persoalan kesehatan yang sedang terjadi. Isu diartikan pula sebagai persoalan yang belum diselesaikan atau ditemukan pemecahannya oleh pemerintah. Misalnya, covid-19 menjadi isu yang paling banyak dibahas, karena belum mampu dipecahkan persoalannya. Pada saat sudah berhasil dipecahkan, maka covid-19 tidak lagi menjadi isu. Begitu pula dengan isu korupsi dan lain sebagainya.

Sebuah isu muncul dari organisasi, dengan gambaran ataupun yang menjadi sebab yang mungkin dari sebuah organisasi. Kemudian isu tersebut keluar ke publik yang lebih luas, dan mendapat tanggapan dari publik yang lebih luas. Sebuah isu muncul dari beberapa kondisi yang mungkin terjadi. *Pertama*, adanya ketidakpuasan suatu kelompok masyarakat terhadap suatu persoalan. *Kedua*, adanya peristiwa yang bersifat

dramatis. *Ketiga*, adanya perubahan sosial yang sedang terjadi. *Keempat*, kekuatan pemimpin yang kurang optimal.

Keempat hal tersebut bisa bersifat parsial, bisa juga bersifat gradual. Bisa terjadi secara bersamaan, namun juga bisa terjadi secara terpisah. Semakin banyak akumulasi dari keempat hal tersebut, akan semakin menguatkan isu yang muncul. Dan semakin tidak bisa diselesaikan, semakin besar isu bergulir di tengah publik. Isu akan semakin membesar, pada saat menjadi pembicaraan dan pembahasan media massa, dan muncul di media sosial, atau dibicarakan oleh warganet (netizen). Suatu isu akan semakin kuat bila berkaitan dengan semakin banyak orang. Sebaliknya, isu akan semakin kecil, bila daya jangkau isu tersebut terjadi pada sekelompok orang. Namun hal ini akan menjadi sebaliknya, bila dimunculkan di sosial media, apalagi diberitakan oleh media massa, dan mendapat tanggapan dari tokoh-tokoh publik, baik yang pro maupun yang kontra.

Isu-Isu Pembangunan

Isu pembangunan ada pula yang berkaitan dengan aktor pembangunan. Aktor pembangunan yang dimaksud disini melibatkan lembaga dan institusi yang menjadi pelaksana pembangunan. Aktor pembangunan memiliki level dan jenjang beragam, mulai dari level global, nasional, daerah hingga lokal. Tidak hanya pada tahap level aktor pembangunan, namun juga membahas mengenai hubungan antara aktor di dalam melaksanakan pembangunan.

Selain itu isu juga berkaitan dengan proses pembangunan. Proses pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan, berkelanjutan dan tidak sekali jadi, atau bimsalabim. Maka proses pelaksanaan pembangunan menjadi pembahasan yang menarik di dalam isu-isu pembangunan. Apakah proses pembangunan telah sesuai dengan garis jalan yang telah ditentukan (*on the track*), atau jangan-jangan pembangunan malah berjalan ke arah yang semakin menjauh dari tujuan

pembangunan itu sendiri. Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan, yang ada malah menciptakan kerusakan lingkungan alam dan menyebabkan korban jiwa, dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga untuk memperbaikinya (*recovery*) dibutuhkan biaya yang bersumber dari anggaran negara yang tidak sedikit.

Tidak kalah pentingnya untuk dibahas di dalam isu pembangunan, tentu saja yang berkaitan dengan hasil pembangunan. Pembangunan dilakukan tidak untuk pembangunan. Apapun yang dibangun berupa fisik dan sarana prasarana, hanyalah fasilitas yang harus bisa mengantarkan pembangunan pada tujuan utamanya, yaitu menciptakan kesejahteraan. Di dalam bahasa Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Pengelolaan sumber daya alam (*natural resources*) yang dimiliki oleh suatu negara menjadi yang juga menarik dibahas. Prinsip, kekayaan alam yang ada di suatu negara, mestinya digunakan untuk menciptakan kemandirian bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan bangsa tersebut. Namun bila yang terjadi sebaliknya, negara yang kaya sumber daya alam, namun tetap miskin, menjadi menarik.

Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan proses berkesinambungan, tidak sekali jadi. Maka, merumuskan pembangunan juga tidak sesederhana membangun fisik semata. Misalnya membangun sudah dianggap membangun atau mewakili membangun bila sudah membangun jalan bebas hambatan (tol). Membangun telah dianggap membangun bila telah membangun sekolah. Padahal membangun hal-hal tersebut, atau semacamnya dengan hal tersebut, baru bagian atau potongan dari membangun, kalau tidak dibilang hanya bagian kecil dari pembangunan.

Pembangunan memiliki dimensi dan spektrum yang jauh melampaui apa yang dicontohkan tersebut. Tidak hanya fisik saja, namun juga mental. Tidak hanya infrastruktur semata, namun juga suprastruktur. Sehingga pembangunan berdimensi luas, meliputi seluruh sisi dan sendi kehidupan manusia. Tidak hanya jasmani tapi rohani juga. Tidak hanya dibuat kenyang, namun juga dibuat nyaman dan pintar serta sehat lahir dan batin. Pembangunan multidimensi dan multispektrum, yang perlu diperhatikan pada setiap sisinya.

Pembangunan ialah semua prosesnya yang merubah pelaksanaan usaha dengan kesadaran ataupun perencanaan, kemudian dengan berkembangnya dengan yang berdampak pada pembangunannya (Riyadi dan Bratakusumah, 2005). Peningkatan secara menyeluruh yang terkait dengan aspek ataupun cakupan keseluruhan. Sondang Siagian (1982) mengemukakan, "pembangunan sebagai suatu perubahan, bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat."

Sejarah Teori dan Isu Pembangunan

Setelah Perang Dunia II negara-negara di dunia terpolarisasi menjadi negara-negara yang menang dan negara yang kalah perang. Negara yang menang perang, terutama Amerika Serikat dan sekutunya memiliki semacam tanggung jawab untuk

memperbaiki (*recovery*) negara-negara yang kalah perang. Negara yang kalah perang berada dalam kondisi yang lemah secara ekonomi, infra-struktur mengalami kerusakan parah, dan hancur lebur. Amerika Serikat kemudian menjalankan program pembangunan di sejumlah negara yang dikenal dengan Marshall Plan. Program tersebut dipimpin oleh Jenderal T Marshall.

Pada belahan dunia lain, pasca Perang Dunia II ada banyak negara, terutama di Asia dan Afrika yang baru merdeka dari penjajahan bangsa lain. Keberhasilan pembangunan di beberapa yang kalah perang, dicoba untuk diterapkan dan diduplikasi pada negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan. Keberhasilan di negara yang kalah perang, tidak sama dengan keberhasilan pembangunan di negara-negara yang baru merdeka. Ada yang berhasil, namun banyak yang mengalami kegagalan. Negara yang terbilang berhasil di dalam menjalankan program pembangunan seperti Malaysia. Adapun Indonesia adalah contoh negara yang berhasil namun tidak berlangsung lama, karena jatuh pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.

Terminologi pembangunan kemudian terus berkembang di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2000-an dikenal dengan Millenium Development Goals (MDGs). Pembangunan yang diorientasikan pada pembangunan ekonomi dan segala macam derivasinya. Dianggap belum berhasil, maka pembangunan diorientasikan pada pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan Sustainability Development Goals (SDGs). Pada tahap ini, orientasi pembangunan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan dianggap sebagai basis utama keberlanjutan dari program pembangunan. Hal ini sebagai bentuk koreksi dan respon terhadap kegiatan pembangunan yang semata-mata berorientasi ekonomi (*economic oriented*).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian teori dan isu pembangunan!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah teori dan isu pembangunan!
3. Kemukakan satu kasus pembangunan yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

BAB I TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN

“Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”

(Siagian, 1982)



BAB II

Teori Modernisasi

BAB II TEORI MODERNISASI

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori modernisasi.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik teori modernisasi.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep teori modernisasi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori modernisasi.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan teori modernisasi.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah modernisasi.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam masalah modernisasi.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah teori modernisasi.

Pengertian Modernisasi

Menurut Wilbert Moore, modernisasi merupakan proses perubahan secara total pada kehidupan masyarakat yang selama ini tradisional ke dalam kehidupan modern. Kehidupan modern ditandai dengan semakin massifnya masyarakat menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan modern memacu kemajuan ekonomi, memakmurkan warga negara dan menstabilkan kehidupan politik (Moore, 1965). Modernisasi berarti perubahan yang dilakukan secara sengaja, atau dirancang secara sengaja dari kehidupan tradisional kepada kehidupan yang modern. Modernisasi ditandai dengan adanya industrialisasi. Yaitu menjadikan sumber daya yang selama ini berbasis pertanian, dikembangkan menjadi industri (Rosana, 2011).

Modernisasi pada sektor pertanian bisa dilihat dari peralatan yang digunakan untuk bertani. Dulunya peralatan pertanian menggunakan peralatan tradisional seperti kapak dan cangkul, juga alat bajak menggunakan hewan. Namun kemudian diubah dengan menggunakan mesin traktor dan seterusnya. Modernisasi juga terjadi pada hasil dari produk pertanian. Bila dulunya langsung dikonsumsi setelah dipanen, namun kini diproses di pabrik-pabrik yang mengolah hasil pertanian menjadi berbagai komoditas.

Dalam perjalanannya yang mengalami industrialisasi tidak hanya pertanian, namun hampir seluruh sektor dalam kehidupan manusia mengalami proses industrialisasi. Dunia pendidikan yang dulunya bersifat tradisional, kemudian mengalami industrialisasi. Guru ngaji yang mengajar secara sukarela, kini berubah menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang mengarah pada orientasi bisnis (*business oriented*). Hal ini semakin kuat dengan banyaknya perusahaan yang mendirikan sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya pengelolaan lembaga pendidikan dijalankan sebagaimana industri dengan manajemen perusahaan. Begitu pula dengan sektor kesehatan, dan sektor lain yang telah mengalami modernisasi. Terlebih lagi pada sektor perikanan,

kehutanan dan sektor yang berbasis pada sumber daya alam.

Sejarah Teori Modernisasi

Teori modernisasi menjadi lebih sempurna dalam tiga fase. Fase Pertama (1950-an dan 1960-an), Fase Kedua (1970-an dan 1980-an), Fase Ketiga (1990-an). Teori modernisasi terlahir dari histori yang krusial pasca Perang Dunia II, dengan keberadaan Amerika Serikat yang mendominasi. Amerika Serikat kemudian mempengaruhi negara lain yang kalah perang di Eropa dan negara-negara yang baru merdeka, di Asia dan Afrika. Amerika Serikat dan sekutunya merupakan negara-negara yang menang perang. Kemudian beberapa negara lain seperti Prancis dan Jerman merupakan negara yang kalah perang pada Perang Dunia II. Sebagai negara yang berkuasa dalam berbagai bidang, Amerika Serikat memberi kesempatan kepada para ilmuwan di negaranya untuk memberi gagasan mengenai pembangunan pasca-Perang Dunia II. Beberapa ahli kemudian melahirkan pemikiran mengenai teori modernisasi. Modernisasi yang diyakini sebagai satu cara untuk bisa memajukan ekonomi dunia, kemudian didorong oleh Amerika Serikat untuk dipraktikkan di beberapa negara, terutama negara-negara yang kalah perang. Program tersebut, dipimpin langsung oleh Jenderal T Marshall. Keberhasilan program modernisasi tersebut kemudian semakin mengukuhkan keinginan Amerika Serikat untuk melakukan pembangunan berbasis modernisasi di negara lain, yaitu negara-negara yang baru merdeka, terutama di Asia dan Afrika. Masa ini masuk pada fase kedua modernisasi.

Pada sisi lain, negara besar seperti Uni Soviet melakukan upaya yang bisa menguasai dunia dengan berupaya membuat semacam koalisi dan aliansi dengan negara lain untuk membangun kekuatan global. Kekuatan dan aliansi itu kemudian menjadi kekuatan tersendiri yang berhadapan dengan Amerika Serikat yang menggunakan modernisasi dan demokratisasi sebagai basis gerakan pembangunan (Fakih, 2009). Pada tahun

1991, Uni Soviet mengalami keruntuhan. Hal ini semakin mengukuhkan kekuatan dan dominasi Amerika Serikat secara global, terutama di dalam menjalankan agenda pembangunan dan demokratisasi di berbagai negara di dunia. Masa ini memasuki fase ketiga dari modernisasi hingga kini.

Tokoh-Tokoh Teori Modernisasi

Harrod & Domar: Modal dan Investasi

Roy Harrod dan Evsey Domar merupakan dua orang ahli ekonomi yang membicarakan ekonomi pembangunan, dan menekankan peran penyediaan modal dan investasi. Harrod dan Domar memiliki pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akan berhasil dengan baik bila adanya modal yang besar, dan tingginya investasi. Semakin tinggi investasi dan putaran modal di satu negara, maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat (Bokanovsky, 2018).

Max Weber: Semangat Kapitalisme dan Etika Protestan

Tokoh lain teori modernisasi adalah Max Weber. Weber merupakan seorang sosiolog Jerman yang menekankan tentang nilai budaya termasuk peran agama dalam pembentukan kapitalisme. Menurut Weber, agama memiliki peran yang menentukan dalam mempengaruhi tingkah laku individu. Tingkah laku individu tersebut yang kemudian melahirkan semangat pada kapitalisme. Weber melihat hal tersebut terjadi di Eropa (Giddens, 1970).

David McClelland: n-Ach

Tokoh lain dalam teori modernisasi adalah David McClelland. McClelland dikenal sebagai seorang ahli psikologi sosial. McClelland mendasarkan teorinya pada aspek psikologi individu. Menurut McClelland, proses kemajuan ekonomi dan pembangunan didorong oleh adanya motivasi yang disingkat dengan n-Ach. Yang dimaksud dengan n-Ach adalah kebutuhan untuk

berprestasi yang didorong oleh keinginan untuk berafiliasi, berprestasi tinggi, dan kebutuhan untuk berkuasa (McClelland, 1965).

Alex Inkeles dan David Smith: Manusia Modern

Alex Inkeles dan David Smith merupakan tokoh modernisasi yang menekankan pada manusia sebagai faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Menurut Inkeles & Smith, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, ditentukan oleh keberadaan manusia modern. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tanpa kehadiran manusia modern, menjadi kurang (Inkeles & Smith, 2013).

Hoselitz: Faktor-Faktor Non-Ekonomi

Bert F. Hoselitz merupakan tokoh teori modernisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada faktor nonekonomi, dalam hal ini adalah kewirausahaan. Menurut Hoselitz, permasalahan pertama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah mengenai kewirausahaan (Hoselitz, 1952).

Rostow: Lima Tahap Pembangunan

Walt Whitman Rostow atau yang dikenal dengan W.W. Rostow atau hanya Rostow, merupakan tokoh paling fenomenal di dalam teori modernisasi. Banyak pemikirannya mengenai lima tahap pembangunan yang sejalan dengan teori modernisasi banyak dianut di berbagai negara di dunia. Menurut (Rostow, 1950), ada lima tahap modernisasi. *Tahap pertama*, masyarakat tradisional. Pada tahap ini masyarakat berada dalam kondisi yang tradisional. Masyarakat mengelola potensi perekonomian yang ada secara tradisional. *Tahap kedua*, prakondisi untuk lepas landas. Proses ini ditandai dengan kemampuan masyarakat yang telah memiliki pendidikan dan skill. *Tahap ketiga*, lepas landas. Pada tahap ini masyarakat sudah menggunakan teknologi dan

berada pada masa industrialisasi. Masyarakat secara umum bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan teknologi modern. *Tahap keempat*, bergerak ke kedewasaan. Pada tahap ini, masyarakat sudah bisa melakukan produksi secara massal, dengan teknologi yang telah dikuasai. Setiap masyarakat memiliki kelebihan yang bisa mencukupi kekurangan di masyarakat lain. Hal ini menyebabkan terjadinya globalisasi, serta ekspor dan impor. *Tahap kelima*, Konsumsi massal. Pada periode ini konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, namun juga pada aspek lain. Kondisi menyebabkan adanya tabungan pada masyarakat yang kemudian diinvestasikan ulang.

Karakteristik Modernisasi

Modernisasi merupakan teori yang saat ini paling dominan dan banyak dianut oleh negara di dunia. Meski begitu ada sejumlah negara dan komunitas masyarakat yang tidak menerima keberadaan modernisasi, karena dianggap menciptakan banyak persoalan global. Beberapa di antaranya adalah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang yang ada di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Selain itu, modernisasi mendorong terjadinya kerusakan lingkungan alam, terutama karena ekstraksi terhadap sumber daya alam yang dilakukan secara massif, untuk memenuhi kebutuhan industri di negara-negara maju dan modern.

Sebagai pemikiran yang banyak dianut di seluruh dunia, modernisasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang bisa dilihat pada beberapa hal berikut:

1. Cara berpikir yang ilmiah (*scientific thinking*) yang melembaga dalam kelas pengusaha maupun masyarakat. Hal ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik. Termasuk juga pada administrasi negara dalam pelayanan birokrasi (Abdullah, 2020).
2. Terciptanya masyarakat yang menggunakan teknologi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pada semua sektor

BAB II TEORI MODERNISASI

dan bidang kehidupan, transportasi, industri, dan lain sebagainya.

3. Penciptaan iklim yang sesuai dari masyarakat terhadap modernisasi. Salah satunya dengan menggunakan peralatan komunikasi massa. Hal ini dilakukan tahap demi tahap, atau evolusi (Setyawati, 2008).
4. Dalam bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia, juga perkembangan kehidupan modern, basis pengembangannya adalah dengan pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang kontinu, agar data semakin terupdate, tidak ketinggalan (Warsono, 2018). Apapun yang dilakukan dalam kehidupan modern perlu basis pada data dan hasil riset, bukan asumsi semata.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian teori modernisasi!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah modernisasi!
3. Kemukakan satu kasus modernisasi pembangunan yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

“Modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil.”

(Wilbert E. Moore)

BAB II TEORI MODERNISASI



BAB III

Teori Dependensi

BAB III TEORI DEPENDENSI

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai teori dependensi.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik teori dependensi.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami teori dependensi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori dependensi.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik teori dependensi.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam model dependensi.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam mode dependensi.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah model dependensi.

Pengertian Teori Dependensi

Dependensi secara bahasa artinya tergantung. Teori dependensi memiliki makna ketergantungan. Secara istilah dependensi bermakna adanya ketergantungan satu negara dengan negara lain. Pembangunan berbasis dependensi berarti pembangunan suatu negara yang tergantung kepada negara lain. Secara umum ketergantungan bermakna negatif, sebab bisa membuat satu negara yang tergantung sangat membutuhkan negara lain yang menjadi tempat bergantung (Rusydi, 2018).

Namun, dalam praktiknya, ada negara yang memang sangat tergantung kepada negara lain. Seperti misalnya negara-negara yang berada di wilayah sub sahara, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari padang pasir. Kondisi alam tersebut membuat negara-negara di wilayah tersebut, tidak bisa menanam kebutuhan makanan pokok. Sehingga makanan pokok harus didatangkan dari negara lain. Dengan demikian, maka ada ketergantungan negara yang mendatangkan kebutuhan pokok tersebut kepada negara yang memasok makanan pokok (Nuhung, 2013).

Begitu pula dengan negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan untuk menjadi sumber utama pembangkit energi negaranya, mengalami ketergantungan kepada negara-negara yang memiliki sumber daya alam, yang dapat digunakan untuk pembangkit energi. Maka negara yang tidak memiliki sumber energi tersebut, mengalami ketergantungan kepada negara yang memiliki sumber utama pembangkit energi. Begitu pula dengan negara yang memiliki kebutuhan utama yang tidak dimiliki memiliki ketergantungan kepada negara lain.

Ketergantungan lainnya adalah, negara yang tidak memiliki modal/ uang untuk membangun perekonomian negaranya sangat tergantung kepada negara-negara yang memiliki modal besar. Ketergantungan negara yang tidak memiliki modal/ uang adalah dalam bentuk hutang/ pinjaman kepada negara-negara “donor” yang memiliki banyak uang. Bila pula mengalami

ketergantungan kepada lembaga-lembaga donor internasional yang memiliki uang, seperti Bank Dunia (World Bank), dan International Monetary Fund (IMF) (Hermawati, 2018).

Sejarah Teori Dependensi

Kemunculan teori dependensi pertama kali dipicu oleh pandangan ahli yang menganggap gagalnya teori modernisasi di dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di sejumlah negara, terutama di Amerika Latin. Hal ini ditandai dengan kehadiran *United Nation Economic Commission for Latin America* (ECLA) pada tahun 1948. Teori dependensi menjadi semacam antitesis dari teori modernisasi (Solikatur et al, 2014: 78). Teori dependensi memberi jawaban bahwa pembangunan dengan pendekatan modernisasi, malah menciptakan ketergantungan pada beberapa negara kepada negara lain. Ketergantungan tersebut selanjutnya, menyebabkan negara terseret pada persoalan baru, yaitu persoalan kemiskinan. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tidak kunjung terwujud.

Menurut Raul Prebisch, “negara-negara miskin mengeksport komoditas primer ke negara-negara kaya yang kemudian diproduksi menjadi produk dari komoditas tersebut dan dijual kembali ke negara-negara miskin.” Hal ini tentu saja menjadi bentuk ketergantungan dari negara miskin kepada negara kaya. Negara miskin menjadi pengeksport sumber daya alam, selanjutnya menjadi pasar bagi produk yang dihasilkan oleh negara kaya. Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi negara miskin. Ada semacam ketergantungan yang tidak ada ujung dan pangkalnya (Prebisch, 1972).

Lebih jauh, dalam pandangan teori dependensi, apa yang terjadi di dalam teori modernisasi adalah bentuk penjajahan atau imperialisme dalam bentuk lain, yang dilakukan oleh negara-negara maju, yang notabene juga memiliki banyak modal/ uang, terhadap negara-negara berkembang (*underdevelopment*

countries), atau negara miskin (*poor countries*), negara ketiga (*third countries*) atau sebutan lain yang menunjukkan negara tersebut tidak dalam kondisi makmur/ sejahtera. Penjajahan tersebut jauh lebih kuat dari penjajahan dengan menggunakan senjata, sebab negara yang dijajah sudah dalam kondisi merdeka, sehingga merasa tidak perlu untuk menyatakan kemerdekaan lagi. Namun negara tersebut, berada di bawah kekuasaan negara yang menjajah secara ekonomi dan politik (Rodiah, 2018).

Tokoh-Tokoh Teori Dependensi

Raul Prebisch

Menurut Prebisch, kemakmuran atau kekayaan negara-negara maju mengorbankan negara-negara miskin. Salah satu bentuk pengorbanan terhadap negara miskin adanya, pemberlakuan substitusi impor yang dilakukan oleh negara kaya pada produk dalam negeri mereka. Sehingga pada akhirnya, tetap saja bahwa globalisasi yang menjadikan pasar bebas, tidak menguntungkan negara-negara miskin. Pada hakikatnya antara negara kaya dengan miskin tidak bisa berjalan setara (Meiwanda et al, 2019).

Andre Gunder Frank

Berkembangnya teori dependensi tidak bisa dilepaskan dari tokohnya bernama Andre Gunder Frank. Menurut Frank, teori dependensi merupakan bentuk ketidakmampuan suatu negara untuk bisa melalui tahap perkembangan. Sehingga yang terjadi adalah keterbelakangan. Keterbelakangan harus dirubah dengan cara revolusi, yang menghasilkan sistem sosialisme sebagai kebalikan dari kapitalisme (Sakir, 2018).

Theonia De Santos

Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos. Theotonio Dos Santos mengartikan ketergantungan sebagai "suatu kondisi historis yang membentuk struktur

tertentu dari ekonomi dunia sedemikian rupa sehingga menguntungkan beberapa negara dengan merugikan negara lain dan membatasi kemungkinan pengembangan ekonomi bawahan.” (Santos, 1971).

Antonio Gramsci

Menurut Gramsci, ketergantungan menyebabkan terjadinya hegemoni. Hegemoni satu negara terhadap negara lain. Hegemoni merupakan bentuk penguasaan secara ekonomi dan politik suatu negara kepada negara lain. Penguasaan tersebut secara terus-menerus hendak dipertahankan (Simon: 2004).

Karakteristik Teori Dependensi

Pertama, ketergantungan memiliki gejala yang dapat dilihat pada kondisi yang mempengaruhi pada keseluruhan sistem yang berjalan. Ketergantungan merupakan dampak langsung dari kapitalisme global. Ketergantungan seperti ini adalah ketergantungan pada sistem perekonomian yang dikendalikan oleh negara maju, terutama dengan mata uang yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia.

Kedua, ada banyak faktor yang membuat ketergantungan satu negara dengan negara. Ada ketergantungan disebabkan oleh minimnya sumber daya alam yang dimiliki satu negara dengan negara lain. Ketergantungan dalam kondisi ini adalah besarnya kuota *impor* daripada *export*. Begitu pula dengan minimnya modal yang dimiliki oleh satu negara, menyebabkan terjadinya ketergantungan kepada negara lain dalam bentuk hutang.

Ketiga, ketergantungan yang menimbulkan ketidaksetaraan secara terus-menerus. Ketergantungan yang tercipta dalam hubungan satu negara dengan negara lain, dapat dilihat sebagai ketergantungan yang terjadi pada jangka panjang, bila tidak terjadi selamanya. Apabila negara yang bergantung masih memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh negara

tempat bergantung. Namun bila negara yang tergantung tidak lagi memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan, maka dapat ditinggalkan. Pada akhirnya, kondisi ketergantungan tetap saja merugikan negara yang tergantung pada negara lain. Secara perlahan, namun pasti, kondisi tersebut menciptakan polarisasi negara-negara pusat (*central countries*) dan negara-negara pinggiran (*peripheral countries*) (Carter & Rogers, 2008).

Keempat, ketergantungan berpengaruh pada kehidupan politik. Negara yang memiliki ketergantungan kepada negara lain juga berpengaruh terhadap aspek politik negara tempat bergantung. Hal ini salah satu kondisi yang menyebabkan, demokrasi menjadi sistem yang banyak dianut negara di dunia. Demokrasi merupakan bentuk sistem politik yang memiliki kesamaan nafas dengan kapitalisme. Pada praktiknya, negara-negara yang kapitalisme menjadi sponsor demokratisasi.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian teori dependensi!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah teori dependensi!
3. Kemukakan satu kasus model dependensi yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

BAB III TEORI DEPENDENSI

“Ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang.”

(Theotonio Dos Santos)



BAB IV

Teori Kritis

BAB IV TEORI KRITIS

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai teori kritis.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik teori kritis.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami teori kritis.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori kritis.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik teori kritis.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam model kritis.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam model kritis.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah model kritis.

Pengertian Teori Kritis

Teori kritis, masih terus menjadi pembicaraan dan perdebatan. Ada yang menilai teori kritis masih belum terlalu konkret dan jelas rumusannya. Bahkan ada yang menilai, teori kritis rumit dan sulit untuk dipahami, sehingga sulit pula untuk membuat suatu definisi yang jelas mengenai konsep teori kritis. Selain itu, substansi teori kritis sulit untuk ditentukan karena mempunyai batasan ruang lingkup yang kurang jelas. Maka dari itu, usaha untuk membuat suatu rumusan mengenai inti dari teori kritis diperlukan suatu usaha kajian yang mendalam terhadap pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Meski begitu tetap saja teori kritis tetap bisa dipahami pada dua esensi utama. *Pertama*, berkaitan dengan identitas. Masalah identitas yang dimaksud adalah individu atau pribadi yang menggunakan cara pandang *one dimensional man*, serta memandang manusia hanya sebatas objek. *Kedua*, berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam institusi kultural. Masalah institusi kultural adalah masalah yang terjadi dalam bidang agama dan pengembangan ilmu pengetahuan. Teori ini memandang bahwa ilmu yang berkembang pada masa ini menyebabkan terjadinya dikotomi antara orang yang diutamakan (kapitalis) dan merek yang dikesampingkan (Suhelmi, 2001).

Terdapat tiga ciri utama teori kritis. *Pertama*, selalu berusaha melakukan perubahan yang mendasar dalam masyarakat dengan melakukan konstruksi terhadap tafsiran realitas. *Kedua*, berusaha melakukan pendekatan historis terhadap segala peristiwa. *Ketiga*, bersifat komprehensif terhadap segala keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat tiga hal mendasar dan utama dalam proses pembentuk dari teori kritis. *Pertama*, selalu berpikir kritis dan curiga terhadap realita. *Kedua*, memperhatikan aspek historis dan masyarakat. *Ketiga*, tidak mendikotomi antara teori dan praktik, antara fakta dan nilai. Selain itu, bila ditelaah lebih jauh, teori kritis sangat mengkritisi pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk memperkuat kedudukan penguasa.

Sehingga tercipta masyarakat yang tidak emansipatoris (Samekto, 2005).

Sejarah Teori Kritis

Sejarah munculnya teori kritis tak bisa dilepaskan dari dua aspek yang memiliki keterkaitan. Terkait dengan keadaan masyarakat dengan industrialisasinya. Antara praktik dengan kenyataan, teori yang berhadapan dengan realitas dan kondisi sosial. Begitu pula dari miskin dan kaya. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan dan dinamika, sebagian atau keseluruhan kondisi dan perubahan sosial yang terus terjadi (Saeng, 2012: 63).

Teori kritis dapat disebut sebagai “teori anti-kemapanan.” Teori yang lahirnya dari anggapan tidak benarnya sebuah sistem, ataupun struktur ataupun masyarakat. Kritis terhadap semua bentuk atau hal yang dianggap menindas masyarakat, baik yang dilakukan oleh negara, maupun oleh pemilik modal. Teori kritis beranggapan sebagai jalan dari ketidakberesan kondisi tersebut. Dari segi keilmuan, teori kritis memiliki pembeda dengan disiplin ilmu lain (Haryanto, 2013: 234).

Sejarah teori kritis tidak lepas dari filsafat Immanuel Kant (1724-1804) yang terkenal dengan Filsafat Kritisisme. Salah satu penganut *Neo-Kantianisme*, Herman Cohen menulis tiga buku yang dikenal dengan sebutan “Ketiga Kritik.” Ketiga kritik mencakup kritik atas rasio murni, kritik atas rasio praktis, dan kritik atas daya pertimbangan filsafat Kantian. Teori kritis terus mengalami perkembangan, terutama dipelopori oleh pemikiran filsafat dan pemikir-pemikir Jerman lainnya. Diantara para pemikir yang dikenal dengan teori kritisnya adalah Edmund Husserl, Schler, Martin Heidegger, Horkheimer dan Adorno (Bertens, 2014: 119).

Salah satu ahli teori kritis, Horkheimer menyebut Kant dapat disebut sebagai filsuf kritis yang pertama. Menurut Horkheimer, “Kant lebih menitikberatkan bagaimana otonomi individu itu

dapat dibangun dalam rangka membentuk pengetahuan. Di sinilah makna kritisisme awal, bahwa pengetahuan tidak ditentukan oleh objek atau realitas, tapi rasio manusia yang menghasilkan pengetahuan itu sendiri." Teori kritis juga identik dengan kelompok yang disebut dengan "Mazhab Frankfurt."

Tokoh-Tokoh Teori Kritis

Bila diperhatikan secara seksama, ada tiga tokoh utama teori kritis, yaitu Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno (1903-1969), dan Herbert Marcuse (1898-1979). Selain ketiganya ada satu tokoh lain yang tak kalah terkenal yaitu Jürgen Habermas (1929). Habermas merupakan generasi kedua dari teori kritis yang banyak membangkitkan kembali teori kritis. Dia bergabung dengan Institut Penelitian Sosial di Universitas Frankfurt, yang didirikan kembali oleh Horkheimer dan Adorno, pada dekade pasca Perang Dunia Kedua. Meski bukan merupakan bagian atau kelanjutan dari Marxisme, teori kritis memiliki referensi Hegel dan Marx yang disistematisasikan oleh Horkheimer dan rekan-rekannya di Institute for Social Research di Frankfurt. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Habermas dan rekan-rekannya di University of Frankfurt.

Di Amerika saat itu, produksi media hiburan dikontrol oleh korporasi-korporasi besar tanpa ada campur tangan negara. Hal ini memunculkan budaya massa komersial, yang merupakan ciri masyarakat kapitalis dan juga menjadi fokus studi budaya kritis. Horkheimer dan Adorno mengembangkan diskusi tentang apa yang disebut industri kebudayaan yang merupakan sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya di bawah produksi kapitalis.

Theodor Adorno

Dalam teori kritis, Theodor Adorno adalah tokoh kunci. Nama lengkapnya adalah Theodor Wiesengrund Adorno. Ia lahir di Kota Frankfurt, Jerman pada tahun 1903. Dia adalah "seorang filosof,

komposer, penulis esai, dan teoritis sosial. Pada usia 15 tahun, Adorno mengikuti pertemuan studi mingguan bersama Siegfried Kracauer, yang diakuinya jauh lebih berpengaruh pada perkembangan intelektualnya daripada guru-gurunya di bangku kuliah. Pada tahun 1921, Adorno belajar di universitas di Frankfurt, mempelajari filsafat, sosiologi, musik, dan psikologi." Dia bertemu dan berteman dengan Max Horkheimer dan Walter Benjamin saat kuliah. Pada tahun 1924, "Adorno menyelesaikan doktor di bidang filsafat. Pada tahun 1927, dia kembali ke Frankfurt, setelah sempat tinggal di Wina untuk belajar musik, dan bergabung dengan Horkheimer di Institut Penelitian Sosial yang didirikan pada tahun 1924, yang kemudian dirujuk sebagai Mazhab Frankfurt. Lembaga ini bertujuan menggabungkan filsafat dan ilmu sosial menjadi teori sosial kritis. Sebagai pemikir Adorno keberatan terhadap filsafat sistematis dan meragukan apakah pemikiran yang sebenarnya dapat transparan. Hal ini berasal dari keberatannya terhadap berpikir metodologis. Filsafat sistematis dan pemikiran metodologis memiliki kecenderungan untuk sampai pada kesimpulan yang hanya mengkonfirmasi asumsi yang terkandung dalam premis-premisnya. Adorno adalah pemikir anti-Hegel dan sekaligus, sepenuhnya Hegelian. Dia tidak setuju terhadap posisi filosofis Hegel yang bercorak totalitarianisme. Adorno meyakini bahwa pemikiran konseptual muncul dari kebutuhan terhadap adaptasi dan, karenanya, selalu membawa benih-benih dominasi di dalamnya."

Artikel Adorno "Situasi Sosial Musik," yang muncul dalam edisi pertama majalah yang diproduksi oleh Institut Penelitian Sosial Frankfurt, mencakup berbagai hasil sosiologis dan termasuk dalam edisi pertama jurnal tersebut. Esai ini penting karena analisis musik adalah awal dari refleksi sosiologis Adorno, yang bertujuan untuk menyingkap kandungan sosiologis dalam tekstur karya estetis. Hal ini berlanjut dengan penemuan apa yang disebut mediasi sosial, yang berarti saling keterpengaruhannya antara yang universal dan partikular; masyarakat dan individu.

Teori kritis Adorno berkaitan dengan keterkaitan antara isu-isu masyarakat secara keseluruhan dan cara-cara nyata di mana orang menjalani kehidupan mereka dalam masyarakat itu. Menggunakan pengertian masyarakat sebagai titik awal, subjeknya adalah individu. Sebuah teori menjadi kritis dengan menegaskan ketidakadilan, egoisme, dan alienasi yang dihasilkan oleh kondisi sosial di bawah ekonomi kapitalis. Pasca perang dunia, Adorno mengembangkan cara berpikir yang disebut dialektika negatif yang menolak segala bentuk pemikiran afirmatif tentang etika dan politik. Sementara Horkheimer semakin tertarik pada teologi.

Jürgen Habermas

Habermas yang bergabung dengan Institut Penelitian Sosial Frankfurt pasca perang dunia, memulai pemikirannya. Pemikiran Habermas berbicara tentang pengembangan konsep nalar yang lebih komprehensif, yakni nalar yang tidak tereduksi pada instrumen teknis dari subjek individu, yang kemudian memungkinkan terbentuknya masyarakat emansipatif dan rasional. Usaha ini melahirkan tesis tentang keterkaitan antara pengetahuan dan kepentingan manusia. Tentang hal ini, Habermas mempostulasi keberadaan tiga kepentingan manusia yang berakar. Tiga kategori minat ada dalam hidup; kepentingan teknis (teknis), kepentingan praktis (praktis), dan kepentingan emansipatoris. Kepentingan teknis (teknis) adalah yang paling umum (emansipatoris). Pemahaman ketiga kepentingan ini diperlukan sehubungan dengan pembentukan otoritas yang mampu dan mengendalikan dari organisasi dominan dan apa yang dicarinya (Morrison, 2002).

Habermas menekankan alasan yang mendasari untuk memperbaiki penyimpangan. Dia menegaskan bahwa dasar rasional untuk kehidupan bersama hanya dapat diraih ketika hubungan sosial diatur menurut prinsip validitas konsekuensi politis tergantung pada kesepakatan yang dicapai dalam komunikasi yang bebas dari dominasi. Konsep Habermas

tentang teori kritis mengalami kristalisasi pada tahun 60-an dalam karyanya tentang filsafat ilmu sosial, "*On the Logic of the Social Sciences dan Knowledge and Human Interests.*" Habermas mengkritik positivisme dalam ilmu-ilmu sosial, dengan mengatakan bahwa paradigma positivistik sesuai untuk ilmu-ilmu alam yang tujuan akhirnya adalah mengontrol alam. Ilmu budaya (*cultural sciences*), seperti sejarah dan antropologi, lebih sesuai didekati secara interpretatif. Tapi ketika berbicara tentang ilmu-ilmu sosial, Habermas meyakini bahwa kepentingan teknis, seperti dalam ilmu alam, dan praktis, seperti dalam ilmu budaya, seharusnya berada di bawah kepentingan emansipatoris. Dengan demikian, yang harus dilakukan ilmuwan sosial adalah, memahami situasi subjektif yang terdistorsi secara ideologis, memahami kekuatan yang menyebabkan situasi tersebut, dan menunjukkan bahwa kekuatan ini bisa diatasi melalui kesadaran individu atau kelompok (Habermas, 2015).

Karakteristik Teori Kritis

Sebuah analisis yang luas dan mendalam tentang realitas didefinisikan sebagai hipotesis. Secara historis, teori kritis dan konsep sekolah atau Mazhab Frankfurt tidak dapat dipisahkan. Pusat penelitian sosial Universitas Frankfurt, yang didirikan oleh neo-Marxis Jerman dan berlokasi di Frankfurt, Jerman, adalah sumber teori kritis. Pada 1961 teori kritis menarik perhatian publik dalam domain filsafat sosial dan sosiologi, termasuk di bidang ekonomi (Bernstein, 1994).

Debat sosial epistemologis Karl Popper dan Adorno adalah salah satu konflik intelektual paling terkenal di abad ke-20. Ini merupakan salah satu debat intelektual terpenting abad ke-20. Di kedua sisi debat Popperian atau Adorno, ada pula perdebatan yang tidak kalah serunya antara Hans Albert dan Jürgen Habermas, yang juga selalu berselisih satu sama lain. Sejak itu, perdebatan positivis dalam sosiologi Jerman terus berlangsung. Habermas selanjutnya juga dikenal sebagai ahli dan pelopor teori

kritis (Kurniawati et al, 2021).

Untuk memahami teori kritis, Habermas adalah seorang ahli yang telah berhasil menggabungkan pemikiran analitis dan dialektis. Menurut teori kritis Marxisme, cabang Marxisme yang paling jauh dari komitmen ideologis Karl Marx adalah teori kritis (*Frankfurter Schule*). Sebagai teori kritis masyarakat, "*Eine Kritische Theorie der Gesellschaft*" (teori kritis masyarakat) mengacu pada metodologi dan karakteristik Mazhab Frankfurt. Orang-orang bebas dari kendali teknokrasi modern. Menurut pandangan ini, ketika mereka dapat memperbarui dan merekonstruksi teori yang sesuai (Fraser, 1985).

Meskipun mendapat pengaruh dari teori sosial Karl Marx, teori kritis melampaui kerangka konseptual Marxisme. Beberapa tokoh teori kritis tidak mau diidentifikasi dengan Marxisme, atau menolak beberapa konsep utama Marxisme dalam prosesnya, dan mengambil pandangan baru terhadap tantangan dalam masyarakat industri modern selain menjadi kreatif. Tokoh teori kritis yang banyak menguasai dan memahami Marxisme adalah Marx Horkheimer. Namun Horkheimer juga tidak sepenuhnya setuju dengan pemikiran Hegel dan Marx.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian teori kritis!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah teori kritis!
3. Kemukakan satu kasus model teori kritis yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

BAB IV TEORI KRITIS

“Dasar rasional untuk kehidupan bersama hanya dapat diraih ketika hubungan sosial diatur menurut prinsip bahwa validitas konsekuensi politis tergantung pada kesepakatan yang dicapai dalam komunikasi yang bebas dari dominasi.”

(Jurgen Habermas)



BAB V

Teori Partisipasi

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai teori partisipasi.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik teori partisipasi.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami teori partisipasi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori partisipasi.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik teori partisipasi.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam partisipasi.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam masalah partisipasi.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah partisipasi.

Pengertian Teori Partisipasi

Era demokrasi memungkinkan setiap orang setara ⁶ di dalam proses pembangunan. Maka, negara yang menganut sistem politik demokrasi meniscayakan adanya keterlibatan warga dalam setiap proses politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Hal ini yang sesungguhnya relevan dengan partisipasi warga. Dalam sistem demokrasi, partisipasi warga menjadi hal yang niscaya. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Semakin matang demokrasi, maka semakin besar partisipasi warga. Demokratisasi di dalam pembangunan selanjutnya ²² lahirkan desentralisasi, dan ¹⁰ pembangunan dengan model dari bawah ke atas (*bottom up*), masyarakat terlibat secara langsung dalam setiap tahapan dan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi (Tilaar, 2009).

Partisipasi, dapat dimaknai sebagai keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan tersebut bisa dalam bentuk menyuarakan pendapat atau melakukan tindakan. Bisa pula keterlibatan dalam bentuk lain berupa pemberian ide dan rekomendasi yang disampaikan kepada pemangku kebijakan. Ada pula dalam bentuk sumbangsih, atau pemberian kontribusi dalam bentuk sumber daya seperti pikiran, waktu, dan uang dan atau materi lain (Sumaryadi, 2010).

Menurut Jalal dan Supriyadi, partisipasi juga dapat berarti bahwa pengambil keputusan mengusulkan kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi untuk terlibat dalam bentuk mengungkapkan pendapat dan saran mereka serta menyediakan barang, keterampilan, bahan, atau jasa dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Partisipasi juga menunjukkan bahwa kelompok menyadari masalah mereka sendiri, menganalisis pilihan mereka, membuat keputusan, dan menemukan solusi. (Jalal, 2001).

Ada dua jenis keterlibatan, menurut Sugiyah. *Pertama*, Partisipan aktif. Setiap individu melakukan suatu tindakan yang merupakan bagian dari proses partisipasi, mereka dianggap terlibat dalam proses tersebut. Dipastikan bahwa semua suara disertakan dalam diskusi dan bahwa setiap orang mendapat kesempatan untuk berbagi pemikiran mereka, setiap orang harus diberi kesempatan yang sama untuk terlibat. *Kedua*, Partisipasi pasif. Partisipasi pasif ini adalah partisipasi yang dilakukan warga negara, namun dalam bentuk yang otomatis. Seperti misalnya pemberian pajak. Pajak diberikan oleh warga negara dalam kondisi pasif. Pajak yang dibayarkan oleh warga, sebagian sudah dipotong dari kegiatan usaha atau belanja yang dilakukan. Ini adalah bentuk partisipasi pasif. (Sugiyah, 2001: 38).

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dapat dibagi menjadi empat kategori. *Pertama*, pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ditekankan pertama dan terutama. Jenis partisipasi atau keterlibatan ini difokuskan untuk memunculkan ide atau konsep baru yang terkait dengan kepentingan bersama masyarakat untuk melihat opsi lain apa yang ada. Dimungkinkan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dengan mengajukan ide atau pendapat, menghadiri pertemuan dan debat, serta bereaksi dan menolak program yang disediakan.

Kedua, partisipasi implementasi. Partisipasi kategori ini memungkinkan individu atau kelompok masyarakat terlibat untuk melakukan eksekusi atau melaksanakan pembangunan dengan berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk pemberian dana yang dibutuhkan, atau bisa pula dengan melakukan pekerjaan administratif dan menghasilkan spesifikasi program. Baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pencapaian tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam penilaian. Kategori ini sama dengan partisipasi dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pengawasan juga seiring dengan evaluasi yang diberikan, dan muncul dalam bentuk rekomendasi

kepada pihak berwenang.

Keempat, partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Pembangunan yang dihasilkan harus dimanfaatkan, tidak dibiarkan begitu saja tidak digunakan. Menggunakan hasil pembangunan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya, bagian dari partisipasi pembangunan. Dengan dimanfaatkan pada proses merawat pula (Dwiningrum, 2011).

Sejarah Teori Partisipasi

Keterlibatan masyarakat atau partisipasi warga, disebut juga dengan partisipasi publik, pertama kali dikenal secara formal dalam perencanaan kota di Amerika Serikat pada akhir 1950-an. Selanjutnya, partisipasi juga dikenal di negara lain. Menurut (Oosthuizen, 1984), pada pertengahan 1960-an, partisipasi juga mulai berkembang di Inggris. Baru pada tahun 1968, ketika Undang-Undang Perencanaan Kota dan Negara diberlakukan di Inggris, undang-undang tersebut menjadi kebijakan yang wajib secara hukum dan diakui secara publik. Tahun 1970-an merupakan titik balik keterlibatan masyarakat Australia dalam proses pembangunan (Wanma, G. F., & Erari, 2009).

Partisipasi dikenal secara luas di Australia pada saat dibentuk Otoritas Perencanaan Negara, yang kemudian diganti menjadi Komisi Perencanaan dan Lingkungan Negara, kemudian diganti lagi menjadi Komisi Perencanaan Negara dan Lingkungan. Kemudian digunakan untuk mereformasi undang-undang, norma, dan prosedur perencanaan untuk memaksimalkan kemungkinan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Dennis, 1972).

Menurut (Ernawati & Kurniawan, 2002), setidaknya ada lima model partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam proses kehidupan.

1. Partisipasi sebagai penelitian pasar. Penelitian pasar dapat dilakukan dengan model partisipasi. Warga dapat dilibatkan dalam jajak pendapat atau survei sebagai informan dan narasumber.

2. Partisipasi sebagai pembuatan atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan dengan melibatkan partisipasi warga dalam bentuk meminta pendapat dan masukan sebelum ditetapkan.
3. Partisipasi sebagai pemecah oposisi yang terorganisir. Oposisi pada pemerintahan yang berkuasa merupakan bentuk lain dari partisipasi.
4. Partisipasi sebagai sosial *therapy*. Partisipasi juga menjadi saluran sosial untuk menyuarakan pendapat.
5. Partisipasi sebagai *grass root radicalism*.

Pandangan Tokoh Mengenai Teori Partisipasi

Dalam hal rencana dan strategi pembangunan pemerintah, partisipasi digambarkan sebagai bentuk partisipasi aktif di mana masyarakat memiliki suara terhadap rencana kebijakan dan strategi diimplementasikan. Baik dalam ranah politik maupun sosial, hal ini merupakan hal yang lumrah, untuk mendapatkan dukungan yang diadopsi dalam proses politik dari berbagai kelompok kepentingan (Ashariansyah, 2013).

1. Seperti yang didefinisikan oleh Slamet, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan meliputi mengambil bagian dalam pekerjaan itu sendiri dan mengambil bagian dalam penggunaan hasil pembangunan. Pemerintah telah mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, atau pemberdayaan masyarakat, sejak awal 1980-an. Ini berarti bahwa semua anggota masyarakat harus memiliki kesempatan untuk membantu membentuk dan memelihara apa yang ada di sekitar mereka. Pemerintah membentuk berbagai kelompok di masyarakat seperti PKK, LKMD, dan organisasi kepemudaan, sebagai wadah untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga solidaritas bersama. Penting untuk diingat bahwa aparat pemerintah atau yang diberi wewenang oleh pemerintah, yang bertindak sebagai penghubung antara tujuan dan sasaran pembangunan dan

- apa yang harus dilakukan masyarakat, bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat (Suryono, 2001).
2. Agar keterlibatan masyarakat menjadi efektif dalam pertumbuhan, harus ditandai dengan kesepian di pihak peserta (Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusuma, 2005).
 3. Keterlibatan masyarakat, menurut Isbandi, digambarkan sebagai partisipasi dalam proses mengenali masalah masyarakat, memilih dan menerapkan alternatif solusi untuk masalah tersebut, dan menjaga ketertiban umum sambil menilai perubahan di masyarakat. Harus ada fokus pada estetika, keterlibatan masyarakat, dan kehadiran bisnis yang akan mengarah pada kemandirian masyarakat lokal saat merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan aktif, baik dalam desain rencana pelaksanaan maupun dalam evaluasi hasil pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan secara aktif merupakan tanda yang sangat baik dari kemampuan masyarakat untuk mengambil inisiatif dan menuai keuntungan dari pembangunan yang telah diselesaikan. Kita harus memahami kebutuhan nyata individu dan masyarakat untuk mendorong dan menumbuhkan sikap partisipatif di antara para perencana masyarakat (Isbandi, 2007).
 4. Berbicara mengenai partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi rakyat dengan sukarela, tanpa tekanan, dan jauh dari kepentingan luar pemerintah (Handayani, 2006).
 5. Partisipasi masyarakat dipandang keterlibatan aktif dalam seluruh proses kegiatan, sebagai wadah untuk mempererat kohesi masyarakat, dan sebagai salah satu cara untuk mendukung pengembangan rasa memiliki dan akuntabilitas dalam program-program yang dilaksanakan. (Handayani, 2006).
 6. Seperti yang dijelaskan Valderrama, konsep partisipasi dapat dipecah menjadi tiga tradisi berbeda (Slamet, 2003). Masing-

masing memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan masyarakat demokratis.

- a. Partisipasi politik (*political participation*). Partisipasi politik bisa dilakukan dalam bentuk memilih maupun dipilih. Partisipasi politik dapat pula diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap partai politik atau kandidat tertentu yang terlibat dalam kontestasi politik.
- b. Partisipasi sosial (*social participation*). Partisipasi dilakukan dalam bentuk aksi atau kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi di masyarakat. Kehidupan sosial membutuhkan partisipasi warga, seperti gotong-royong, saling menolong di antara sesama warga negara, dan lain-lain.
- c. Partisipasi warga (*citizen participation/ citizenship*). Partisipasi warga merupakan bentuk partisipasi yang diberikan oleh warga negara, baik langsung maupun tidak langsung, di dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi warga diberikan kepada pemangku kebijakan maupun kepada sesama warga.

Karakteristik Teori Partisipasi

Partisipasi atau keterlibatan warga di dalam pembangunan memiliki ciri khas atau karakteristik. Ada beberapa karakteristik dari pembangunan model partisipasi.

- a. Partisipasi pada tingkat yang berbeda. Misalnya, komunitas yang menjadi bawahan, pengikut, adalah contoh komunitas yang berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh pihak lain. Partisipasi model ini disebut sebagai partisipasi vertikal, atau *bottom up*. Partisipasi vertikal arahnya dari bawah ke atas, dari pihak yang berada di posisi atau level tertentu pada level di atasnya.
- b. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam skala besar. Individu dan kelompok saling berkolaborasi secara horizontal dalam jenis partisipasi ini, dan masyarakat secara keseluruhan terlibat dalam upaya Keterlibatan masyarakat. Karakteristik

partisipasi model ini adalah berada pada level yang sama. Bisa terjadi antara sesama bidang atau bagian di dalam suatu organisasi. Misalnya antara bidang produksi dan bidang penjualan. Bila di masyarakat antara sesama organisasi masyarakat. Seperti antara organisasi politik dan organisasi masyarakat, saling berkontribusi dan mendukung program satu sama lain. Menurut Basrowi, partisipasi seperti ini dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a) Aktivitas yang membutuhkan pengerahan tenaga fisik. Pengerahan dalam bentuk fisik, bisa pula bermakna mobilisasi dalam bentuk materi, yang diberikan oleh satu pihak atau satu kelompok kepada pihak atau kelompok lain.
- b) Partisipasi non fisik. Partisipasi jenis atau bentuk ini bisa dalam bentuk dukungan (*support*) yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Bisa dalam bentuk doa, pemberian suara, dukungan politik. Dalam pendidikan bisa dalam bentuk dukungan moral dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diberikan oleh satu kelompok kepada kelompok lain (Dwiningrum, 2011).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian teori partisipasi!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah teori partisipasi!
3. Kemukakan satu kasus partisipasi pembangunan yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

BAB V TEORI PARTISIPASI

“Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah kepentingan eksternal”.
(**Hetifah**)



BAB VI

Teori Pemberdayaan

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai teori pemberdayaan.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik teori pemberdayaan.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami teori pemberdayaan.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori pemberdayaan.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik teori pemberdayaan.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam pemberdayaan.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam pemberdayaan.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah pemberdayaan.

Pengertian Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal kata berdaya (*power*). Pemberdayaan bermakna memiliki kemampuan atau kekuatan dengan diberdayakan (*empowerment*). Pemberdayaan bisa memiliki makna sederhana, yaitu, diberi kemampuan (*to give power*). Diberi kemampuan dengan tiga cara. *Pertama*, diberi uang/ modal (*to give money*). Pemberdayaan bisa dilakukan dengan cara memberi uang atau modal kepada sasaran pemberdayaan. Uang tersebut digunakan untuk membiayai usaha yang dijalankan. Cara ini dilakukan bagi segmen/ kelompok masyarakat yang memiliki keahlian tertentu. Misalnya kelompok pemuda yang memiliki keahlian perbengkelan, dan memiliki kemauan untuk membuka usaha perbengkelan.

Kedua, diberi keahlian (*to give skill*). Pemberdayaan bisa juga dilakukan dengan memberi atau mentransfer keahlian (*skill*). Pemberian keahlian (*skill*) biasanya diberikan kepada kelompok yang memiliki daya secara fisik dan mental, sehingga berpotensi untuk diberdayakan. Misalnya anak-anak muda yang secara fisik sehat dan mental yang menganggur, tidak memiliki pekerjaan. Namun kelompok tersebut memiliki keinginan untuk berdaya. Maka terhadap kelompok seperti itu diberi keahlian (*skill*), dengan cara dilatih, dididik, baik secara formal, maupun informal. Dengan memiliki keahlian anak-anak muda tersebut bisa bekerja pada industri yang ada di kota atau tempat tinggal mereka.

Ketiga, diberi keahlian dan modal. Pemberdayaan model ini dilakukan secara bersamaan, memberi keahlian dengan memberi modal. Pertama kali dilakukan adalah memberi skill atau melatih objek/ sasaran sehingga memiliki keahlian. Setelah memiliki keahlian, objek/ sasaran bisa dibuat mandiri dengan membuka usaha secara mandiri. Untuk membuka usaha secara mandiri, mereka memerlukan modal yang digunakan untuk membuka usaha. Setelah membuka usaha, maka kelompok ini menjadi mandiri dan berdaya dengan usaha yang dijalankan. Salah satu pekerjaan selanjutnya adalah pada, konsistensi objek/

sasaran pemberdayaan yang telah memiliki usaha secara mandiri.

Maka, pemberdayaan memiliki relevansi dengan kekuasaan (*power*). Seseorang disebut "berdaya", karena memiliki kemampuan, keterampilan atau kemampuan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat membahas mengenai pemberdayaan.

- a. Menyediakan kebutuhan dasar mereka sehingga mereka dapat tercukupi kebutuhan utama/ dasar mereka. Dengan begitu, mereka akan mendapat kebebasan, bebas dari kelaparan. Bebas dari kelaparan akan membuat mereka memiliki kebebasan pula untuk mengekspresikan ide, dan pemikiran, sehingga mampu berkarya;
- b. Memiliki akses ke sumber daya yang memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak uang sambil tetap mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan;
- c. Berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan (Wisseman et al; Hasbullah et al; Tindjafe et al).

Pemberdayaan mengacu pada proses di mana individu mengembangkan informasi, keterampilan, dan otoritas yang mereka butuhkan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang-orang yang mereka sayangi. Menurut Swift dan Levin tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Istilah "pemberdayaan" menggambarkan proses redistribusi kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Ada struktur yang bergerak di masyarakat untuk melakukan proses pemberdayaan. Pemberdayaan tidak terjadi secara otomatis, dan begitu saja. Ada upaya terstruktur dan disengaja untuk mewujudkannya (Suharto, 2010).

Individu yang berjuang untuk keluar dari kondisi dan situasi miskin dan meraih kesejahteraan, bisa dengan jalan pemberdayaan. Artinya memiliki keinginan untuk berdaya. Sehingga dengan begitu, individu tersebut dalam terlibat di dalam serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau pemberdayaan anggota masyarakat yang lebih lemah dan

lebih rentan. Setelah diberdayakan, maka individu tersebut dapat dan mampu mencari nafkah secara mandiri, kemudian ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan. (Irmawati, Salim, and Fitra, 2021).

Sejarah Teori Pemberdayaan

Teori pemberdayaan tidak lepas dari sejarah demokrasi. Dalam demokrasi warga/ rakyat memiliki kedaulatan. Dalam negara demokrasi setiap warga mendapatkan hak yang sama, tidak memandang status ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, menjadi tanggung jawab negara untuk membuat setiap warga negaranya menjadi berdaya. Berdaya bermakna setara dengan warna negara lain (Suartha, 2012). Menurut Chambers (1995), aspek pemberdayaan berpusat pada rakyat, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan paradigma baru pembangunan juga tercermin dalam konsep ini.

Ada dua kecenderungan utama konsep pemberdayaan ketika dioperasionalkan. *Pertama*, kecenderungan proses yang memberi atau mengalihkan sebagian kekuasaan kepada masyarakat atau individu untuk menjadi lebih berdaya. *Kedua*, kecenderungan proses yang memberi atau mengalihkan sebagian kekuasaan kepada masyarakat atau individu untuk menjadi lebih berdaya (Sumodiningrat, 2002). Untuk memahami konsep pemberdayaan, diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang siklus pemberdayaan. Tidak mungkin menyelesaikan satu program pemberdayaan dan berhenti pada titik tertentu. Sebaliknya, kualitas program harus terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu dari satu tahap ke tahap berikutnya (Mubarak, 2010).

Wilson (1996) mengidentifikasi beberapa tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Langkah awal menuju transformasi positif adalah keinginan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan masyarakat mampu mengatasi hambatan-hambatan untuk maju. Tahap selanjutnya diharapkan lebih percaya diri dan

memiliki rasa tanggung jawab. Pada titik ini, perlu upaya untuk memperluas lingkup tanggung jawab yang juga terkait dengan keinginan dan dorongan untuk melakukan pekerjaan lebih efektif. Manfaat praktis dari pemberdayaan mulai terlihat dengan rasa kepemilikan yang lebih besar dikaitkan dengan hasil kinerja yang lebih baik. Ketika keberhasilan dalam meningkatkan kinerja memiliki kapasitas untuk meningkatkan sentimen psikologis. Memberdayakan diri terdorong untuk berusaha lebih keras, menuju peningkatan pencapaian (Sulila, 2016).

Tokoh Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat telah berkembang pesat dalam beberapa puluh tahun terakhir. Pemberdayaan seperti model baru di dalam pembangunan, yang banyak digunakan oleh berbagai lembaga, bahkan negara. Ada beragam model pemberdayaan yang diterapkan oleh ahli di dalam melaksanakan program pemberdayaan, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks.

Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jim Ife

Pemberdayaan didefinisikan oleh Jim Ife dalam bukunya *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Menurut Ife, pemberdayaan menyediakan warga sumber daya, kesempatan untuk belajar tentang masa depan mereka sendiri. Memberi pengetahuan dan keterampilan yang akan meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan tentang mereka sendiri. Selanjutnya merancang masa depan dan berpartisipasi dalam upaya untuk mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Seperti yang didefinisikan oleh Jim Ife, istilah "pemberdayaan" terkait erat dengan dua konsep kunci: "kekuatan" dan "individu yang kurang beruntung" (ketidaksetaraan). Akibatnya, ada empat cara berpikir tentang pemberdayaan: pluralis, elitis, strukturalis, dan post strukturalis (Ife, 1995).

Empat gagasan pengembangan masyarakat dirinci dalam buku Zubaedi, Pengembangan Masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan dipandang sebagai metode untuk membantu individu dan kelompok yang kurang mampu dalam masyarakat sehingga mereka dapat menjadi lebih berharga. Kerja pemberdayaan yang dilakukan dirancang untuk membantu masyarakat dengan mengajari orang-orang tentang bagaimana menggunakan bakat, hobi, dan bagaimana menggunakan media yang terkait dengan aksi politik, dan bagaimana sistem (aturan main) bekerja (Zubaedi, 2013).

Alhasil, kapasitas masyarakat untuk bersaing secara sehat, tanpa ada yang menang atau kalah, semakin menguat. Untuk kedua kalinya, pemberdayaan dilihat dari perspektif elitis sebagai upaya untuk mempengaruhi elit, seperti pejabat terpilih, pemimpin perusahaan, dan orang kaya, baik dengan aliansi dengan elit tersebut atau dengan menentang mereka yang berkuasa dan mengejar perubahan di antara mereka (Zakaria, 2018).

Perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda pertempuran jangka panjang, karena tujuannya untuk menghapuskan segala macam ketimpangan struktural. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembebasan yang membutuhkan transformasi struktural dan penghapusan penindasan struktural agar berhasil. Penting juga untuk dicatat bahwa perspektif pascastrukturalis melihat pemberdayaan sebagai upaya untuk mengubah wacana, daripada tindakan atau praksis individu. Dengan demikian, belajar bagaimana menghasilkan pemikiran baru dan analitis dipandang sebagai langkah menuju pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2013).

Proses pemberdayaan mencakup fokus pada komponen pendidikan yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Membangun atau memodifikasi sistem dan organisasi yang memungkinkan akses yang adil ke sumber daya dan layanan, serta kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat,

merupakan komponen kunci dari pemberdayaan. Upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran melalui proses pendidikan dirancang untuk memberdayakan murid dalam berbagai topik. Upaya sedang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada anggota masyarakat yang paling rentan untuk membantu mereka menjadi lebih kuat. (Zubaedi, 2013).

Pemberdayaan Masyarakat Menurut Teori Aktor

Menurut teori aktor, subjek yang bebas dari kontrol atau aturan yang ketat dan diberi kebebasan untuk menerima tanggung jawab atas pikiran dan tindakan dianggap subjek yang mampu mempengaruhi dunia di sekitar mereka. Aktor, meliputi otoritas, keyakinan dan kompetensi (*confidence and competence*), kepercayaan (*trust*), peluang (*opportunities*), kewajiban (*responsibility*), dan dukungan (*support*). Teori aktor dapat digunakan untuk mengkategorikan kategori sosial dan moral.

Karakteristik Teori Pemberdayaan

Salah satu implikasi paling menonjol dari ungkapan "pemberdayaan" adalah gagasan untuk membantu mereka yang terpinggirkan. Menurut Hatu, kapasitas klien untuk mengontrol atau memberikan pengaruh (Hatu, 2010) juga termasuk dalam definisi kekuasaan ini.

1. Kemampuan seseorang untuk membuat keputusan tentang gaya hidupnya, di mana tinggal, dan apa yang ia lakukan untuk suatu pekerjaan.
2. Kemampuan untuk menganalisis persyaratan sesuai dengan tujuan dan aspirasi seseorang. Diperlukan adanya analisis terhadap tujuan yang hendak diwujudkan.
3. Kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pikiran mereka tanpa takut terkekang oleh tuntutan orang lain, baik secara tertulis maupun lisan.
4. Kemungkinan mempengaruhi organisasi publik seperti program bantuan sosial atau lembaga pendidikan.

5. Institusi masyarakat seperti sekolah, layanan sosial, dan fasilitas perawatan kesehatan adalah contoh sumber daya yang dapat diakses, digunakan, dan digunakan.
6. Mobilisasi sumber daya; kemampuan untuk mengatur sumber daya resmi, informal dan akar rumput.
7. Kegiatan ekonomi (kapasitas untuk memanfaatkan dan mengelola sistem produksi, distribusi (termasuk ritel), dan pertukaran barang dan jasa).
8. Ini termasuk memiliki anak dan memenuhi kebutuhan mereka serta mengajari mereka bagaimana menjadi sadar secara sosial dan budaya akan diri mereka sendiri.

Salah satu kunci keberhasilan dalam pemberdayaan adalah, motivasi yang muncul dari sasaran/ objek pemberdayaan. Sebesar apapun dana yang diberikan kepada sasaran/ objek pemberdayaan, bila objek/ sasaran pemberdayaan tidak memiliki motivasi kuat untuk berubah dan berdaya, maka model pemberdayaan akan susah untuk diimplementasikan. Begitu pula, sebegus apapun program pemberdayaan, bila objek/ sasaran pemberdayaan tidak memiliki motivasi, maka cenderung gagal.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian teori pemberdayaan!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah teori pemberdayaan!
3. Kemukakan satu kasus pemberdayaan yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

BAB VI TEORI PEMBERDAYAAN

“Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.”

(Pearson et al, 1994)



BAB VII

Teori Pengembangan Lembaga

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai teori pengembangan lembaga.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik teori pengembangan lembaga.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami teori pengembangan lembaga.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori pengembangan lembaga.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik teori pengembangan lembaga.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam pengembangan lembaga.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam pengembangan lembaga.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah pengembangan lembaga.

Pengertian Teori Pengembangan Lembaga

Pengembangan lembaga (*institutional building*) merupakan salah satu alternatif di dalam pelaksanaan pembangunan. Pengembangan lembaga bertumpu pada dua hal. *Pertama*, pembuatan institusi. Pemerintah perlu melakukan pembaharuan terhadap berbagai lembaga yang ada, baik lembaga negara, maupun lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Pada tataran lembaga negara, pemerintah perlu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga tidak ada celah yang memungkinkan adanya kekosongan di dalam pengelolaan negara. Banyak lembaga negara yang dibuat oleh pemerintah setelah reformasi, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan politik. Misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan lain-lain. Di bidang ekonomi misalnya ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan Keuangan (LPSK). Lembaga terakhir ini dibuat oleh pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, nasabah yang uangnya ada di bank, kebingungan harus mengadu kemana pada saat uang yang ada di bank tidak bisa ditarik. Sehingga dibuat lembaga yang menjadi dana nasabah yang menyimpan uangnya di bank yang ada.

Pada skala masyarakat (*community*) pemerintah juga banyak membuat lembaga (institusi) yang menjadi bagian pelaksanaan program pembangunan. Seperti pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dibuat kepengurusan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan dan Pedesaan. Lembaga ini terdiri dari masyarakat yang direkrut oleh pemerintah untuk menjalankan program pembangunan hingga level desa.

Kedua, penguatan institusi yang sudah ada. Institusi atau lembaga-lembaga yang sudah ada diperkuat keberadaan dan eksistensinya. Penguatan institusi/ lembaga bisa dengan cara memperluas cakupan dan wilayah kerjanya, maupun kewe-

nanganannya. Hal ini bisa berlaku pada lembaga negara, atau lembaga-lembaga yang ada di masyarakat yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Penguatan lembaga negara, seperti misalnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak hanya fokus pada wilayah pemberantasan korupsi, namun juga pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal tersebut bila dilakukan dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi sejak dini, yang tentu saja dapat mencegah kerugian keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi, tidak otomatis dapat mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Contoh lain adalah, penguatan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai mitra pemerintah desa (Pemdes), namun sekaligus berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah desa. BPD tidak terkesan menjadi stempel dari apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, namun menjadi penyeimbang (*check and balance*).

Penguatan lembaga yang ada di masyarakat bisa dilakukan dengan upaya membuat lembaga-lembaga yang sudah ada semakin efektif kinerjanya. Seperti keberadaan koperasi yang dalam sejarahnya, memiliki peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Koperasi bahkan disebut sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Namun keberadaannya pada beberapa dekade terakhir, kalah dengan peran industri, di dalam membangun perekonomian nasional. Sehingga keberadaan koperasi yang banyak tumbuh di tengah masyarakat perlu dikuatkan, dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan pemberian modal, serta fasilitasi bagi produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi, seperti *marketplace* dan lain-lain. Begitu pula dengan penguatan terhadap kelompok-kelompok mandiri yang ada di masyarakat, seperti karang taruna, kelompok pengajian, arisan dan lain-lain yang secara kultural, banyak tumbuh dan hadir di tengah masyarakat.

Begitu pula, pengembangan lembaga diharapkan dapat menggunakan sumber daya manusia secara efektif di dalam penggunaan dana yang tersedia baik yang berasal dari pemerintah maupun dari swadaya. Sehingga, keberadaan lembaga-lembaga yang ada, dapat berperan lebih maksimal di dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan di masyarakat.

Sejarah Teori Pengembangan Lembaga

Banyak akademisi yang meneliti ilmu politik institusional fokus pada aturan main dan tindakan kolektif untuk kebaikan yang lebih besar. Pengembangan kelembagaan dimungkinkan untuk dilakukan sebagai instrumen di dalam melaksanakan pembangunan. Namun bukan berarti bahwa pembangunan kelembagaan di dalam pembangunan tidak mendapat tantangan, atau bahkan mengalami masalah. Banyak masalah yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan. Seperti adanya tumpang-tindih (*overlapping*) kewenangan antarlembaga, kemudian adanya kekosongan aturan sebagai petunjuk pelaksanaan, dan lain-lain (Syarif, 2013).

Kelembagaan dan organisasi sering digunakan secara bergantian dan dalam konteks yang sama, menurut Uphoff, penggunaan frasa "pengelompokan sosial," "kelompok," "bentuk sosial," dan lainnya yang secara luas dianalogikan sebagai lembaga sosial dan organisasi sosial yang sama, satu sama lain. Kata "kelembagaan" menjadi semakin umum digunakan untuk menggambarkan definisi yang mencakup keduanya. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah "kelembagaan" lebih disukai. Sebagai alternatif dari frasa "komersial," istilah "kelembagaan" sering digunakan karena menunjukkan pendekatan yang lebih "sosial" dan "responsif budaya" (Syarif, 2013).

Dalam hal penguatan dan pelembagaan perguruan tinggi misalnya, salah satu contoh fenomena saat ini. Pendidikan tinggi merupakan representasi dari kepercayaan yang meluas dari publik. Pendidikan tinggi dianggap dapat menghasilkan

pemimpin masyarakat yang dapat mempengaruhi perubahan yang baik dalam komunitas individu yang ada di masyarakat. Sehingga pendidikan tinggi diharapkan secara terus-menerus mampu memaksimalkan peran dan fungsinya dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, untuk memenuhi harapan masyarakat, perguruan tinggi dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pengajarannya. Dengan demikian, maka perguruan tinggi semakin kuat perannya di dalam kehidupan masyarakat, tidak sebaliknya mengalami pelemahan, pada saat tidak mampu menjalankan perannya dengan baik (Syarif, 2013).

Tokoh Teori Pengembangan Lembaga

Abraham Maslow

Dalam bidang psikologi humanistik, Abraham H. Maslow (dikenal sebagai Maslow) merupakan tokoh yang cukup terkenal. Memahami motivasi manusia telah mendapat banyak manfaat dari pekerjaannya di dalam pemenuhan kebutuhan. Beberapa pandangannya yang paling penting didasarkan pada gagasan bahwa manusia memiliki keinginan positif untuk berkembang serta unsur-unsur yang menolak atau membatasi kemajuan (Rumini, 1993). Dalam hirarki persyaratan Maslow, tuntutan biologis yang paling dasar diikuti oleh yang paling penting, yang sebagian besar adalah keinginan estetis. Kebutuhan fisik, seperti makan, minum, tidur, dan berhubungan seks, menyita banyak waktu. Selain kesehatan dan keselamatan, pencegahan bencana tidak perlu dikhawatirkan jika kriteria ini terpenuhi (Dinata, 2020).

Carl Rogers

Ketika berbicara tentang filosofi dan praktik psikologi secara umum, serta pengaturan terapeutik, pendidikan, dan lainnya, Carl Rogers adalah sosok yang berpengaruh. Pada subjek pendidikan, Rogers menguraikan konsep pembelajaran humanistik, yang meliputi keinginan untuk belajar, pembelajaran yang

bermakna dan kemampuan untuk belajar tanpa rasa takut akan hukuman. (Rumini, 1993).

Arthur Combs

Pikiran dan perasaan seseorang tentang diri manusia sendiri dan dunia di sekitar sangat penting untuk dipahami. Jika ingin mempengaruhi tindakan orang lain, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah perspektif. Perilaku yang tidak pantas, menurut Combs, terjadi ketika seseorang menolak melakukan apa yang harus dilakukan karena ada hal lain yang lebih menarik atau menguntungkan. Guru yang menyatakan bahwa siswanya tidak tertarik belajar sebenarnya berarti siswa tersebut tidak tertarik untuk melakukan apa yang diinginkan gurunya. Pada saat itu, mungkin ide dan perasaan siswa mungkin telah berubah jika instruktur telah melakukan kegiatan lain sebagai gantinya. (Rumini, 1993).

Aldous Huxley

Pendidikan harus diarahkan untuk membantu manusia mengembangkan potensinya, dan ini berlaku bagi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan, mulai dari pengajar hingga siswa hingga pengamat hingga peneliti hingga perencana pendidikan. Menurut Huxley dan Roberts (1975), pendidikan nonverbal adalah sesuatu yang harus diajarkan kepada siswa. Sebuah alternatif untuk pengaturan kelas tradisional. Pendidikan non verbal terdiri dari kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan materi pelajaran yang dipelajari, seperti senam, sepak bola, menyanyi, atau menari. Pendidikan nonverbal harus dimulai pada usia dini dan berlanjut sampai kompetensi tingkat tinggi diperoleh. Untuk memahami tujuan hidup dengan benar, pertama-tama seseorang harus memiliki kebijakan hidup, daya cipta, dan kemampuan untuk bertahan melalui langkah-langkah bijak agar itu menjadi kenyataan. Setelah mempelajari keterampilan non verbal, seseorang lebih siap untuk menghadapi pasang

surut kehidupan karena ia mampu menyerap lebih banyak pengalaman hidup. Pada akhirnya, jika semua orang di bumi memiliki bakat ini, itu akan berdampak signifikan pada masyarakat dan moral manusia. (Syifaâ, 2008).

David Mills dan Stanley Scher

Faktor emosional seperti keinginan terhadap pengetahuan, penggunaan intuisi dan kreativitas saat berkreasi, pengalaman sulit dan kekecewaan selalu hadir dalam praktik sains. Menurut David Mills dan Stanley Scher, pendidikan terpadu digambarkan sebagai strategi pendidikan yang memasukkan perasaan atau sikap siswa dalam proses belajar. Untuk siswa dalam studi sosial, bahasa dan seni, metode emosional dapat menjadi alat yang berguna untuk belajar. Kedua ahli ini berkolaborasi untuk mengembangkan aplikasi bisnis yang lebih layak. Pendidikan sains, pendidikan bisnis, dan bahkan industri mobil semuanya mengadopsi teknik terpadu ini. (Syifaâ, 2008).

Karakteristik Teori Pengembangan Lembaga

Pengembangan lembaga perlu adanya pedoman yang penting untuk memanfaatkan peluang dan mengubahnya menjadi program atau kegiatan yang efektif. Pedoman tersebut bisa berupa:

- 1) Menetapkan tujuan program atau kegiatan dan hasil yang diinginkan.
- 2) Menetapkan keterampilan yang harus dikuasai dan dikembangkan
- 3) Secara teratur mengevaluasi kemajuan program atau kegiatan, menyisihkan waktu untuk belajar dari pengalaman berjalannya suatu program atau kegiatan. *Pertama*, kaji apa yang telah berjalan dengan baik, dan apa yang menyebabkan keberhasilan. Gali apa yang tidak berjalan dengan baik: mengapa, apakah kelemahan ini bisa dihindari atau dihilangkan, apa tanda-tanda dari kelemahan ini, dan

bagaimana memperbaikinya di masa mendatang. *Kedua*, cari apa keagalannya, mengapa kegagalan itu terjadi, apakah kegagalan ini bisa diduga, bagaimana cara memperbaikinya, dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kegagalan ini

- 4) Identifikasi pelajaran apa saja yang dapat diambil dari program atau kegiatan tersebut, apa yang bisa ditransfer ke bidang lain, bagaimana pembelajaran ini bisa dibagikan kepada orang lain. Menjadikan pengembangan sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari merupakan salah satu metode pengembangan yang terbaik. Dengan cara ini, dana atau uang yang diperlukan tidak akan banyak, pengembangan tidak memerlukan banyak uang maupun waktu karena tidak memerlukan biaya untuk kursus atau mentor. Tetapi, waktu dan komitmen dibutuhkan dalam model ini. Namun, model ini membutuhkan waktu dan komitmen. Biasanya alasan mengapa suatu lembaga tidak melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia (SDM) karena kurangnya finansial. Salah satu manfaat dari pengembangan SDM adalah tergalinya bakat bakat yang akan memperkaya baik individu maupun lembaga. SDM dapat memainkan peran strategi utama dalam mengembangkan sebuah lembaga.

Melalui potensi manusia, organisasi sosial atau lembaga yang ada di masyarakat dapat memanfaatkan tanggung jawab dan tugas sebaik mungkin. Untuk hidup bahagia dan sehat, orang harus mampu menyeimbangkan kebutuhan mereka sendiri dengan kebutuhan lingkungan dan memanfaatkan kekuatan penuh dari alam di sekitar mereka. Menurut konsep modal manusia, pendidikan dan kesehatan sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan pendidikan selalu menjadi strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Meski demikian kesehatan juga telah menjadi bagian penting baru-baru ini. Dalam praktiknya, orang yang

BAB VII TEORI PENGEMBANGAN LEMBAGA

pintar, namun sakit-sakitan, tidak dapat berfungsi secara maksimal. Potensi sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu menyerap teknologi baru dan menghasilkan produk yang bernilai tinggi, dapat dicapai dengan mengubah potensi sumber daya manusia yang ada menjadi potensi yang berkualitas. (T. N. Effendi, 1992).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian teori pengembangan lembaga!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah teori pengembangan lembaga!
3. Kemukakan satu kasus pengembangan lembaga yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

“Manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmaniah-yang paling asasi- sampai dengan kebutuhan tertinggi yakni kebutuhan estetis. Kebutuhan jasmaniah seperti makan, minum, tidur dan sex menuntut sekali untuk dipenuhi. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka muncullah kebutuhan keamanan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan terhindar dari bahaya dan bencana. Selanjutnya kebutuhan untuk bersenang-senang dan aktualisasi diri.”
(Abraham Maslow)

BAB VII TEORI PENGEMBANGAN LEMBAGA



BAB VIII

Isu Demokrasi

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep demokrasi.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik demokrasi.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep demokrasi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep demokrasi.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik demokrasi.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam demokrasi.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam demokrasi.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah demokrasi.

Pengertian Demokrasi

Demokrasi menjadi satu sistem politik yang banyak dianut oleh berbagai negara di dunia. Selama ratusan tahun, sistem demokrasi telah digunakan pada berbagai kontestasi dan lingkup politik, baik level negara, wilayah maupun daerah. Bahkan, di Indonesia sampai level desa dan rukun tetangga (RT). Demokrasi di Indonesia mengalami berbagai dinamika dan pasang surut. Mulai dari demokrasi terpimpin Soekarno, demokrasi Pancasila Soeharto, dan demokrasi langsung pasca reformasi. Pada level negara di dunia, demokrasi juga menghadapi banyak tantangan, baik dari kelompok yang tidak setuju dengan sistem demokrasi, maupun dari para demokrasi sendiri, yang pada saat terpilih, tidak mengutamakan rakyat, atau pemilih. Tapi lebih berpihak kelompok elit atau kekuatan oligarki.

Demokrasi³⁶ memiliki pengertian yang dapat dilihat dari segi bahasa. Dari bahasa, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* dan *kratos*. Dua kata digunakan untuk menggambarkan "demokrasi" dalam bahasa Yunani: "demos," yang berarti "rakyat" atau "penghuni suatu tempat"; dan "cratein," atau "cratos," yang merupakan kata Yunani untuk kekuasaan atau otoritas yang berdaulat. Menurut definisi kamus demokrasi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, atau lebih tepatnya, pemerintahan dimana rakyat memiliki peran yang paling besar. (Fachrurozi, 2016: 12).

Dalam pelaksanaan kekuasaan, demokrasi dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan kekuasaan (Isaacs & Carter, 1958: 2). Pembatasan kekuasaan bermakna, di dalam demokrasi, ada pembagian kekuasaan (*sharing of power*), antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan dibagi pada tiga cabang kekuasaan, tidak berada di tangan satu orang, sebagaimana yang terjadi dalam sistem non demokrasi. Hal ini juga sekaligus mencegah kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, sesuai kemauan satu orang yang berkuasa. Sebaliknya, kekuasaan suatu pemerintah harus bermanfaat dan untuk kepentingan terbanyak warga (Rosana, 2016:13).

Demokrasi dianggap sistem politik terbaik untuk mengakomodir kepentingan banyak orang. Bukan hanya kepentingan orang yang menduduki jabatan tertentu dan mendapat kekuasaan, tetapi juga mereka yang tidak menduduki jabatan, atau rakyat biasa. Sehingga terjaga aspirasi dan interaksi antara rakyat dengan negara (Nugroho, 2015:5). Banyak juga yang menilai demokrasi bukan sistem politik yang terbaik atau sempurna. Meski begitu, demokrasi merupakan sistem politik yang saat ini banyak digunakan di berbagai negara di dunia. Kritik terhadap sistem politik demokrasi semakin banyak dikemukakan. Salah satunya yang dikemukakan dua penulis terkenal dalam bukunya yang berjudul “Bagaimana Demokrasi Mati” (*How Democracy Die*) yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblitz.

Meski mendapat banyak sekali serangan dan kritikan, sistem demokrasi masih dianggap cukup mumpuni, sebagai sistem politik. Dalam sistem demokratis, rakyat diberi kesempatan untuk memilih di antara berbagai pemimpin politik selama periode pemilihan (Motos, 2018: 8). Sistem politik demokrasi umum terjadi di banyak negara, karena proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan masuknya beberapa partai politik (Morison, 2004: 5). Kelangsungan hidup jangka panjang hak-hak ekonomi dan sosial budaya juga dijamin oleh demokrasi, yang melindungi hak-hak semua warga negara. (Rosana, 2016: 8).

Dukungan terhadap sistem politik demokrasi, setidaknya juga muncul dari dua penulis terkenal, yaitu Daron Acemoglu dan James A. Robinson di dalam bukunya “Mengapa Negara Gagal?” (*Why Nations Failed?*). Acemoglu dan Robinson membandingkan negara-negara yang berdekatan dan memiliki kesamaan karakter dan latar belakang, namun mendapatkan hasil yang berbeda. Ada negara yang gagal di dalam membangun kesejahteraan bangsa, namun ada negara yang berhasil. Di antara negara-negara yang gagal, adalah negara-negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi pada sistem politik mereka.

Sebaliknya, negara yang berhasil membangun kesejahteraan adalah negara-negara yang dikenal demokratis. Salah satu penyebab negara demokratis berhasil adalah, adanya keterbukaan pada sistem politik, sehingga penguasa dapat dikontrol oleh rakyat.

Sejarah Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem politik sudah cukup tua. Demokrasi sudah mulai pada masa Sebelum Masehi. Jejak demokrasi bisa dilacak pada dua karya yang cukup terkenal dan fenomenal, yaitu "Republik" yang disusun dari karya-karya Plato, dan "Politik" yang disusun dari karya-karya Aristoteles. Kedua karya tokoh tersebut yang memperbincangkan banyak sekali persoalan demokrasi pada masa sebelum masehi. Kedua karya tersebut pula yang banyak dirujuk dalam perbincangan politik pada masa lalu hingga kini.

Selain itu, ada seorang negarawan terkenal, Pericles, yang berasal dari dekat Athena, memperkenalkan beberapa prinsip demokrasi di Yunani dan Athena pada kira-kira periode 450 SM hingga 350 SM. Ini termasuk: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi penuh dan langsung dari semua warga negara; (2) persamaan di depan hukum; dan (3) pluralisme, yaitu cara menghargai semua sudut pandang, bakat, dan keinginan (Sunarso, 2018:13).

Sejak jatuhnya sistem politik komunis pada tahun 1989, yang menyebabkan banyak negara mengadopsi sistem politik yang lebih demokratis. Konsep demokrasi telah berkembang secara dramatis dalam beberapa puluh tahun terakhir (Nugroho, 2015: 4). Selama periode setelah Renaisans banyak negara menganut sistem demokrasi dalam sistem politik mereka. Banyak ide-ide segar tentang bagaimana membentuk interaksi antara penguasa dan yang diperintah (rakyat). Penggambaran mengenai sistem demokrasi dan tidak demokrasi dikemukakan oleh tulisan Niccolo Machiavelli (1469-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679).

Keduanya menulis tentang kekuatan rakyat dan kontrak sosial. Faktor-faktor ini membuat proses aktualisasi demokrasi di bingkai (Nugroho, 2015:9).

Implementasi demokrasi meningkat seiring dengan ekspektasi masyarakat. Tren ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Untuk mendorong keterlibatan warga dalam kehidupan politik, perlu ditumbuhkan semangat partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi. Ke depan, warga tidak hanya sebagai objek dari sistem demokrasi, namun sebagai pelaku (Sulisworo, 2012).: 4).

Demokrasi Menurut Ahli

Sejumlah ahli dan tokoh terdahulu yang mencetuskan dan merumuskan istilah demokrasi. Beberapa tokoh yang mengemukakan dan mencetuskan istilah demokrasi adalah sebagai berikut:

1. (Dahl, 2020: 2) salah satu tokoh politik dunia mengemukakan pandangannya mengenai demokrasi yang dicetuskan dalam lima kriteria yaitu (1) persamaan hak pilih, (2) partisipasi efektif, yaitu suatu bentuk persamaan dalam memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara pada proses penentuan keputusan, (3) pembenaran kebenaran yaitu suatu persamaan peluang bagi seluruh rakyat dalam memberikan penilaian terhadap jalan proses pemerintahan, (4) kontrol terakhir agenda yaitu seluruh bentuk kekuasaan pada akhirnya dalam menentukan keputusan atau agenda apapun harus diputuskan oleh dan atas dasar hak rakyat sehingga rakyat berhak dalam menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus untuk diputuskan, (5) pencajukan, yaitu bentuk keterlibatan rakyat dalam kaitannya pada hukum di negaranya.
2. Carter & Chalk, (1998: 3) mendefinisikan demokrasi dalam membatasi kekuasaan dengan cara yang ringkas, padat dan tepat

3. Ebenstein & Strong, (1950: 2) demokrasi didefinisikan dalam bentuk penghargaan pada suatu yang terdiri dari kebebasan dari beberapa kriteria yaitu (1) empirisme rasional, (2) kepentingan individu (3) teori instrumental tentang negara (4) prinsip kesukarelaan (5) hukum di balik hukum (6) penekanan pada suatu cara (7) musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia (8) persamaan asasi semua manusia.
4. Joseph A. Schemer dalam (Sulisworo, 2012: 9) menyebutkan demokrasi merupakan suatu bentuk perencanaan institusional guna mencapai keputusan politik dimana dalam mencapai kekuasaan politik tersebut harus berdasarkan pada suara rakyat.
5. Sidney Hook dalam (Sulisworo, 2012: 9) mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan pemerintah yang penting dan berdampak besar didasarkan pada kesepakatan mayoritas dari rakyat dewasa.
6. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl dalam (Sulisworo, 2012: 9) menyebutkan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana tanggung jawab dari segala bentuk tindakan pemerintah tersebut dipilih dan dilakukan kepada rakyat dengan para wakil rakyat terpilih.
7. Henry B. Mayo dalam (Sulisworo, 2012: 10) menyebutkan demokrasi sebagai sistem politik yang menjelaskan kebijakan umum di suatu wilayah kekuasaan ada pada dasar mayoritas oleh wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Mayo menekankan peran rakyat di dalam negara demokrasi.
8. Affan Ghaffar dalam (Sulisworo, 2012: 10) menyebutkan demokrasi berada pada dua bentuk pemaknaan yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif yaitu demokrasi yang secara ideal dilakukan oleh negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang diwujudkan pada dunia politik praktis.

9. Abraham Lincoln dalam (Sunarso, 2018: 9) menyebutkan demokrasi adalah pemerintahan dari , oleh, dan untuk rakyat. Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, dianggap sebagai salah satu tokoh yang cukup terkenal rumusannya mengenai demokrasi, seka²⁰us mudah dipahami. Demokrasi disebutnya sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*from the people, by the people, for the people*).
10. Aristoteles dalam (Sunarso, 2018: 9) mengatakan demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dalam kebebasan sehingga kekuasaan yang ada bergantung dari saling berbagi kebebasan pada warga negara sehingga kebebasan sangat penting dalam sistem demokrasi. Aristoteles menekankan inti dari demokrasi adalah kebebasan. Di negara yang demokratis, kebebasan harus terwujud secara nyata.

Karakteristik Demokrasi

Ada beberapa karakteristik mengenai demokrasi. Mengaku kepada konsep demokrasi menurut Abraham Lincoln, sebagaimana disebutkan dalam (Sunarso, 2018: 9), ada tiga karakteristik demokrasi, yang mencakup:

1. Pemerintahan rakyat (*government of the people*). Pemerintahan rakyat adalah pemerintahan yang dibentuk atas aspirasi rakyat dan ditentukan oleh rakyat. Orang yang berkuasa mendapat mandat secara langsung dari rakyat, kemudian menjalankan pemerintahan berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat. Pemerintahan seperti ini mendapat kepercayaan dan legitimasi dari rakyat (*legitimate government*). Pemerintahan yang mendapat legitimasi dari rakyat, merupakan pemerintahan yang diakui dan mendapat dukungan dari rakyat.
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*). Merupakan kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, atau orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Bukan kelompok atau pihak yang datang berkuasa, tanpa

ada mandat dari rakyat. Mandat dari rakyat diperoleh melalui pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis, adil dan terbuka. Pada saat orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat tersebut menjalankan pemerintahan, rakyat juga melakukan kontrol dan pengawasan terhadap mereka secara langsung.

3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the People*).
35 Pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintahan yang dijalankan atas mandat rakyat, yang dijalankan oleh wakil rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat yang menjadi orientasi dan tujuan utama dari pemerintahan ini, bukan kepentingan pribadi atau keluarga dan kelompok yang berkuasa. Hal tersebut tercermin dari pemerintahan yang senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat. Bukan pemerintahan yang anti kritik, atau pemerintahan yang membungkam suara rakyat yang kritis. Sehingga tercermin betul, bahwa rakyat diperhatikan dan diperjuangkan oleh orang-orang yang telah dipilih oleh rakyat.

Ada beberapa prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh (Astawa, 2017: 8). Astawa membagi prinsip demokrasi pada dua bagian besar, yaitu:

1. Sistem demokrasi sebagai prinsip politik. Hal ini bisa dijelaskan pada beberapa hal berikut:
 - a. Pemisahan kekuasaan;
 - b. Pemerintahan yang konstitusional;
 - c. Partai politik bertambah dari satu dan memiliki fungsi kerja masing-masing;
 - d. Pers bebas;
 - e. Perlindungan atas hak asasi manusia;
 - f. Pengawasan tentang administrasi negara;
 - g. Peradilan yang tidak memihak dan bebas;
 - h. Pemerintahan diskusi;
 - i. Pemilihan umum bebas;
 - j. Pemerintahan yang berdasarkan hukum.

2. Prinsip non-demokrasi (kediktatoran). Hal ini bisa dijelaskan pada beberapa hal berikut:
 - a. Pemusatan terhadap kekuasaan. Artinya, sistem pemerintahan yang memusatkan pemerintahan pada satu orang, tidak membagi kekuasaan pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka pemerintahan tersebut non demokratis.
 - b. Pemerintahan tidak berdasarkan atas konstitusional. Pemerintahan yang tidak demokratis adalah pemerintahan yang tidak dijalankan berdasarkan pada aturan dan undang-undang yang konstitusional, namun dijalankan atas dasar kekuasaan semata;
 - c. Rule of power. Pemerintah didasarkan pada kekuasaan, tidak pada aspirasi dan kepentingan juga suara rakyat. Sehingga kekuasaan yang dijalankan tidak berdasarkan supremasi rakyat, namun supremasi kekuatan lembaga-lembaga negara;
 - d. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah akan tetapi melalui dekrit, tidak ada proses komunikasi dan konsultasi dengan rakyat, pada setiap kebijakan yang dibuat;
 - e. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum tetap digelar secara periodik, namun hanya bersifat formalitas, tidak dilakukan pada pilihan rakyat, secara terbuka dan demokratis;
 - f. Kepemimpinan dan manajemen yang rahasia dan tidak bertanggung jawab;
 - g. Tidak adanya kebebasan berbicara, dan kebebasan pers;
 - h. Penyelesaian perbedaan dan perpecahan menggunakan cara kekerasan dan penggunaan paksaan;
 - i. Tidak adanya perlindungan akan hak asasi manusia apalagi sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia;
 - j. Tidak mengakui dan menekan hak-hak minoritas warga negara.

Ciri-ciri demokrasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintahan didasarkan pada warga negara.
2. Berhubungan dengan ciri konstitusional kepentingan, kehendak, dan kekuasaan rakyat.
3. Dalam mengatur negara memiliki ciri yaitu kedaulatan terdapat wakil yang dipilih oleh rakyat.
4. Sebuah kegiatan memiliki ciri perwakilan yaitu dilaksanakannya kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
5. Karakter dari pemilu adalah kegiatan politik untuk memilih wakil rakyat berdasarkan pada kebebasan memilih.
6. Stigma partai politik yakni dalam melaksanakan sistem demokrasi partai menjadi media.
7. Sifat dari kekuasaan terdapat pembatasan dan pembagian kekuasaan.
8. Sifat dari tanggung jawab adalah bentuk tanggung jawab dari wakil terpilih pada pemilihan umum.

Tantangan Pembangunan di Era Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara melalui sistem pemerintahan (Fachrurozi, 2016: 7). Demokrasi memiliki sistem kompleksitas yang meningkat pada setiap masa karena sistem politik ini mengacu pada rakyat. Oleh karenanya semakin kompleks kehidupan rakyat maka semakin rumit dan menantang proses demokrasi di suatu negara.

Sejak era reformasi 1998 sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem yang bertahan di Indonesia. Sistem pemerintahan demokrasi menjamin hak yang seimbang terutama dalam hal pembuatan keputusan yang mengubah hidup rakyat jika dibandingkan dengan tahun-tahun pemerintahan sebelum era reformasi. Demokrasi mengizinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam hukum baik itu pada proses perumusan, pengembangan, maupun pembuatan hukum (Isaacs & Carter, 1958: 15).

Untuk itu, sistem politik demokrasi erat kaitannya dengan kehidupan rakyat, maka sistem ini mencakup tidak hanya pada kondisi politik, namun juga mencakup pada kondisi yang memungkinkan seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Perlunya kebebasan politik yang seimbang dan bebas (Motos, 2018: 4). Tuntutan demokrasi tidak hanya pada aras politik, namun juga aras sosial, ekonomi dan budaya, yang menjunjung kebebasan individu dan perorangan. Pada saat yang sama juga mengakui kesetaraan setiap orang untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan pada bidang sosial.

Selain itu, tantangan pembangunan di era demokrasi adalah menyamakan visi atau pandangan hidup. Hal ini dikarenakan demokrasi bukan sistem politik semata, namun merupakan proses yang berjalan secara dinamis dalam menghormati dan menjaga kebebasan individu di suatu negara. Tantangan pembangunan di era demokrasi menurut Nurcholis Madjid dalam (Astawa, 2017: 13) adalah:

1. Memiliki kesadaran terhadap pluralisme. Maksudnya adalah masyarakat harus menyadari bahwa dalam negara demokrasi kondisi masyarakat majemuk adalah sesuatu yang harus dipahami secara baik dan benar. Tidak semua orang memiliki pandangan dan latar belakang yang sama. Sehingga sangat penting memiliki kesadaran akan pluralisme terutama yang memiliki ragam budaya di dalamnya seperti di Indonesia.
2. Musyawarah. Dalam menerapkan sistem demokrasi dibutuhkan internalisasi dan semangat musyawarah yang kemudian menjadi tantangan dalam menyatukan rakyat Indonesia. Tantangan ini mengharuskan rakyat untuk mendewasakan diri supaya memiliki kebesaran jiwa dan kelapangan dada menerima pandangan orang lain yang belum tentu atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan sendiri.
3. Pemenuhan sektor ekonomi, tantangan lainnya tentu datang dari sektor ekonomi. Penerapan sistem demokrasi

mendatangkan masalah dalam memenuhi perspektif ekonomi rakyat yang tidak lepas dari adanya perbedaan kepentingan antara rakyat kebanyakan dengan segelintir pengusaha besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah yang berkuasa, bagaimana menyelaraskan dua kepentingan yang sering terlihat berbeda. Hal ini terlihat dari kepentingan pengusaha, pemilik perusahaan dengan buruh. Pengusaha selalu ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Pada sisi lain buruh/ pekerja juga ingin mendapat upah atau gaji yang bisa membuat kondisi buruh lebih sejahtera. Kondisi tersebut tentu saja mengurangi pemasukan pengusaha.

4. Antar warga yang bekerja sama harus ada itikad baik dan saling mempercayai. Demokrasi yang mengedepankan kebebasan tetap harus memiliki wakil rakyat di dalam pemerintahan. Hal ini dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan rakyat akan keputusan wakil rakyat yang merupakan kepentingan individu dan golongan. Tantangan pembangunan ini muncul jika wakil rakyat tidak bisa meyakinkan rakyat bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip demokrasi. Terlebih lagi pada saat wakil rakyat, tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada rakyat, atau pemilih.
5. Musyawarah yang jujur dan sehat. Situasi demokratis juga menuntut untuk menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat. Hal ini sulit dilakukan jika terdapat ketidakpercayaan dan kecacatan dalam sistem permufakatan di pemerintahan. Apalagi bila para wakil rakyat atau wakil pemerintah yang sering tidak konsisten antara pembicaraan dengan kebijakan yang dibuat, atau omongan yang sering berubah-ubah.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian demokrasi!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah demokrasi!
3. Kemukakan satu kasus demokrasi yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

“Demokrasi sebagai suatu cara ringkas, padat dan tepat
dalam membatasi kekuasaan.”

(Carter & Chalk, 1998: 3)

BAB VIII ISU DEMOKRASI



BAB IX

Isu Kemiskinan

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep kemiskinan.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik kemiskinan.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu mengerti konsep kemiskinan.
2. Mahasiswa mampu mengartikan konsep kemiskinan.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik kemiskinan.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam kemiskinan.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam kemiskinan.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah kemiskinan.

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu yang paling banyak dibahas di berbagai negara di dunia. Indonesia termasuk negara yang banyak memperbincangkan persoalan kemiskinan. Data kependudukan miskin di Indonesia cukup tinggi, rata-rata di kisaran angka 10% dari total jumlah penduduk. Kemiskinan menjadi akar utama yang menyebabkan masalah pembangunan di berbagai aspek di suatu negara. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan kondisi perekonomian setiap individu tetapi kemiskinan menjadi isu yang multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan ekonomi tetapi pada aspek aktivitas lainnya seperti politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya dan saling berkaitan erat satu sama lainnya (Kadji, 2013: 2)

Konsep kemiskinan dapat dijelaskan dalam dua hal, seperti kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut diartikan sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok minimum yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selain tiga kebutuhan pokok tersebut, kebutuhan pokok minimum yang harus dipenuhi adalah kebutuhan akses kesehatan dan pendidikan yang layak juga menjadi tolak ukur kemiskinan. Oleh karenanya, seseorang untuk keperluan pokok minimum identik sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang.

Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dapat terjadi atau menimpa individu yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari luar, seperti pengaruh dari kebijakan pembangunan oleh sistem pemerintahan suatu negara. Misalnya belum menjangkau hingga ke daerah pelosok yang dihuni oleh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Ketimpangan pembangunan tersebut dapat menyebabkan pendapatan masyarakat di daerah satu lebih besar di daerah lain yang kemudian menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di suatu daerah (Prawoto, 2009: 7)

Kemiskinan merupakan suatu kondisi hidup di bawah garis nilai standar yang terjadi pada individu, dalam memenuhi keperluan minimum terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan. Dalam definisi kemiskinan juga dikenal sebagai "*poverty line*" atau batas garis kemiskinan atau "*poverty threshold*" atau ambang batas kemiskinan. Batas kemiskinan didefinisikan sebagai setiap individu memerlukan sejumlah uang yang digunakan untuk membayar dan memenuhi keperluan manusia yang sebanding dengan 2100 kkal/orang dalam sehari, serta keperluan lainnya seperti sandang atau pakaian, papan atau rumah, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan harian lainnya (Jamil & Che-Mat, 2014).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi namun juga aspek-aspek lainnya. Definisi kemiskinan dalam konteks ekonomi adalah suatu keadaan yang dihadapi individu dan ditandai serba kekurangan baik itu kekurangan makan, kesulitan mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan kesehatan yang layak, kurangnya sarana transportasi, kekurangan sandang dan papan (Chambers, 1981: 5). Sedangkan pada aspek politik, kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan akses terhadap kekuasaan. Dalam hal ini kemiskinan politik berarti seseorang tidak memiliki hak yang sama besarnya di depan hukum yang dapat disebabkan oleh banyak hal sehingga tidak memiliki kekuasaan hukum.

Dari segi sosial psikologis, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi kekurangan struktur sosial dan jaringan dalam memperoleh berbagai kesempatan yang tersedia untuk dapat menunjang setiap individu di masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas dirinya. Dalam definisi lain menurut (Prawoto, 2009) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang serba terbatas yang dapat disebabkan diluar dari kehendak individu tersebut. Kemiskinan dapat ditandai oleh; tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas kerja yang rendah,

pendapatan yang rendah, kesehatan dan gizi yang buruk, ketidakberdayaan di lingkup sosial dan kemasyarakatan, tempat tinggal yang tidak layak huni.

Sejarah Kemiskinan

Kemiskinan sebagai isu masyarakat telah berakar sejak lama terutama di negara yang mengalami sistem pemerintahan yang rendah dalam menyikapi masalah rakyatnya. Sejarah kemiskinan paling banyak terjadi di berbagai negara setelah Perang Dunia II. Setelah perang banyak negara mengalami keterbelakangan ekonomi yang berimbas pada kondisi ekonomi masyarakatnya. Setelah Perang Dunia II masyarakat mengalami ketergantungan pada pekerjaan dengan kapabilitas dan pendapatan yang rendah serta mengalami kesulitan dalam memenuhi akses pendidikan dan kesehatan yang layak.

Sejarah kemiskinan individu dapat disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, secara mikro. Kemiskinan dapat terjadi akibat oleh satu individu dengan individunya pada ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya dalam lingkungan yang sama sehingga memunculkan sistem distribusi pendapatan masyarakat yang timpang atau tidak merata. Penduduk dengan kemiskinan yang tinggi disebabkan oleh sumberdaya yang dimiliki tersedia terbatas dalam jumlah serta dengan nilai yang kecil.

Kedua, kemiskinan dapat terjadi akibat dalam perbedaan kualitas dari sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui kemiskinan terjadi karena dan kepada individu atau manusia. Perkembangan zaman yang semakin canggih dengan kehidupan yang semakin kompleks membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas taraf hidup di kondisi saat ini. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia menjadi tolak ukur terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah diartikan sebagai individu yang memiliki produktivitas yang rendah yang kemudian berdampak pada pendapatan yang diperoleh rendah.

Selain itu, kualitas sumberdaya manusia yang rendah juga menandakan rendahnya pendidikan karena pendidikan yang tinggi memungkinkan individu untuk meningkatkan kualitas dirinya baik dari segi kecerdasan maupun cara pandang hidup yang lebih baik seiring perkembangan tingkat pendidikan yang diemban. Lebih lanjut, kapasitas sumber daya manusia yang rendah dapat menyebabkan seseorang mudah untuk mengalami diskriminasi di masyarakat.

Ketiga, kemiskinan dapat muncul akibat adanya perbedaan akses. Dimaksud dengan akses disini mencakup hal yang luas, tidak hanya akses terhadap sumber daya dan ekonomi, namun juga akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial. Termasuk juga akses terhadap politik dan hukum. Individu yang terbatas akses terhadap hal-hal tersebut, cenderung berada dalam kehidupan yang miskin. Sebaliknya, individu yang memiliki akses yang lebih mudah, lebih mudah pula untuk keluar dari kondisi miskin.

Dalam pandangan lain, sejarah kemiskinan dapat dilihat dari konsep lingkaran kemiskinan yang kejam (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh (Nurkse, 1971: 8). Konsep ini mengatakan bahwa keterbelakangan hidup seseorang, ketidaksempurnaan pasar, serta kurangnya modal yang dimiliki seseorang dapat menyebabkan individu mengalami produktivitas yang rendah yang kemudian berdampak pada kondisi pendapatan yang menjadikannya tergolong dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan, keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan ketertinggalan membuat individu sulit untuk memenuhi kekurangan baik dalam memperoleh pendapatan, dalam menabung, dan dalam menjalani kebutuhan keuangan yang lebih daripada itu seperti melakukan investasi.

Seseorang dengan tingkat ekonomi yang baik ditandai dengan tabungan yang mencukupi atau bahkan lebih dari total pendapatan dalam periode tertentu serta dapat memenuhi kebutuhan investasi baik investasi nyata (uang, saham, obligasi,

reksa dana, dan sebagainya) maupun investasi tidak nyata (bangunan, barang, tanah, dan sebagainya). Dalam penjelasan lainnya, sejarah kemiskinan dapat disebabkan oleh individu yang terjebak dalam skema perangkap kemiskinan. Adapun skema perangkap kemiskinan menurut (Chambers, 1981: 6) terdiri dari:

1. Ketidakberdayaan (*powerlessness*). Ketidakberdayaan dimaknai sebagai kondisi individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Pada saat yang sama individu tersebut mengalami ketergantungan kepada pihak lain. Pada saat pihak lain tidak mampu membantu, maka yang bersangkutan berada dalam kondisi tidak berdaya.
2. Kerentanan (*vulnerability*). Kerentanan terjadi pada individu atau kelompok yang secara fisik memang berada pada kondisi yang rentang. Misalnya rentan karena kondisi fisiknya, mengalami sakit-sakitan. Dengan kondisi demikian, maka yang bersangkutan akan terperangkap di dalam kondisi yang miskin, harta benda yang dimiliki akan habis digunakan untuk berobat. Pada saat yang sama dirinya tidak lagi mampu bekerja. Sehingga harta yang ada akan menjadi habis, dan akhirnya jatuh miskin.
3. Kelemahan fisik (*physical weakness*). Kondisi fisik, termasuk kondisi jiwa yang lemah membuat individu tidak mampu bekerja dan berkarya. Sehingga orang yang bermasalah secara fisik maupun mental, bisa berada dalam kondisi miskin.
4. Kemiskinan dari nasib (*poverty*). Kemiskinan nasib merupakan kemiskinan yang terbentuk dari sikap fatalisme yang pasrah dan menerima kondisi yang ada. Menerima kemiskinan sebagai takdir yang harus diterima.
5. Keterisolasian (*isolation*). Isolasi merupakan kondisi dimana suatu individu atau komunitas yang terpisah dari masyarakat lain, dan masyarakat tersebut tidak bisa keluar dari situasi tersebut untuk mengaksesnya. Di Indonesia, keterisolasian disebut juga dengan terluar, terdepan, dan terjauh. Hal

tersebut untuk menggambarkan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman yang jauh dari pusat kota dan pemerintahan.

Menurut (Chambers, 1981: 4) kemiskinan merupakan kluster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang dialami individu yang kemudian menjebakanya dalam kondisi kemiskinan yang sama. Contohnya, masyarakat di pedesaan yang lahir dengan segala keterbatasan akses pemenuhan kehidupan yang lebih layak dapat terjebak dalam kondisi tersebut karena nasibnya yang terlahir dalam kondisi seperti itu. Kondisi kurang menguntungkan lainnya selain faktor nasib dan lingkungan juga meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan dan masalah hidup, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.

Pemikiran Tokoh Mengenai Kemiskinan

Michael Lipton

Lipton melihat kemiskinan dari penyebabnya. Menurut Lipton kemiskinan disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang tumpang-tindih, antara satu daerah dengan daerah lain. Tumpang-tindihnya kebijakan menyebabkan kemiskinan yang ada di wilayah pedesaan menjadi tinggi. Hal tersebut disebut oleh Lipton sebagai "*urban bias*" (Lipton, 1978: 6).

Amartya Sen

Sen menyebut kemiskinan sebagai kondisi keterbatasan yang tidak hanya terbatas pada ukuran pendapatan saja, namun juga berkaitan pada hilangnya kapabilitas atau deprivasi kapabilitas. Kapabilitas didefinisikan sebagai kebebasan seseorang dalam menjalankan hidupnya sebagai manusia. Sehingga orang akan menjadi miskin pada saat tidak mendapatkan kebebasan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan (Sen, 1999: 3). Hal tersebut sekaligus menjadi salah satu indikator negara demokratis lebih menjanjikan kesejahteraan daripada negara otoriter, karena ada kebebasan pada negara demokratis.

Ragnar Nurkse

Nurkse menyebut bahwa kemiskinan disebabkan oleh adanya lingkaran kemiskinan yang kejam (*the vicious circle of poverty*). Lingkaran kemiskinan yang kejam ini merupakan kondisi dimana seseorang terus mengalami kemiskinan hingga anak keturunannya yang disebabkan oleh banyak hal. Diantara penyebab kemiskinan yang jahat tersebut adalah tabungan yang rendah atau bahkan tidak ada, investasi yang rendah, kurangnya modal, produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah dan seterusnya sehingga terus-menerus mengalami kemiskinan finansial (Nurkse, 1971: 8).

Robert Chambers

32

Chambers merumuskan kemiskinan diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi miskin yang disebabkan oleh faktor di luar individu atau personal, termasuk di dalamnya persoalan lingkungan yang menyebabkan manusia menjadi miskin. Seperti adanya bencana alam yang menyebabkan krisis ekonomi. Begitu pula dengan kebijakan dari pemerintah dapat menjadi faktor eksternal yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Salah satu bentuknya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak memihak kepada kelompok yang memang membutuhkan keberpihakan. Sedangkan Faktor internal, adalah ketidakmampuan individu secara personal di dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, termasuk ketidakmampuan di dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Hal ini terjadi karena tidak adanya pendapatan atau modal, tidak adanya keterampilan (*skill*) dan sebagainya.

Mudrajad Kuncoro

Kuncoro mendefinisikan kemiskinan yang dialami penduduk negara akibat ketergantungan diri pada sektor pekerjaan yang masih menggunakan metode produksi tradisional dan adanya

sikap apatis terhadap lingkungan. Maka solusi dari kemiskinan seperti hal tersebut adalah modernisasi. Modernisasi bisa menjadi satu pilihan untuk keluar dari kemiskinan. Dengan modernisasi produksi hasil pertanian misalnya akan menjadi lebih besar. Hal tersebut tentu saja akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Meski untuk hal tersebut dibutuhkan modal dan biaya yang cukup besar.

Sunyoto Usman

Usman menilai kemiskinan berakar dari adanya ketergantungan kelompok masyarakat dan proses marginalisasi oleh pemangku kebijakan. Dalam teori marginalisasi dijelaskan bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh tabiat seseorang yang rendah diri, boros, konsumtif, tergantung pada orang lain, apatis, dan fatalisme. Hal yang sama juga bisa terjadi dari tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan yang memarginalkan kelompok masyarakat tertentu, sehingga mereka tidak mampu mengakses sumber daya dan pelayanan secara baik.

Karakteristik Kemiskinan

Ada beberapa kriteria dalam menggambarkan kemiskinan. Menurut Zulfikar Husin dalam (Kadji, 2013: 7) kemiskinan dapat dilihat dengan menggunakan RKFM (*Rasio Kebutuhan Fisik Minimum*). RKFM ini diasumsikan sebagai kebutuhan fisik minimum yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi sekarang, seperti dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum 4 sehat 5 sempurna misal dibutuhkan biaya Rp.2.500,00 maka RKFM yang dibutuhkan setiap bulan adalah $Rp.2.500 \times 30 \text{ hari} = Rp.75.000,00$ dan per tahun serta $Rp.2.500,00 \times 365 \text{ hari} = Rp.912.500,00$ per tahun.

Berdasarkan perhitungan RKFM dapat ditentukan apakah individu tergolong dalam miskin atau tidak. Jika nilai RKFM yang didapat pada setiap individu sama dengan 1, maka individu tersebut dapat dikategorikan miskin. Hal ini disebabkan oleh

tahap perolehannya setara dengan tahap subsisten (*subsistence level*) berarti hanya cukup untuk mempertahankan hidup yang diperoleh setiap individu. Adapun rumus RKFM dapat dilihat pada keterangan seperti berikut:

- a. Miskin sekali, apabila R-KFM 0,75
- b. Miskin apabila, R-KFM 0,76-1,00
- c. Nyaris miskin, apabila R-KFM 1,01-1,50
- d. Nyaris kaya apabila, R-KFM 1,51-2,00

Menurut (Gweshengwe & Hassan, 2020: 6) ada lima karakteristik kemiskinan yaitu:

1. Tidak mempunyai faktor produksi sendiri. Orang miskin karena tidak bisa melakukan produksi sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup tergantung kepada pihak lain. Ketergantungan kepada pihak lain, menyebabkan barang yang dibutuhkan harus dibeli. Seringkali barang yang dibeli dari pihak lain harganya mahal, sehingga mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkannya.
2. Tidak mempunyai aset produksi sendiri. Aset merupakan salah satu modal yang bisa menjadi kekayaan. Selain itu aset juga bisa menjadi jaminan pada saat seseorang hendak melakukan kegiatan usaha.
3. Umumnya tingkat pendidikan rendah. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Orang yang memiliki pendidikan berpeluang untuk dapat bekerja dan berusaha secara mandiri. Dengan bekerja maka seseorang memiliki pendapatan. Memiliki pendapatan berarti jalan untuk tidak miskin lagi. Bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan, sulit untuk mendapatkan pekerja dengan pendapatan yang tinggi.
4. Tidak mempunyai fasilitas. Fasilitas dibutuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ketiadaan fasilitas yang dimiliki menyulitkan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Fasilitas ibarat kail yang digunakan untuk memancing ikan.

BAB IX ISU KEMISKINAN

5. Tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Keterampilan salah satu modal untuk mendapatkan pekerjaan. Ketiadaan keterampilan membuat seseorang tidak dapat bekerja.

Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam (Kadji, 2013: 2) terdapat enam kriteria penduduk miskin yaitu:

1. Rumah tidak layak huni
2. Tidak mempunyai akses sanitasi dan air bersih
3. Penghasilan lebih rendah daripada pengeluaran
4. Tidak memiliki harta
5. Kualitas gizi makanan buruk
6. Hanya dapat membeli 1 stel pakaian baru dalam setahun

Menurut Moeljarto (1995) dalam (Kadji, 2013: 3) kemiskinan memiliki enam karakteristik yaitu:

1. Kemiskinan berkaitan erat dengan kerentanan
2. Kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan akses dan peluang kerja
3. Tidak percaya diri dalam mengaktualisasi diri sehingga memuat diri sendiri tidak berdaya
4. Konsumtif
5. Ketergantungan pada orang lain
6. Kemiskinan yang diwariskan secara terus-menerus

Tantangan Pembangunan Menjawab Kemiskinan

Menurut (Solikatur et al., 2018: 3) kemiskinan merupakan faktor yang menghambat proses pembangunan dalam suatu negara. Kemiskinan banyak terjadi akibat negara yang salah urus (Prawoto, 2009: 1) yang pada akhirnya kebijakan dalam menyebarkan sumber daya tidak merata sehingga pendapatan rakyat di daerah satu dengan daerah lain tidak seimbang.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sebagai landasan dalam membentuk kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kehidupan

masyarakat orang banyak. Hal ini berarti dalam sistem pemerintahan negara, proses mengontrol sumber daya yang terkandung dan dimiliki negara harus berdasar pada pemahaman mengenai pentingnya kapasitas masyarakat untuk ditingkatkan melalui sumber daya tersebut sehingga mampu menghasilkan kekuatan internal dalam suatu negara (Kadji, 2013: 4) Dengan langkah kesadaran ini yang dipegang oleh para wakil rakyat dalam menjawab tantangan kemiskinan yang berdampak pada ekonomi negara.

David Korten dalam (Subiyanto, 2013: 8) menjelaskan lebih lengkap mengenai tiga hal untuk merubah pembangunan menjadi berpusat pada rakyat guna memberantas kemiskinan antara lain:

1. Mengarahkan tindakan dan pemikiran kebijakan pemerintah pada alasan yang dapat memotivasi usaha rakyat agar mampu mencukupi kebutuhan rakyat. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendorong masyarakat supaya bisa mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak semata-mata tergantung kepada pemerintah dalam jangka panjang. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan karena pemerintah memiliki dana yang terbatas, dan hal tersebut membuat masyarakat tidak meningkat kapasitasnya.
2. Meningkatkan proses organisasi dan struktur yang berfungsi dan atau berdampak positif pada keadaan pegawai. Proses peningkatan kapasitas para struktur organisasi yang ada di masyarakat juga penting dilakukan. Sehingga ada proses saling belajar di antara anggota kelompok atau organisasi yang ada di masyarakat. Begitu pula, mereka dapat membangun jaringan yang dapat membuat kehidupan ekonomi mereka semakin meningkat.
3. Meningkatkan sistem produksi-konsumsi yang berlandaskan pada pengendalian lokal dan kaidah kepemilikan. Produk lokal memiliki potensi dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk global. Keberadaannya perlu dipertahankan

sehingga memiliki ciri dan kekhasan. Dengan adanya kekhasan, maka produk lokal yang dimiliki oleh warga setempat memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Selain itu, bentuk pembangunan untuk menjawab masalah kemiskinan juga berarti penekanan pada proses pemberdayaan rakyat. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus dapat membuat model pembangunan yang mengedepankan pada perubahan rakyat yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara (Kadji, 2013: 2). Pemberdayaan disini juga termasuk pada pemberian peluang yang besar kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam reformulasi pembangunan baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga dengan dilibatkannya rakyat dalam pembangunan dan pembuatan keputusan rakyat dapat merasa diberdayakan dan memiliki kemauan untuk mengubah dirinya serta bangsa dan negara ke arah yang lebih baik (Subiyanto, 2013: 5).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian kemiskinan!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah kemiskinan!
3. Kemukakan satu kasus kemiskinan yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

“Kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi namun juga aspek-aspek lainnya. definisi kemiskinan dalam konteks ekonomi adalah suatu kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan yang dihadapi individu baik itu kekurangan makan, kekurangan pendidikan, kesehatan yang buruk, kekurangan sarana transportasi, kekurangan sandang dan papan. Sedangkan pada aspek politik, kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan akses terhadap kekuasaan. Dalam hal ini kemiskinan politik berarti seseorang tidak memiliki hak yang sama besarnya didepan hukum yang dapat disebabkan oleh banyak hal sehingga tidak memiliki kekuasaan hukum.”

(Chambers, 1981: 5)

BAB IX ISU KEMISKINAN



BAB X

Isu Lingkungan Hidup

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu mempengaruhi konsep lingkungan hidup.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik pembangunan lingkungan hidup.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep lingkungan hidup.
2. Mahasiswa mampu menguraikan konsep lingkungan hidup.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik pembangunan lingkungan hidup.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah lingkungan hidup.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam masalah lingkungan hidup.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah lingkungan hidup.

Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup (*environment*) menjadi salah satu isu yang cukup mengemukakan dalam dua dekade terakhir, berkaitan dengan pembangunan. Dunia global cukup serius memperbincangkan persoalan lingkungan hidup. Para tokoh dunia, pemimpin perusahaan multinasional, kepala negara, aktivis *civil society* banyak berbicara terkait masalah lingkungan hidup. Mereka semua sepakat, pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga negara, tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan hidup. Sehingga, pembangunan apapun yang dilakukan, harus selalu memperhatikan dampak lingkungan. Sehingga keberadaan lingkungan tetap lestari, tidak rusak, dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Lingkungan menjadi bagian yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup terutama manusia. Dalam menjalani kehidupan terutama di era modern saat ini, kompleksitas aktivitas manusia semakin beragam yang kemudian membuat hidup manusia dari dua dunia. Dunia adalah dunia yang terdiri dari alam sekitar dan dihuni atau ditinggali oleh manusia. Sedangkan dunia lainnya yaitu dunia sosial hasil karya dengan segala penemuan hasil manusia seperti budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain dihuni oleh manusia, alam juga didiami oleh tumbuhan, pepohonan, yang membutuhkan kelestarian untuk dapat terus tumbuh dan berkembang, serta memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Kelestarian pepohonan dan tumbuhan, akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia, yang dapat menyerap racun berbahaya yang dilepaskan oleh polusi dari kendaraan, industri, dan lainnya. Begitu pula, pepohonan juga menjaga dari bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Istilah lingkungan digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk pada lingkungan sekitar, dan istilah *environner* digunakan dalam bahasa Prancis untuk merujuk pada lingkungan sekitar. Istilah lingkungan didefinisikan sebagai berikut:

BAB X ISU LINGKUNGAN HIDUP

1. Keadaan di sekitar makhluk hidup termasuk pada organisme yang ada di dalamnya
2. keadaan yang kompleks pada sosial budaya dan menguasai kehidupan seseorang.

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang 23 Tahun 1997, pengelolaan lingkungan hidup adalah keterpaduan keanekaragaman keadaan, daya, makhluk hidup dan benda serta tingkah lakunya termasuk manusia yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Akibatnya, istilah "lingkungan" mengacu pada kondisi dan tindakan lingkungan sekitar, termasuk manusia. Orang tua kita, pengajar, teman, tetangga, dan orang-orang di sekitar kita, serta keadaan lingkungan seperti keteduhan, panas, dan kesejukan di sekitar pepohonan, hingga hal-hal yang tidak terlihat oleh pandangan manusia, semuanya berdampak pada sikap dan perilaku kita sehari-hari. Ada berbagai mata yang memengaruhi perasaan kita tentang tempat kita di dunia, seperti tenang, keras, dingin, kuat, dan lemah.

Manusia sebagai makhluk hidup mempengaruhi kondisi lingkungan dari aktivitas sehari-hari seperti proses mendayagunakan sumber daya pada lingkungan. Selain itu, dalam kehidupan manusia juga membentuk nilai dan norma yang dipraktikkan pada lingkungan. Kondisi sekitar yang memungkinkan kehidupan ini disebut dengan lingkungan hidup. Dalam definisi lain oleh (Waluya, 2006: 3) Pengertian lingkungan secara luas mencakup biologi, lingkungan fisik dan kimia .

Menurut (Daszak et al., 2001: 4) lingkungan hidup merupakan irisan dari interaksi tiga hal yaitu alam sekitar, kehidupan sosial, dan budaya. Tiga hal tersebut mengandung berbagai komponen disiplin ilmu lainnya yang kemudian berkontribusi pada ilmu lingkungan hidup. Seperti pada aspek alam terdapat komponen ilmu biologi, kimia, dan fisika, aspek budaya terdapat komponen ilmu agama, seni, sastra, sedangkan aspek sosial mengandung komponen ilmu seperti hukum dan sosiologi. Semua rumpun

ilmu tersebut bersatu untuk membentuk interaksi lingkungan hidup yang lebih baik.

Sejarah Isu Lingkungan Hidup

Secara yuridis, pertama kali dirumuskan sejarah isu lingkungan hidup pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang juga disingkat sebagai UULH-1982. Kemudian dalam Undang-Undang No 23 tahun 1997 dirumuskan kembali Undang-Undang mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup. Pada dasarnya, UU No. 32 Tahun 2009 menjelaskan mengenai aturan menjaga kelangsungan dan kesejahteraan makhluk hidup serta kelangsungan alam itu sendiri sehingga tidak hanya fokus pada kondisi makhluk hidup namun juga fokus pada kondisi alam.

Isu lingkungan hidup diangkat sebagai respon akan perilaku manusia dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam sekitar sehingga dianggap perlu adanya proses menghargai, memberi, dan menerima dalam segala bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan hidup antara makhluk hidup dan alam (Waluya, 2006: 9). Lingkungan hidup memberikan banyak manfaat untuk manusia untuk itu pembahasan isu mengenai menjaga kelangsungan hidup perlu diangkat dan diberdayakan melalui undang-undang dan peraturan lain yang mengatur perilaku manusia dengan alam.

Ilmu lingkungan yang digerakkan oleh misi adalah kenyataan. Ini adalah tujuan dari proyek untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan cerdas, serta segar dan komprehensif tentang lingkungan alam kita. Pemahaman itu menimbulkan rasa kewajiban seseorang, dan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap isu-isu lingkungan yang dihadirkan alam. Akibatnya, kesadaran lingkungan, apresiasi, dan kesela-

rasan dapat dibudidayakan melalui pengetahuan tentang lingkungan. (Daszak et al., 2001: 4)

Komponen-komponen lingkungan hidup memungkinkan keberlangsungan dan kesejahteraan manusia untuk hidup. Beberapa manfaat dari lingkungan hidup bagi manusia menurut (Setyobudi & Marsudi, 2018: 6) antara lain sebagai berikut:

1. Udara sebagai komponen lingkungan hidup untuk keperluan pernapasan.
2. Air sebagai komponen lingkungan hidup untuk keperluan dasar manusia seperti mandi, pembangkit tenaga listrik, minum, dan pengairan.
3. Tumbuhan dan hewan untuk kebutuhan makan dan minum.
4. Lahan untuk keperluan mendirikan sarana pribadi dan sosial.

Sejarah munculnya isu lingkungan hidup di dunia hadir sebagai bentuk kesadaran manusia dahulu untuk membawa misi menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan lingkungan melalui interaksi manusia sehari-hari. Tokoh terkenal dunia yaitu Plato pada abad 4 SM telah mengamati dampak dari perlakuan dan interaksi serta sikap manusia yang salah yang mempengaruhi lingkungan hidup dan kemudian memberikan pemikirannya mengenai pentingnya membahas isu lingkungan hidup untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

Selanjutnya penulis dunia Rachel Carson tahun 1962 menulis buku pada era modern yang berjudul *Silent Spring* yang menjelaskan mengenai kondisi kerusakan lingkungan seperti banyak hewan mati di dunia yang menimbulkan kepunahan, penggunaan pestisida pada tumbuhan yang berdampak negatif pada alam dan manusia, dan sebagainya. pemahaman ini kemudian memunculkan suatu hari besar yaitu Hari Bumi yang ditetapkan pertama kali tahun 1970.

Pada tahun 1972 diselenggarakan konvensi internasional yang membahas mengenai lingkungan hidup untuk pertama kali di Stockholm, Swedia. Pengangkatan isu lingkungan hidup di konvensi internasional ini memberikan dampak luas dalam

memunculkan kesadaran masalah lingkungan hidup bagi kehidupan makhluk hidup sehingga dianggap sebagai permasalahan global yang harus terus diperhatikan tidak peduli pada perkembangan dan perubahan zaman. Sejak itu, penguatan isu lingkungan hidup terus menggelinding dan menjadi persoalan mengglobal. Seiring makin banyaknya persoalan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, menyebabkan semakin banyak orang yang sadar terhadap keharusan melestarikan lingkungan hidup.

Pemikiran Tokoh Mengenai Lingkungan Hidup

1. Munadjat Danusaputro menyebut tingkah laku manusia, serta lingkungan fisik tempat manusia bertempat tinggal dan berinteraksi satu sama lain, termasuk dalam definisi lingkungan.
2. Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan hidup sebagai tempat yang dihuni makhluk hidup dan makhluk tak hidup secara bersama-sama.
3. RM. Gatot P. mendefinisikan lingkungan sebagai segala kondisi, keadaan, atau pengaruh di suatu ruang yang ditempati manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia yang terbatas pada faktor-faktor yang dapat dijangkau atau dipengaruhi oleh kehidupan manusia.
4. Purdom & Anderson (1983) lingkungan hidup perlu dibenahi melalui pemahaman konsep homeostatis yaitu konsep analisis dalam mengontrol interaksi yang kompleks antara makhluk hidup dengan alam.
5. Menurut L.L. Bernard lingkungan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu:
 - a. Fisiografi, seperti laut, radiasi, tanah, udara, dan gelombang, merupakan lingkungan fisik (anorganik).
 - b. Dalam lingkungan biologis (organik), organisme termasuk tumbuhan, parasit, dan hewan, serta proses biologis

yang menyertainya (reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya), merupakan lingkungan biotik.

- c. Lingkungan sosial terdiri dari budaya material, seperti senjata dan bangunan dari masa lalu; lingkungan bio-sosial melibatkan hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya; dan lingkungan psikososial terikat dengan pikiran manusia seperti kepercayaan atau keinginan tentang dunia.
- d. Dalam lingkungan gabungan, lembaga konstitusional seperti LSM, pemerintah, dan sebagainya merupakan mayoritas penduduk.

Karakteristik Lingkungan Hidup

Adapun karakteristik lingkungan hidup menurut (Daszak et al., 2001: 3) terdiri dari interaksi tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Alam meliputi kondisi fisika, biologi, dan kimia yang terkandung di dalam alam.
2. Budaya meliputi ilmu-ilmu seperti seni, keyakinan atau agama, sastra.
3. Sosial meliputi ilmu sosiologi, hukum, dan politik.

Dalam penjelasan lain oleh (Solikatur et al., 2018: 7) lingkungan hidup terdiri dari tiga hal yaitu:

1. Lingkungan alam alami yaitu lingkungan yang telah ada sejak alam ada di muka bumi tanpa adanya intervensi ataupun modifikasi dari tingkah laku manusia. Lingkungan alam alami terdiri dari dua komponen yaitu komponen biotik yang merupakan segala makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan), dan komponen abiotik atau komponen tidak hidup atau bukan organisme hidup yang ada disekitar manusia seperti tanah, udara, angin, cahaya matahari, dan sebagainya.
2. Lingkungan binaan merupakan lingkungan yang terdapat korelasi antar komponen namun memiliki kemampuan yang terbatas. Lingkungan ini adalah lingkungan yang dimodifi-

kasi atau diciptakan oleh manusia sebagai upaya pengelolaan alam dan lingkungan dengan misi memperpanjang usia lingkungan hidup. Beberapa bentuk lingkungan hidup antara lain reboisasi hutan, sekitar lingkungan kompleks perumahan dilakukan penanaman pohon, dan sebagainya.

3. Lingkungan sosial budaya yaitu interaksi lingkungan manusia antar manusia lainnya. Walaupun lingkungan sosial budaya mencakup interaksi manusia dan manusia lain namun lingkungan sosial budaya juga tidak terlepas dari pengaruh dan mempengaruhi kondisi lingkungan alam. Banyak kejadian bentuk interaksi manusia yang kemudian merugikan alam seperti peperangan yang mengakibatkan kerusakan alam, penjarahan yang merusak hutan dan alam lainnya, dan sebagainya.

Problematika Pembangunan dan Isu Lingkungan Hidup

Masalah pembangunan dan kaitannya dengan isu lingkungan hidup akan semakin kompleks seiring perkembangan zaman terutama di era saat ini dimana kehidupan manusia sangat bergantung dengan teknologi. Bertepatan pada perkembangan zaman, manusia mengarah lebih dominan dalam mengontrol lingkungan dibandingkan dengan makhluk hidup lain (Waluya, 2006: 10). Sebagai konsekuensi, perilaku manusia yang salah dan tidak menghargai kondisi lingkungan dapat memunculkan kerusakan pada lingkungan. Pembangunan yang diadakan dan dijalankan oleh manusia juga tidak lepas dari pengaruhnya pada kondisi lingkungan hidup.

Problematika ini terus hadir di setiap negara dalam upaya membentuk pembangunan bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan adalah meningkatnya pencemaran. Banyak pembangunan yang dilakukan manusia yang kemudian menyebabkan kerusakan dan pencemaran baik pencemaran udara, pencemaran air, tanah, dan sebagainya.

Untuk itu, guna menanggulangi masalah pembangunan dan isu lingkungan hidup dibutuhkan penerapan konsep “Pembangunan Berkelanjutan” (Aswandi, 2020: 9). Pada tahun 1992 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) telah disepakati konsep ini pertama kali di Rio de Janeiro, Brazil mengenai *earth summit*. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah upaya pemenuhan kebutuhan masa kini dengan membangun kebutuhan manusia tanpa mengurangi kemampuan pemenuhan pada generasi mendatang yang disediakan oleh alam (Burhany, 2013: 12). Oleh karena itu, konsep ini disebut sebagai pembangunan berkelanjutan karena diharapkan tidak mengurangi kesadaran lingkungan hidup dalam setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia.

Problematika pembangunan yang mengarah pada isu lingkungan hidup juga didasari oleh penggunaan sumber daya yang tidak merata dan perkembangan penduduk (Nuraini et al., 2020: 8). Seperti kita ketahui, manusia sebagai makhluk hidup yang dominan membutuhkan alam dan lingkungan untuk mengambil sumber daya yang terkandung didalamnya yang kemudian diolah untuk aktivitas pembangunan. Dalam hal ini manusia menggunakan sumber daya yang tidak menyeluruh dan hanya menggunakan sumber daya alam tertentu saja dan menggerusnya terus-menerus tentunya akan membawa dampak negatif bagi lingkungan.

Selain itu, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tentunya akan berdampak pada peningkatan kebutuhan yang besar dan semakin beragam. Hal ini amat dipengaruhi oleh gaya hidup manusia dalam mengkonsumsi sesuatu. Problematika yang kerap terjadi akibat peningkatan jumlah manusia tersebut yang sering terjadi adalah penggunaan sumber daya alam yang tidak adil. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh (Wackernagel et al., 1997: 2) mengatakan bahwa 20% penduduk bumi yang dapat menikmati 80% kekayaan bumi dan merupakan golongan dari penduduk kaya. Contohnya, gaya hidup orang

Inggris yang gemar mengkonsumsi pisang hingga 10 Kg pisang per kapita tiap tahunnya. Namun, kenyataannya negara Inggris tidak cocok sebagai tempat untuk menanam kebun pisang sehingga dibutuhkan alokasi di daerah tropis dengan lahan kurang 48.300 Ha di luar Inggris hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pisang untuk orang Inggris. Sebenarnya lahan seluas itu di daerah tropis dapat menjadi hutan tropis yang lebat dan bermanfaat untuk banyak orang (Guan et al., 2016: 12)

Untuk itu, pembangunan harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan dimana proses pengerukan atau pengambilan sumber daya alam harus dapat dibarengi dengan upaya mengganti, memperbaiki, dan memperbaharui kembali alam sehingga tidak terbuang sia-sia dan menyisakan kekurangan dan kelangkaan sumber daya di generasi selanjutnya.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian lingkungan hidup!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah isu lingkungan hidup!
3. Kemukakan satu kasus lingkungan hidup yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

BAB X ISU LINGKUNGAN HIDUP

“Lingkungan hidup perlu dibenahi melalui pemahaman konsep homeostatis yaitu konsep analisis dalam mengontrol interaksi yang kompleks antara makhluk hidup dengan alam.”

(Purdom & Anderson, 1983)



BAB XI

Isu Globalisasi

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu mengerti konsep globalisasi.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik globalisasi.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep globalisasi.
2. Mahasiswa mampu mengartikan konsep globalisasi.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik globalisasi.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam globalisasi.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam masalah globalisasi.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah globalisasi.

Pengertian Globalisasi

Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan globalisasi. Ada yang menganggap bahwa globalisasi merupakan proses mengintegrasikan dunia yang terdiri dari berbagai negara menjadi satu pasar ekonomi, yang tersambung satu dengan yang lain. Begitu pula, saat mendengar ungkapan "globalisasi", yang dipikirkan adalah bola dunia atau planet buatan. Begitulah sederhananya, istilah "*globe*" yang kemudian berubah menjadi "global" mengacu pada totalitas, yang terkait atau universal. Istilah "globalisasi" mengarah pada proses menyatukan orang, bangsa, dan negara dari seluruh dunia. (Nuriyati & Chnuranifudin, 2020: 2).

Globalisasi juga mengandung pengertian yang mengacu kepada pertumbuhan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat yang bisa dijangkau dengan mudah. Hal ini terjadi karena teknologi informasi yang mempercepat terjadinya komunikasi lintas negara (Veltmeyer & Petras, 2008: 1). Istilah lainnya menjelaskan, bahwa globalisasi dimaknai sebagai bentuk kedekatan elektronik. Untuk berkomunikasi antar individu sudah tidak ada lagi hambatan di seluruh belahan penjurus dunia (Cai, 2020: 2). Globalisasi juga berarti keterbukaan antarnegara terhadap akses informasi yang dapat disalurkan melalui teknologi.

Globalisasi tidak hanya berkaitan dengan pasar dan komunikasi, namun juga berkaitan dengan budaya. Globalisasi merupakan proses penyebaran kebiasaan yang universal, terjadi pada siapa saja lintas negara. Globalisasi menjadi proses perpindahan dan pertemuan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia. Sehingga secara garis besar globalisasi dapat didefinisikan sebagai bentuk kebiasaan-kebiasaan yang menyebar secara universal dan mengacu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan dapat menyambungkan tempat yang jauh menjadi dekat dan sebagai dampaknya yang berpengaruh membuat perubahan budaya baik disengaja maupun tidak pada cara pandang dan perilaku manusia (Suneki, 2012: 2).

Sejarah Globalisasi

Sejarah globalisasi dilihat dari gerakannya yang masif memang dimulai pada abad ke-20. Hal ini bila dimulai dari cara pandang bahwa globalisasi adalah proses menyatukan pasar pada satu ruang untuk melakukan transaksi secara langsung. Namun sebetulnya proses globalisasi telah terjadi jauh sebelum itu, yaitu tahun 1500 Masehi. Saat itu manusia sudah mulai mengenal perdagangan antar dan lintas wilayah. Pada saat itu, kaum muslim di Asia dan Afrika banyak yang berdagang dan kemudian membuat jaringan perdagangan ke negara-negara lain seperti Vietnam, Tiongkok, Jepang, Jerman dan termasuk Indonesia. Praktik globalisasi dunia secara besar-besaran terjadi pada beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Spanyol, Belanda, Portugis yang kemudian disertai dengan revolusi industri dan kolonialisme. Menurut Veltmeyer & Petras, sejarah globalisasi yang berisi tiga fase. *Fase pertama*, dimulai pada awal abad ke-15. Pada fase ini globalisasi ditandai dengan adanya kegiatan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara Eropa terhadap beberapa negara lain. *Fase kedua*, yang terjadi pada saat terjadinya perdagangan antar-imperial. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan dan kerja sama diantara kekuatan negara di dunia untuk memperebutkan sumber-sumber kekayaan alam yang ada di berbagai belahan dunia. Tidak dalam bentuk perang, tapi dalam bentuk kekuatan diplomasi dan lobi terhadap penguasa di berbagai negara. Perusahaan multinasional (*multinational company*) di suatu negara terlibat dalam persaingan (*competition*) untuk mendapatkan monopoli pasar, dan mereka berkolaborasi (*kerjasama*) untuk menyalahgunakan pasar. *Fase ketiga*, globalisasi ditandai dengan peningkatan perdagangan lintas batas. Selama era globalisasi, perdagangan internasional telah menjadi ciri utama kelas atau rangkaian komoditas global. Dalam hal mengeksploitasi dan menyerap tenaga kerja dunia ketiga, perusahaan multinasional/ perusahaan transnasional (MNCs/ TNCs) memiliki peran kunci dalam fase ketiga ini

(Veltmeyer & Petras, 2008: 7). Setiap fase globalisasi menunjukkan adanya kompetisi diantara kekuatan global, yang dapat menjangkau wilayah-wilayah di luar tempat kekuasaan tersebut bermarkas.

Pemikiran Tokoh Mengenai Globalisasi

Ada beberapa tokoh yang memberikan sumbangsih pemikirannya mengenai isu globalisasi. diantaranya sebagai berikut:

1. (Veltmeyer & Petras, 2008: 7) mengemukakan pandangannya mengenai globalisasi. Veltmeyer & Petras membagi globalisasi dalam tiga fase, yaitu fase pertama berawal pada abad ke-15, yang ditandai dengan adanya kegiatan imperialisisme, sebagai pilar utama kaum kapitalis Eropa untuk mengumpulkan modal dalam meningkatkan perekonomian. Selanjutnya fase kedua globalisasi terjadi pada zaman persaingan perdagangan antara kekuatan yang ada (*interimperial trade*). Fase ini ditandai dengan adanya kompetisi dan kolaborasi antara kekuatan ekonomi untuk menguasai pasar dunia, terutama dengan pendirian perusahaan multinasional. Sedangkan fase ketiga adalah tahap terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh kekuatan global terhadap berbagai sumber daya alam dan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan dagang dari dunia yang telah maju terhadap negara dunia ketiga.
2. Friedman mengemukakan globalisasi mengalami tiga fase. Globalisasi fase pertama terjadi pada tahun 1492-1800, globalisasi fase kedua terjadi pada tahun 1800-2000, dan globalisasi fase ketiga tahun 2000 sampai sekarang. Friedman sepertinya memandang globalisasi secara periodisasi, sejak abad ke-15 sampai dengan abad ke-21.
3. Ada pula yang berpikiran bahwa globalisasi erat kaitannya dengan proses penguasaan sumber-sumber daya ekonomi di berbagai belahan dunia. Hal ini dikemukakan oleh Nau. Fase pertama globalisasi disebut sebagai zaman penjajahan

dan merkantilisme, yang terjadi pada tahun 1492-1800. Fase kedua globalisasi dianggap sebagai penggerak proliferasi institusi baru yang terjadi di bawah Pax Britannica dan dimulai pada tahun 1800-1914. Kemudian, fase ketiga globalisasi yang dikaitkan dengan Pax Americana dan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dan dimulai pada tahun 1945 hingga saat ini.

Karakteristik Globalisasi

Globalisasi memiliki karakteristik yang digambarkan oleh (Suneki, 2012: 15-16), sebagai berikut:

1. Terjadi perubahan konsep ruang dan waktu. Karakteristik pertama dari globalisasi adalah semakin kabur atau tidak ada batas antara wilayah suatu negara. Hal ini dipicu karena perkembangan teknologi komunikasi informasi dan transportasi yang mempermudah penduduk untuk memperoleh informasi dari satu wilayah ke wilayah lain serta kemudahan akses transportasi bagi manusia di era globalisasi.
2. Ketergantungan pasar dan produksi ekonomi antar negara. Karakteristik globalisasi selanjutnya adalah penduduk antar negara telah memiliki sikap ketergantungan pasar dan produksi ekonomi dimana sistem produksi tidak bisa mengandalkan satu negara saja namun juga bergantung pada kondisi pasar ekonomi global. Hal ini ditandai dengan munculnya perdagangan internal dan perusahaan multi-nasional.
3. Karakteristik globalisasi selanjutnya adalah pergesekan budaya dan interaksi kultural. Negara satu dengan negara lain memiliki kebiasaan, adat, dan budaya yang berbeda-beda. Namun, karakteristik globalisasi yang mempermudah akses informasi dan komunikasi membuat orang di negara satu dan negara lain dapat mengalami interaksi kultural. Hal ini ditandai dengan perkembangan media massa contohnya adalah perkembangan industri perfilman, fashion, makanan

yang tercampur antar budaya yang berbeda, bangunan, dan sebagainya.

4. Karakteristik globalisasi juga berkaitan dengan adanya kolaborasi dan kerjasama serta ketergantungan antar negara yang kemudian memunculkan peningkatan masalah bersama antar negara. Seperti yang saat ini tengah terjadi yaitu wabah Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia disebabkan oleh pertama kali di Wuhan China. Penyebaran ini disebabkan kemudahan akses transportasi yang membuat virus Covid-19 dapat menyebar secara luas ke berbagai negara.

Problematika Pembangunan dan Globalisasi

Problematika pembangunan yang terjadi di era globalisasi tentunya sangat beragam. Hal ini dapat dipicu oleh karakter globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas negara akibat perdagangan yang terjadi lintas negara. Negara mengalami kesulitan dan mengidentifikasi pelaku ekonomi. Hal tersebut tentu saja juga berakibat pada tidak mudahnya negara menarik pajak dari pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan lintas negara seperti itu (Effendi dan Malihah, 2008: 4).

Seringkali, negara kalah cepat di dalam membuat regulasi dan peraturan terhadap perubahan yang terjadi secara cepat. Selain itu, perkembangan zaman juga menuntut kebutuhan yang lebih beragam dan kompleks dimiliki oleh manusia modern. Untuk itu, dalam menciptakan pembangunan di era globalisasi masalah atau tantangan utama yang harus dihadapi adalah menyesuaikan nilai-nilai dan konsep pembangunan dengan karakteristik manusia modern (Koesbardiati, 2006: 12).

Pembangunan pada era globalisasi perlu pemahaman yang baik terhadap karakteristik manusia modern. Sebab, salah satu tantangan dari pembangunan pada era globalisasi adalah, karakteristik manusia berubah sedemikian rupa. Maka tantangan terbesar pembangunan pada era globalisasi berkaitan dengan

perubahan sosial manusia modern. Menurut Soemardjan dalam (Effendi dan Malihah, 2008: 4) perubahan sosial sebagai suatu kondisi yang terjadi, dengan adanya pergantian pada lembaga di dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku kelompok masyarakat serta sistem sosial, termasuk nilai-nilai, pola dan sikap.

Menurut (Martono, 2013: 4) perubahan sosial sebagai bentuk pergantian yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat yang berhubungan dengan korelasi sosial di dalamnya. Globalisasi yang menjadi perubah kehidupan sosial tidak hanya pada satu negara, namun di seluruh dunia menjadi tantangan tersendiri yang harus mampu dijawab secara cepat dan tepat oleh pemangku kebijakan di suatu negara atau di suatu daerah. Jika tidak, maka globalisasi akan menjadi ancaman bagi pembangunan di suatu negara, atau daerah. Namun bila mampu dikelola dengan baik akan menjadi potensi ekonomi yang luar biasa.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian globalisasi!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah globalisasi!
3. Kemukakan satu kasus globalisasi yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

“Globalisasi berawal pada abad 15 ditandai dengan imperialisme sebagai pilar utama yang mengumpulkan modal kaum kapitalis Eropa dalam meningkatkan perekonomian.

Selanjutnya globalisasi terjadi pada zaman *Interimperial Trade*.

Pada fase ini manusia telah melibatkan kompetisi dan kolaborasi pada berbagai pendirian perusahaan multinasional dalam menguasai pangsa pasar.

Berikutnya, perusahaan dagang telah mengeksploitasi dan menghisap sumber daya tenaga kerja dari dunia ketiga.”

(Veltmeyer & Petras, 2008: 7)

BAB XI ISU GLOBALISASI



BAB XII

Isu Pembangunan Berkelanjutan

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik pembangunan berkelanjutan.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep pembangunan berkelanjutan.
2. Mahasiswa mampu memahami konsep pembangunan berkelanjutan.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik pembangunan berkelanjutan.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah pembangunan berkelanjutan.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam masalah pembangunan berkelanjutan.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah pembangunan berkelanjutan.

Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu isu yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia global adalah isu yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, tidak hanya dilakukan hari ini dan tahun ini, bahkan tidak hanya untuk manusia dan generasi saat ini. Pembangunan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan masa dan generasi yang akan datang. Inilah dasar dari keberlanjutan pembangunan. Hal ini secara langsung juga berkaitan dengan perlunya menyimpan sumber daya alam yang ada untuk digunakan sebagai modal pembangunan pada masa yang akan datang.

Hal ini seiring dengan semangat pembangunan di era modernisasi saat ini, selain mengunggulkan keberhasilan dan efektivitas juga berupaya untuk menciptakan konsep berkelanjutan atau dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Konsep pembangunan berkelanjutan menurut (Carter & Rogers, 2008: 2) merupakan proses pembangunan kebutuhan manusia dengan menggali keterkaitan antara tiga hal yaitu pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, serta keadilan sosial. Sebagaimana disampaikan oleh (Carter & Rogers, 2008: 3) pada *World Commission on Environment and Development: "The human ability of humanity to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs"*.

Berdasarkan definisi pembangunan berkelanjutan di atas disebutkan bahwa proses pembangunan berkelanjutan merupakan kemampuan manusia untuk melengkapi kebutuhan saat ini tanpa mengambil kemampuan generasi selanjutnya dalam melengkapi kebutuhannya di masa depan. Maksud dari definisi pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang diciptakan oleh manusia saat ini yang menggunakan sumber daya alam yang ada harus tetap memperhatikan ketersediaan

sumber daya alam serta kelangsungan yang sama untuk generasi yang akan datang sehingga tidak terjadi kelangkaan, pencemaran, ataupun kerusakan sumber daya alam akibat proses pembangunan yang dilakukan di masa sekarang (Carter & Rogers, 2008: 5). Konsep ini jelas sekali menunjukkan bahwa pembangunan harus memperhatikan tidak hanya kekinian dan kedisekian, namun juga kedisekian dan kenantian.

Secara spesifik, di Indonesia³⁴ pembangunan berkelanjutan ini juga sudah diatur. Paling tidak, hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini jelas menyebut konsep dan penjelasan mengenai pembangunan berkelanjutan yang erat kaitannya dengan posisi lingkungan hidup dalam pembangunan, terutama pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam (Fitriah, 2018: 2). Pembangunan berkelanjutan, merupakan upaya yang disengaja dan terencana untuk menjaga kelestarian lingkungan alam, dan pada saat yang sama juga meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Serta terwujudnya keselamatan, kapasitas, dan kualitas hidup mereka dengan mengintegrasikan masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam strategi pembangunan. (Mattioda et al., 2013: 2).

Pengertian keberlanjutan (*sustainability*) juga dijelaskan secara spesifik oleh para ahli. Salah satunya yang dikemukakan oleh Miller. Menurut Miller, keberlanjutan merupakan suatu bentuk kekuatan sistem bumi yang bermacam-macam. Kekuatan tersebut termasuk juga pada sistem budaya manusia dan ekonomi dalam rangka bertahan hidup dan penyesuaian terhadap perubahan keadaan lingkungan. Sehingga dalam proses pembangunan berkelanjutan hal ini merujuk pada pemenuhan kebutuhan dasar yang mengandalkan sumber daya yang tersedia seperti kebutuhan udara bersih, tempat tinggal, air bersih, makanan dan sumber daya dasar lainnya, dalam penggunaannya tidak merusak atau bahkan mengurangi dan

membuat kelangkaan bagi penyediaan sumber daya tersebut untuk generasi selanjutnya (Miller, 2006: 2). Keberlanjutan di dalam pembangunan jelas sekali, menyelaraskan antara kepentingan ekonomi, dengan kepentingan lain, termasuk kepentingan budaya masyarakat, serta kepentingan generasi mendatang. Sehingga mereka juga dapat menikmati sumber daya alam yang sekarang tersedia.

Sejarah Isu Pembangunan Berkelanjutan

Sejarah dicetuskannya isu pembangunan berkelanjutan pertama kali terjadi pada konferensi yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1972 di Stockholm, yaitu pada saat terjadi konferensi mengenai lingkungan manusia atau *Conference on the Human Environment* (Lawalata, 2013: 5). Pada saat itu dibahas juga mengenai lingkungan hidup dan pemahaman mengenai konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pada konferensi tersebut negara-negara yang mengirimkan delegasinya termasuk juga Indonesia memberikan gagasannya mengenai bagaimana proses pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat seimbang dengan pemenuhan kondisi lingkungan yang stabil dan aman.

Selanjutnya, pada tahun 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengadakan acara yaitu *World Conference on Environment and Development* (WCED). Acara tersebut menerbitkan suatu informasi yang berjudul "*our common future*" atau *Brundtland Report*. Dalam laporan tersebut dimuat suatu konsep mengenai pembangunan berkelanjutan (Sarabhai, 2015: 4). Definisi dari laporan pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai suatu metode pembangunan yang berguna untuk melengkapi keperluan pada masa sekarang tanpa harus mempertaruhkan kemampuan generasi yang akan datang untuk melengkapi kebutuhan dengan sumber daya yang sama.

Pada hakikatnya prinsip dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah proses pemenuhan kebutuhan dengan

tetap mer³¹kirakan kondisi di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan pada masa kini tidak boleh mengorbankan pembangunan pada masa yang akan datang. Acara *World Conference on Environment and Development* (WCED) merupakan titik awal bagi banyak pakar dan ahli dalam merumuskan atau mendefinisikan teori pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 1992 kembali diadakan event dengan tema yang sama yaitu pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan nama event yaitu konferensi Bumi atau "*United Nations Earth Summit*" di Rio Janeiro, Brazil. Pada tahun 2000 ada pula kegiatan "*Millenium Development Goals (MDGs)*" untuk membahas hal yang sama. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 2002, diselenggarakan kembali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia yang membahas mengenai isu pembangunan berkelanjutan (Republic of South Africa, 2008: 9-10).

Dari berbagai kegiatan dan pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus dengan keberlangsungan ekologi atau lingkungan saja namun juga fokus pada keberlanjutan³⁷ ekonomi dan sosial. Hal ini sebagaimana disampaikan pada *International Union for Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN)*, yang membahas pembangunan berkelanjutan tidak hanya dari sisi lingkungan hidup, namun juga keberlanjutan pada bidang ekonomi serta sosial, termasuk budaya (Lawalata, 2013: 6-7). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pembangunan berkelanjutan semakin luas dan menyeluruh.

Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan pada skala global semakin berkembang, dengan banyaknya respon yang muncul dari negara-negara di dunia. Beberapa negara juga membahas secara khusus di dalam negara masing-masing mengenai isu pembangunan berkelanjutan. Salah satu negara yang serius di dalam memperbincangkan isu pembangunan berkelanjutan adalah Indonesia. Indonesia juga mengadopsi dan

melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Salah satu bentuk keterlibatan Indonesia dalam mengusung konsep pembangunan berkelanjutan adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Aswandi, 2020).

Tidak berhenti hanya sebatas membuat peraturan perundang-undangan, Indonesia kemudian menerapkan pembangunan berkelanjutan pada sektor kelautan dan perikanan dengan konsep *blue economy*. Kebijakan *blue economy* atau ekonomi biru diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan untuk mengelola potensi laut dengan benar tanpa mengganggu ekosistem laut di Indonesia. Konsep *blue economy* sebagai perwujudan dari pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan mengedepankan tiga hal; efisiensi penggunaan sumber daya alam, nir limbah dan pro lingkungan.

Pemikiran Tokoh Mengenai Pembangunan Berkelanjutan

Ada beberapa tokoh yang turut mengusung dan memberikan sumbangsih pemikirannya pada konsep pembangunan berkelanjutan.

1. Miller menyebut pembangunan berkelanjutan erat kaitannya antara aspek ekonomi dengan aspek budaya. Keterkaitan antara aspek ekonomi dengan budaya, pada tujuan pembangunan yang perlu adanya penyesuaian, sehingga mampu mempertahankan kemampuan alam yang dapat terus bertahan, sehingga tidak hanya dapat dikelola pada masa kini, namun juga secara berkesinambungan dapat dikelola pada masa yang akan datang (Miller, 2006: 4).
2. Menurut Carter & Rogers, pembangunan berkelanjutan adalah konsep mengenai pembangunan yang berkaitan antara pembangunan di bidang ekonomi, pada saat yang sama juga memperhatikan kualitas lingkungan hidup,

termasuk di dalamnya menjaga kelestarian. Selain itu diperhatikan juga keadilan sosial, termasuk menjaga supaya pembangunan di bidang ekonomi memiliki relevansi atau hubungan dengan keadilan pada kehidupan sosial secara lebih luas (Carter & Rogers, 2008: 3).

3. Porta & Renne hampir sama dengan Carter & Rogers. Porta & Renne menyebut bahwa pembangunan tidak hanya membicarakan persoalan ekonomi semata. Namun pembangunan harus didasarkan pada tiga tujuan sekaligus, yaitu pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial (Porta & Renne, 2005: 5).
4. (Munasinghe, 1995: 2) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai sasaran ekonomi yang fokus pada efisiensi, pertumbuhan, produksi, pengguna, dan pendapatan maksimal.
5. Pauly Nasir (2012) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memenuhi beberapa prinsip yaitu terintegrasi, berbasis pada kondisi bersih, sistem produksi, lingkungan, inovatif dan investasi kreatif.

Karakteristik Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) memiliki beberapa ciri khas (karakteristik). Karakteristik pembangunan berkelanjutan dikemukakan oleh para ahli di bidang pembangunan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai karakteristik pembangunan berkelanjutan. Salah satunya yang dikemukakan oleh Ruggiero. Menurut Ruggiero, secara umum, ada dua karakteristik pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan berkelanjutan dalam arti lunak (*weak definition*) dan berkelanjutan dalam arti kuat (*strong definition*) (Ruggiero, 2021: 4).

Bila dijelaskan secara lebih detail, maka pembangunan berkelanjutan dalam *strong definition* yaitu proses pembangunan yang menghendaki supaya semua modal memiliki nilai yang

sama baik itu, antara modal manusia (*human capital*) ditambah nilai ekonomi dengan modal alami (*natural capital*) serta ditambah modal buatan manusia (*human made capital*). Semua modal tersebut, tetap atau tidak mengalami penyusutan. Adapun pembangunan berkelanjutan dengan *weak definition* yaitu pembangunan yang mengharuskan adanya substitusi di antara ketiga jenis modal pembangunan tersebut, baik itu modal alami jika dikurangkan dapat diimbangi dengan penambahan nilai modal manusia dan modal buatan. Kekurangan pada satu modal dapat ditutupi dengan kelebihan pada modal lain.

Miller melihat karakteristik pembangunan berkelanjutan pada unsur-unsur keberlanjutan pembangunan. Adapun unsur-unsur keberlanjutan pembangunan menurut Miller ada empat. Hal tersebut dikemukakan oleh Miller dan dikutip oleh (Aryanas et al., 2017: 6). *Pertama*, dinamis. Dinamis dalam pembangunan bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan harus dapat memberi jawaban terhadap persoalan lingkungan hidup yang mengalami dinamika dan perubahan, seiring dengan adanya perkembangan kehidupan. Pembangunan berkelanjutan mampu membaca dinamika dan perubahan yang terjadi, termasuk pada perubahan lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Kedua, seimbang. Dalam pembangunan perlu adanya keseimbangan antara berbagai unsur dan faktor pembangunan. Pembangunan tidak bisa semata-mata hanya memperhatikan salah satu sektor saja, misalnya hanya ekonomi semata, tanpa memperhatikan faktor sosial dan lingkungan. Begitu seterusnya, proses pembangunan perlu memperhatikan asas keseimbangan. Pertumbuhan ekonomi tidak dibenarkan sampai menimbulkan bencana alam.

Ketiga, serasi. Serasi di sini bisa bermakna keharmonisan, bahkan lebih jauh lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan. Keserasian di dalam pembangunan melahirkan keharmonisan. Keharmonisan melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan bagian dari

terciptanya keadilan, yang ditegakkan untuk siapa saja. Dalam hukum, keadilan bermakna kesamaan di muka hukum (*equality before the law*).

Keempat, terpadu. Terpadu bermakna kompromi, yaitu mengkompromikan seluruh bagian di dalam sistem yang ada. Terpadu bermakna adanya keterlibatan seluruh unsur dan elemen di dalam pembangunan. Artinya pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja, seperti misalnya oleh pemerintah saja, namun juga melibatkan unsur lain, seperti swasta dan kelompok masyarakat. Keterpaduan di antara pada pihak tersebut, akan mempercepat proses pembangunan berkelanjutan.

Munasinghe melihat ciri khas (karakteristik) pembangunan berkelanjutan pada sasaran dari pembangunan. Menurut (Munasinghe, 1995: 7) ada tiga sasaran pokok pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, sasaran ekonomi. Sasaran ekonomi yang paling umum adalah terciptanya efisiensi, pertumbuhan ekonomi (*growth*), produksi, adanya pengguna (*consumers*), dan pendapatan maksimal. *Kedua*, sasaran sosial. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya bicara soal ekonomi semata, namun juga membahas persoalan sosial. Sasaran sosial yang menjadi ciri khas pembangunan berkelanjutan adalah, adanya pemberdayaan (*empowerment*), terciptanya keadilan (*equity*), terciptanya stabilitas sosial dan budaya. *Ketiga*, sasaran ekologi. Pembangunan berkelanjutan juga memperhatikan masalah lingkungan (ekologi). Masalah lingkungan adalah ketahanan (*resilience*), stabilitas, dan *biodiversity*.

Peluang dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat beberapa peluang dengan tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Peluang dari pembangunan berkelanjutan adalah era globalisasi yang memungkinkan banyaknya manusia modern dengan kesamaan tujuan dan keinginan yaitu menginginkan adanya program berkelanjutan pada lingkungan

dalam mengelola sumber daya alam (Simanjuntak, 2020: 3). Manusia modern yang hidup di era globalisasi menginginkan program *green ecology* yaitu program pembangunan yang ramah lingkungan karena banyaknya manusia modern yang menginginkan program pembangunan yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini namun juga diharapkan dalam melindungi kondisi sumber daya alam untuk manusia di masa mendatang (Blaustein et al., 2016: 11).

Untuk itu, keinginan dan tujuan yang sama dalam mencapai kondisi lingkungan yang berkelanjutan ini menjadi peluang bagi perwujudan konsep pembangunan berkelanjutan. Adapun peluang dari dibentuknya pembangunan berkelanjutan ini juga didukung oleh kondisi industri saat ini yang juga telah menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan. Peluang kota menuju pembangunan yang berkelanjutan juga didukung oleh peraturan pemerintah yang mendukung kebijakan pengelolaan lingkungan hidup melalui UU No.32 Tahun 2009 (Suyono & Tamin, 2012: 7).

Selain itu, berdasarkan penelitian oleh (Boulanger & Bréchet, 2005: 8) menyebutkan bahwa perubahan menuju pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilakukan jika secara sungguh-sungguh menyertakan budaya lokal hal ini dikarenakan pembangunan berkelanjutan melibatkan pada prinsip tiga aspek yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Principles* yang terdiri dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan (Mattioda et al., 2013: 3). Dengan adanya kesamaan visi oleh budaya lokal yang menginginkan pembangunan ramah lingkungan dan ramah pada penggunaan sumber daya alam maka akan menjadi peluang besar bagi Indonesia dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Namun, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap lingkungan tentunya menjadi tantangan dalam penerapan konsep ini. Indonesia yang dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah merupakan peluang besar untuk aspek lingkungan

dalam menyediakan sumber daya alam bagi program pembangunan berkelanjutan. Sejumlah faktor dipertimbangkan dalam menentukan pembangunan berkelanjutan, seperti integritas sistem sosio-ekologis, ketersediaan peluang dan modal intragenerasi, pelestarian kesetaraan antar generasi dan efisiensi pengelolaan dan tata kelola sumber daya. (Poveda & Lipsett, 2011: 5)

Oleh karenanya, hal ini menjadi tantangan bagi pembangunan berkelanjutan jika rakyat Indonesia sendiri tidak memiliki kecukupan dalam memenuhi kriteria tersebut. Contoh, bagi program pembangunan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan sumber daya alam dari lingkungan namun juga membutuhkan aspek sosial ekologi yang terintegrasi dimana dibutuhkan modal oleh sumber daya manusia yang menjalankan program pembangunan tersebut untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam (Suyono & Tamin, 2012). Sehingga tantangan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan adalah dapat disebabkan oleh metode penggunaan sumber daya alam yang kurang tepat dan kualitas sumber daya manusia yang rendah atau bahkan belum tersedia metode yang tepat dalam penggunaan sumber daya alam di Indonesia.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah isu pembangunan berkelanjutan!
3. Kemukakan satu kasus pembangunan berkelanjutan yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

“Pembangunan berkelanjutan adalah kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi berikutnya, dalam memenuhi kebutuhannya di masa depan.”

(Carter & Rogers, 2008: 3)

BAB XII ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



BAB XIII

Isu Sumber Daya Alam

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep sumber daya alam.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik pengelolaan sumber daya alam.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu mengerti konsep sumber daya alam.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sumber daya alam.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik sumber daya alam.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah sumber daya alam.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam masalah sumber daya alam.
6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah sumber daya alam.

Pengertian Sumber Daya Alam

Pengertian sumber daya alam (*natural resources*) memiliki banyak dimensi yang cukup luas. Di antara pengertian mengenai sumber daya alam yang banyak dirujuk adalah, apa yang dikemukakan oleh Kelso & Dyne. Menurut keduanya, sumber daya alam dimaknai secara luas, sebagai keseluruhan faktor baik faktor biologi, fisik, kimia dan sosial yang membangun lingkungan sekitar kita (Kelso & Dyne, 1971: 4). Dalam pengertian lain, sumber daya alam memiliki sifat tergantung pada aktivitas manusia, yaitu sebagai semua hal yang berasal dan berada di bumi, atmosfer, biosfer. Oleh karenanya, sumber daya alam, terdiri dari semua bagian dari lingkungan alam yang ada di sekitar manusia.

Pengertian sumber daya alam, juga dapat dipandang pada perspektif yuridis, atau secara hukum. Khususnya yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara yuridis, sumber daya alam di Indonesia bersandar pada peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Disebutkan bahwa, sumber daya alam adalah aspek lingkungan yang mencakup sumber daya hayati dan nonhayati yang bekerja sama untuk membangun ekosistem yang koheren.

Menurut Ensiklopedia *Webster*, sumber daya alam yaitu:

1. Kemampuan untuk melengkapi sesuatu.
2. Sumber persediaan, bantuan dan penunjang.
3. Sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang.

Sedangkan pengertian secara umum, sumber daya alam merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Sehingga sumber daya alam dapat didefinisikan juga sebagai komponen dari ekosistem atau dari alam yang dapat menyediakan barang dan jasa yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia (Jolo & Gautama, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian

oleh (Grima et al., 2002: 3) yang menyebutkan maka sumber daya merupakan aset dalam manusia dan pemenuhan kepuasan.

Sejarah Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tercantum secara hukum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 (Waluya, 2006: 4). Pada awalnya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dilakukan dengan kesadaran manusia terhadap pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Selain itu, sebagian masyarakat dunia juga sadar bahwa sumber daya alam, tidak hanya dibutuhkan pada saat ini, namun juga dibutuhkan dalam waktu jangka panjang.

Bahkan, sumber daya alam berkaitan dengan kehidupan peradaban suatu bangsa. Setiap etnis dan budaya terbentuk mengikuti konsep dan wawasan terhadap sumber daya alam yang tersedia. Untuk itu, konsepsi penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam pun lahir sebagai bentuk mempertahankan entitas dalam suatu ekosistem sekaligus mempertahankan peradaban suatu komunitas atau masyarakat tertentu (Redi, 2015: 7). Perlakuan suatu masyarakat terhadap sumber daya alam, menunjukkan peradaban masyarakat tersebut. Masyarakat yang ramah terhadap sumber daya alam, menunjukkan peradaban masyarakat yang menghargai sumber daya alam. Sebaliknya, masyarakat yang tidak ramah terhadap sumber daya alam, bagian dari masyarakat yang tidak menghargai sumber daya alam.

Adapun bentuk dan status dari penguasaan sumber daya alam terbagi dalam empat kelompok menurut (Farhani & Chandranegara, 2019: 11) yaitu sebagai berikut:

1. Milik umum (*open access*). Kelompok ini memandang sumber daya alam adalah milik semua orang, karena milik semua orang, maka setiap orang berhak untuk mengakses

dan memanfaatkannya, dan tidak ada satu pihak manapun yang berhak melarang setiap orang untuk mengaksesnya.

2. Milik negara (*state*). Kelompok ini menilai bahwa sumber daya alam yang ada adalah milik negara dan dikuasai oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak untuk mengelolanya, atau pihak yang diberi izin oleh negara untuk mengelolanya.
3. Milik pribadi atau perorangan (*private*). Kelompok ini memiliki pandangan bahwa sumber daya alam yang ada merupakan milik perorangan atau kelompok tertentu, bukan milik umum atau milik negara. Hanya orang atau kelompok yang memiliki hak yang dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam.
4. Milik bersama (*communal*). Kelompok ini berpandangan bahwa sumber daya alam yang ada adalah milik bersama, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja.

Masing-masing keempat kelompok yang mewakili pandangan terhadap penguasaan alam tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Sumber daya alam terbuka dan transparan untuk memberi manfaat bagi semua orang. Sumber daya yang dimiliki secara pribadi adalah sumber daya yang hanya dikendalikan oleh satu orang, dan tidak ada orang lain yang memiliki hak. Individu atau organisasi dilarang menggunakan sumber daya kelompok tanpa persetujuan dari kelompok pemiliknya, yang berarti bahwa kelompok yang memilikinya memiliki kendali penuh atas sumber daya tersebut. Sumber daya yang dimiliki oleh negara, baik disebut sebagai "milik negara". (Wicaksono & Nugroho, 2015: 2).

Pengelolaan sumber daya alam didasari oleh maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan sumber daya yang aman, dan manusiawi (Waluya, 2006: 9). Walaupun sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi tetap akan habis. Secara spesifik, pengelolaan sumber

daya alam dijelaskan berikut ini:

1. Upaya manusia dalam mengelola sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terus-menerus (Nuraeni et al., 2020: 2).
2. Proses pembagian sumber daya alam dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mempertimbangkan jumlah populasi manusia dan ketersediaan sumber daya, serta mempertimbangkan adanya potensi kerusakan sumber daya (Abdurrahman, 2003: 7).

Pemikiran Tokoh Mengenai Isu Sumber Daya Alam

Sachs & Warner

Sachs and Warner berpandangan bahwa sumber daya alam (*natural resources*) merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia. Namun di banyak tempat, sumber daya alam yang tersedia malah menyebabkan kerusakan, bahkan kecelakaan dan bencana bagi manusia. Melihat hal tersebut, Sachs & Warner kemudian mengemukakan teori kutukan sumber daya alam (*curse of natural resources theory*). Sumber daya alam yang ada tidak membawa berkah dan kebaikan, namun sebaliknya malah membawa kutukan (Sachs & Warner, 2001: 2)

Scott & Pearse

Scott & Pearse berpandangan bahwa sumber daya alam (*natural resources*) tidak bisa dipisahkan dari aktivitas produksi. Sumber daya alam digunakan sebagai untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam pandangan Scott & Pearse sumber daya alam harus dikelola, sehingga menghasilkan barang yang dibutuhkan. Sumber daya alam tidak dipandang hanya sebagai sumber daya alam sebagaimana adanya, namun dihubungkan dengan adanya barang yang dihasilkan dari sumber daya alam yang ada (Scott & Pearse, 1992: 4).

Grima dan Kawan-Kawan

Grima dan kawan-kawan berpandangan hampir sama dengan Scott & Pearse. Namun pandangan Grima dan kawan-kawan lebih luas dari Scott & Pearse. Bila Scott & Pearse berpandangan bahwa sumber daya alam harus dapat menghasilkan barang produksi, maka Grima dan kawan-kawan melihat sumber daya alam sebagai aset yang tidak hanya menghasilkan barang produksi, namun juga dapat dikelola menjadi apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan manusia (Grima et al., 2002: 3). Kebutuhan manusia pada masa modern, tidak hanya barang, namun juga jasa, berupa suasana yang bisa dinikmati. Hal ini terjadi pada sektor pariwisata. Salah satu sektor pembangunan yang semakin marak dan menjadi tren di berbagai belahan dunia.

Karakteristik Pembangunan Berbasis Sumber Daya Alam

Ada beberapa ciri khas/ karakteristik pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam. Hal tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Tyas & Ikhsani, 2015: 3). Setidaknya ada tiga karakteristik pembangunan berbasis pada sumber daya alam

1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Sumber daya alam jenis ini dapat diperbaharui pada masa mendatang. Sumber daya alam seperti ini tergantung pada pengelolaan atau manajemennya. Jika dikelola dengan baik, maka sumber daya alam tersebut dapat lestari atau bahkan meningkat keberadaannya. Sebaliknya jika manajemennya buruk maka persediaannya dapat menurun dan habis. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam berupa irikanan, margasatwa, hutan dan tanah.
2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable* atau *limited resources*). Yaitu sumber daya alam yang secara material jika terus-menerus digunakan akan

menurun dan bila tidak dihentikan akan habis. Sumber daya alam jenis ini juga secara material tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batubara, gas alam, minyak bumi lain-lain. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang jika digunakan persediaannya akan menurun dan tidak dapat digunakan kembali adalah besi dan logam.

3. Sumber daya alam yang tidak akan habis (*continuous* atau *flow resources*) yaitu sumber daya alam yang persediaannya tidak terbatas, tidak akan pernah habis, bahkan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya adalah energi pasang surut, keindahan alam, ruang angkasa, udara dan energi matahari. Apapun yang dilakukan manusia, maka tidak akan mengurangi sinar matahari, tidak akan menghabiskan hembusan angin/ udara, dan tidak akan menghabiskan air laut.

Adapun menurut (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018: 15) karakteristik pembangunan berbasis sumber daya alam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pola pembangunan harus memberikan akses pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan kondisi masyarakat adat dan lokal. Tidak terpusat pada beberapa kelompok masyarakat apalagi berpusat pada masyarakat dari adat dan daerah lain (Anshar & Alauddin, 2019: 5). Pembangunan sumber daya alam harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Pola pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal. Masyarakat setempat tidak boleh diabaikan pada saat pembangunan menggunakan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Termasuk di dalam memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat.

3. Pembangunan berbasis sumber daya alam harus mengedepankan pengelolaan yang manusiawi dan ramah lingkungan. Pembangunan yang menggunakan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan alam yang ada, bahkan tidak boleh memiliki dampak buruk bagi manusia sekitar, baik dari segi kesehatan maupun lainnya.
4. Pembangunan menggunakan sumber daya alam perlu diiringi dengan adanya daya dukung dan kapasitas pengembangan, yang harus diperhitungkan saat mengembangkan teknologi ramah lingkungan (Jolo & Gautama, 2018: 5).
5. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dan pembangunan berbasis sumber daya alam agar dapat dikelola berdasarkan kondisi lokal (Wicaksono & Nugroho, 2015: 9)
6. Mengikutsertakan dan melibatkan pandangan dan pendapat masyarakat lokal akan permasalahan lingkungan di sekitar ketika ingin melakukan pembangunan di daerah tertentu. Bila terjadi masalah, maka masyarakat juga harus dilibatkan.

Peluang dan Tantangan Pembangunan Berbasis Sumber Daya Alam

Pembangunan berbasis sumber daya alam di Indonesia dan di berbagai belahan dunia memiliki peluang besar. Hal ini didorong oleh adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menemukan berbagai teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Hal ini tentu saja akan menahan laju perusakan lingkungan alam akibat dari maraknya pembangunan yang menggunakan sumber daya alam. Untuk kasus Indonesia, peluang tersebut juga semakin besar dengan didukung oleh kebijakan hukum Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Surono, 2017: 2). Begitu pula dengan kesadaran masyarakat terutama generasi millennial terhadap *eco-green* yang dapat turut

BAB XIII ISU SUMBER DAYA ALAM

serta membantu keberlangsungan program pembangunan berbasis sumber daya alam. Salah satunya adalah banyaknya anak muda yang turut serta dalam kegiatan *volunteer* atau relawan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup yang dapat menjadi peluang bagi kelancaran pembangunan berbasis sumber daya alam, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Noor, 2018: 9).

Selain itu, dengan dukungan besar masyarakat dalam menjaga lingkungan alam akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pembangunan berbasis sumber daya alam dengan membentuk kebijakan yang bertujuan dalam meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, penghematan penggunaan, dan pen-delegasian wewenang kepada rakyat daerah dalam menjaga kualitas ekosistem lingkungan (Anshar & Alauddin, 2019: 10).

Meskipun terdapat peluang baik dalam pembangunan berbasis sumber daya alam, tetapi pembangunan berbasis sumber daya alam memiliki beragam tantangan dan rintangan, yang harus dihadapi dan diselesaikan. Tantangan tersebut diantaranya adalah minimnya teknologi ramah lingkungan di Indonesia dalam melakukan pembangunan ramah lingkungan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan menjadi persoalan tersendiri bagi pembangunan berbasis sumber daya alam (Umar, 2018: 12).

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian sumber daya alam!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah pembangunan berbasis sumber daya alam!
3. Kemukakan satu kasus sumber daya alam yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

BAB XIII ISU SUMBER DAYA ALAM

“Sumber daya alam adalah keseluruhan faktor;
baik faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial
yang membentuk lingkungan sekitar kita.”
(Kelso & Dyne, 1971: 4)



BAB XIV

Isu Pembangunan Sumber Daya Manusia

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep sumber daya manusia.
2. Mahasiswa mampu memahami praktik sumber daya manusia.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu mengerti konsep sumber daya manusia.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sumber daya manusia.
3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik sumber daya manusia.
4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah sumber daya manusia.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam masalah sumber daya manusia.
6. ¹⁶ Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah sumber daya manusia.

Pengertian Sumber Daya Manusia

Sebelum mengulas mengenai sumber daya manusia (*human resources*), terlebih dahulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya (*resources*). Dari beberapa banyak literatur, dapat disimpulkan, pengertian yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Bahwa sumber daya adalah segala sesuatu yang memiliki nilai potensi dalam kehidupan. Potensi tersebut bisa dari suatu unsur atau materi tertentu. Sumber daya dapat bersifat fisik dan non-fisik. Lazimnya, sumber daya dikontrol oleh pihak lain. Satu-satunya sumber daya yang memiliki kontrol pada dirinya sendiri adalah sumber daya manusia (Septin, 2019: 2).

Sumber daya manusia (*human resource*) didefinisikan sebagai sumber daya yang berupa dan berasal dari manusia. Sumber daya manusia sering juga disebut sebagai modal insani (Salehi, 2013: 3). Sumber daya manusia adalah sumber daya yang dapat mengambil keputusan. Selain itu sumber daya manusia dapat pula mengontrol sumber daya lainnya, sehingga dapat menunjukkan kinerja dan kemampuan dalam menganalisis masalah yang tengah dihadapi. Sumber daya manusia juga didefinisikan sebagai satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, karya, keterampilan, keinginan, dorongan dan pengetahuan (Margherita, 2021: 3).

Potensi semua sumber daya manusia dapat mempengaruhi lingkungan sekitar dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, manajemen sumber daya manusia penting untuk dilakukan guna mengontrol kemampuan pikir dan rasa dari individu ke arah yang lebih baik. Sumber daya manusia dalam definisi lain juga dijelaskan sebagai sesuatu yang berasal dari manusia-manusia yang memiliki kekuatan yang dapat dimaksimalkan (Moldovan, 2011: 9). Untuk itu, sumber daya manusia memiliki empat faktor menurut (Edy, 2017: 4) yaitu:

1. Sumber daya manusia memiliki tingkat strategi yang didasarkan pada tiga hal yaitu; visi, misi, dan sasaran organisasi.
2. Memiliki faktor internal yaitu kualifikasi atau kualitas dari sumber daya manusia, aktivitas sumber daya manusia, aset sumber daya manusia.
3. Memiliki faktor eksternal berupa faktor politik, budaya, demografis, teknologi, perubahan sosial yang dapat dikontrol dan mempengaruhi faktor internal dari sumber daya manusia.
4. Memiliki faktor organisasional; seperti terdapat struktur kehidupan bermasyarakat, strategi perusahaan, budaya perusahaan, dan dalam manajemen sumber daya manusia sebagai strategi.

Sejarah Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sejarah pengelolaan sumber daya manusia atau hal ini dapat juga didefinisikan sebagai manajemen sumber daya manusia, bersumber dari pemahaman manusia bahwa sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari manusia lain. Untuk itu, memberdayakan diri sendiri dan lingkungan, serta orang lain penting untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Tyas & Ikhsani, 2015).

Sejarah manajemen sumber daya manusia tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi sebagai bagian dari kebutuhan dasar hidup manusia. Pada tahun 1776 terjadi sebuah doktrin ekonomi klasik yang ditulis dan diterbitkan oleh Adam Smith berjudul *The Wealth of Nation* (Wong, 2015: 3). Pada buku tersebut, Smith menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai keunggulan ekonomis bagi suatu komunitas dan organisasi, maka dibutuhkan strategi dalam pembagian kerja yang rinci terhadap tugas dan pekerjaan yang spesifik dan berulang guna mencapai tujuan ekonomis yang diinginkan (Smith, 1776: 1). Selanjutnya revolusi industri yang terjadi di dunia seperti revolusi

industri di Inggris menjadi permulaan dari diperlukannya manajemen sumber daya manusia yang kemudian ditorehkan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu sejarah.

Oleh karena itu berbagai revolusi industri di dunia sampai saat ini mulai dari revolusi industri 1.0, sampai dengan revolusi industri 4.0, yang menjadi bentuk sejarah dari perkembangan manajemen sumber daya manusia di dunia. Pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia yang tepat guna mampu menghasilkan kinerja besar hanya dengan beberapa individu. Contohnya, banyak industri pada pabrik-pabrik produk rumah tangga seperti pabrik peniti yang mampu menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari yang hanya dikerjakan atau dihasilkan dari 10 orang. Adanya revolusi industri ini telah melahirkan perubahan baru dari proses pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih baik lagi hingga saat ini dikenal dengan istilah manusia modern.

Pemikiran Tokoh Mengenai Sumber Daya Manusia

Beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai sumber daya manusia antara lain sebagai berikut:

1. Hasibuan memaknai sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Hal tersebut disebut oleh (Hasibuan, 2011: 21) dalam tulisannya "Perencanaan Sumber Daya Manusia", sumber daya manusia dimaknai sebagai "tenaga kerja." Tenaga kerja merupakan bagian dari kebutuhan industri atau perusahaan yang direncanakan untuk memenuhi tuntutan perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia diharapkan supaya dapat memaksimalkan tujuan perusahaan, bahkan untuk keperluan efisiensi dan efektivitas.
2. Sementara itu, Wirawan mengartikan sumber daya manusia sebagai aktor penggerak. Menurut (Wirawan, 2015: 45), sumber daya manusia adalah penggerak dari sumber daya lainnya yang bertujuan untuk memperoleh kehidupan dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, Wirawan menyebut

bahwa sumber daya manusia sebagai aktor utama yang mengelola dan mengontrol sumber daya lain, seperti daya alam, dan sumber daya keuangan atau juga sumber daya material.

3. Sumber daya manusia juga disebut sebagai moda insani. Hal tersebut dikemukakan oleh (Samsuni, 2017: 30). Menurut Samsuni, sumber daya manusia adalah sumber daya yang berwujud manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani.
4. Sumber daya manusia dapat juga diartikan sebagai sumber yang memiliki peran paling aktif di dalam proses pembuatan dan menjalankan kebijakan. Hal tersebut dikemukakan oleh (Marwansyah, 2012: 9). Menurut Marwansyah, sumber daya manusia sebagai sumber yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan menjalankan organisasi.
5. Sumber daya manusia dipandang pula sebagai sumber daya yang lengkap, melibatkan unsur materi dan nonmateri. Seperti yang dikemukakan oleh (Saini, 2011: 6). Saini mendefinisikan sumber daya manusia sebagai sumber daya satu-satunya yang mempunyai daya, akal, dorongan, perasaan, keterampilan, keinginan dan karya baik itu karya ratio, karya rasa, dan karya karsa.

Karakteristik Pembangunan Berbasis Sumber Daya Manusia

Pembangunan berbasis sumber daya manusia, dinilai sebagai pembangunan yang paling tepat. Pembangunan berbasis sumber daya manusia melihat manusia sebagai pusat pembangunan (*people centred development*). Manusia tidak diperlakukan hanya sebagai sasaran (*object*) pembangunan, namun juga sebagai pelaku pembangunan (*subject*). Begitu pula dengan tujuan dan dampak pembangunan senantiasa mempertimbangkan faktor sumber daya manusia. Sebab pembangunan tidak untuk pembangunan (*development not only for development*). Pembangunan dilakukan untuk manusia

(*development for human*). Maka, pembangunan memang semestinya dilakukan berbasis pada sumber daya manusia (SDM).

Beberapa ahli berpendapat bahwa pembangunan berbasis sumber daya manusia adalah semacam perencanaan dan pelaksanaan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan potensi sumber daya lain yang ada sedemikian rupa sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat memanfaatkan dan mengaksesnya (Harahap et al., 2020: 8). Dari penjelasan tersebut, dapat dimaknai bahwa pembangunan berbasis sumber daya manusia seharusnya adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau sumber daya manusia yang terlibat didalamnya bukan justru dirumuskan dan dimanfaatkan oleh elit masyarakat yang dianggap berkuasa di dalam pembangunan tersebut (Hasibuan, 2011: 6). Dalam konteks ini pembangunan sumber daya manusia semestinya muncul dari bawah (*bottom up*), bukan dipaksakan dari atas (*top down*).

Adapun karakteristik pembangunan berbasis sumber daya manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh (Tyas & Ikhsani, 2015: 3-6), adalah sebagai berikut:

1. Manusia memiliki potensi besar di dalam dirinya yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Maka, perlu upaya untuk memanfaatkan potensi besar dari dalam diri manusia, dalam rangka mencapai tujuan atau kinerja sebesar-besarnya.
2. Pembangunan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia, sehingga dalam proses pembangunan, perlu dicapai adanya keterampilan yang inovatif bagi manusia secara individual yang kemudian membentuk masyarakat. Dengan keterampilan yang dimiliki, manusia menjadi mandiri, tidak lagi tergantung kepada pihak lain, bahkan kepada negara sekalipun.

3. Tujuan akhir dari pembangunan yang berbasis sumber daya manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi manusia. Hal tersebut harus tetap fokus diutamakan di dalam pelaksanaan pembangunan. Bukan pada sebaik dan sebagus apa fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.
4. Untuk mencapai tujuan akhir yang tepat, menciptakan kesejahteraan bagi manusia, maka diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai kebutuhan dan potensi serta karakteristik sumber daya manusia yang turut serta dalam proses pembangunan tersebut.
5. Tidak kalah pentingnya adalah, perlunya melibatkan peran aktif manusia yang mengerti kebutuhannya. Sehingga pelaksanaan pembangunan akan tetap sasaran, sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat.

Peluang dan Tantangan Pembangunan Berbasis SDM

Pembangunan berbasis sumber daya manusia di Indonesia memiliki peluang dan tantangan. Keduanya berjalan seiring dan saling mempengaruhi. Pada satu sisi pembangunan berbasis sumber daya manusia memiliki peluang besar untuk menciptakan kehidupan masyarakat secara umum yang lebih baik. Hal ini seiring dengan semangat masyarakat modern yang menghasilkan banyak inovasi yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut bersumber dari inovasi dan kreativitas sumber daya manusia (Adrizayani, 2014: 4). Salah satu hal yang menjadi ciri dari manusia modern yang dapat menjadi peluang bagi peningkatan pembangunan adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan manusia saat ini semakin banyak yang meningkat. Bila dulu sebagian besar orang tidak sekolah, kini didominasi oleh manusia modern yang telah mengenyam pendidikan S1 hingga S2 dan S3. Kesadaran sumber daya manusia modern akan pentingnya pendidikan merupakan peluang besar dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Selain itu, peluang dari pembangunan berbasis sumber daya manusia adalah ketersediaan teknologi yang lebih baik yang dapat mendukung kinerja sumber daya manusia sekaligus membantu dalam peningkatan kapabilitas dan kompetensi dari pembangunan yang dijalankan. Termasuk juga yang terjadi di Indonesia, bahkan tidak hanya di ibukota, atau di kota-kota besar saja di Indonesia, namun sudah menjangkau ke wilayah pelosok. Maka, bila kondisi tersebut disebut sebagai revolusi industri 4.0, sesungguhnya tidak berlebihan, karena kehidupan manusia sudah semakin canggih. Hampir semua bidang dan sektor kehidupan manusia melibatkan teknologi (Nedelko, 2020: 2).

Peluang lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah kondisi Indonesia yang menghadapi bonus demografi. Bonus demografi pada satu sisi merupakan kondisi yang bila tidak disikapi dengan baik, maka akan menjadi masalah serius. Namun dengan pemberdayaan sumber daya manusia, maka bonus demografi menjadi hal yang positif bagi pembangunan secara umum. Kondisi bonus demografi dapat meningkatkan potensi kualitas pembangunan di Indonesia dengan mengandalkan atau berbasis pada sumber daya manusia (Umar, 2018: 2). Hal tersebut akan menjadi sebaliknya, bila manusia tidak diberdayakan secara maksimal.

Selain peluang, pembangunan berbasis sumber daya manusia juga memiliki sejumlah tantangan. Tantangan sumber daya manusia saat ini adalah berkaitan dengan kompetensi dan kapabilitas manusia itu sendiri (Podmetina et al., 2018: 7). Banyaknya jumlah manusia pada satu negara atau satu daerah, dapat menjadi problem tersendiri yang membebani pembangunan. Seperti yang terjadi di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki jumlah populasi yang didominasi oleh generasi muda atau generasi usia produktif, akan tetapi generasi ini adalah generasi yang rapuh. Generasi milenial sangat membutuhkan bimbingan dari negara, belum bisa mandiri seutuhnya, dan belum dapat memanfaatkan peluang yang ada. Untuk mening-

katkan pembangunan, generasi milenial butuh pengarahan yang tepat, dibantu oleh kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik (Ma'ruf & Latri, 2018: 6).

Selain itu, era digital yang semakin mengandalkan teknologi juga memberatkan sumber daya manusia (Nancy et al., 2020: 7) jika tidak memiliki kualitas dan kapabilitas yang mampu sejalan dengan kemajuan teknologi. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan bagi pembangunan berbasis sumber daya manusia. Generasi milenial hanya menjadi konsumen dari teknologi dan dunia yang semakin mengecil dengan digitalisasi semua aspek. Tidak memanfaatkan teknologi secara bijak, atau lebih tinggi lagi, menjadi produsen dari teknologi yang terus semakin berkembang.

Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian sumber daya manusia!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah pembangunan sumber daya manusia!
3. Kemukakan satu kasus pembangunan sumber daya manusia yang ada di sekitar Saudara!
4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang Saudara kemukakan tersebut?
5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/ kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

DAFTAR PUSTAKA

16

- Adrizayani, S. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Sistem Informasi Sumber Daya Manusia*.
- Ahmad Redi. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*.
- Anshar, & Alauddin, R. (2019). Wujud Kebijakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal di Maluku Utara. *Jurnal Penelitian Humano*.
- Aryanasl, A., Ghodousi, J., Arjmandi, R., & Mansouri, N. (2017). Components of sustainability considerations in management of petrochemical industries. *Environmental Monitoring and Assessment*. <https://doi.org/10.1007/s10661-017-5962-y>
- Asriansyah, M. F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 1141–1150.
- Astawa, P. (2017). Materi Kuliah Kewarganegaraan. *Jurnal Universitas Udayana*.
- Aswandi, R. (2020). Jurnal pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*.
- Blaustein, L., Kadas, G. J., & Gurevitch, J. (2016). Integrating ecology into green roof research. *Israel Journal of Ecology and Evolution*. <https://doi.org/10.1080/15659801.2016.1208943>
- Boulanger, P. M., & Bréchet, T. (2005). Models for policy-making in sustainable development: The state of the art and perspectives for research. *Ecological Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.07.033>
- Burhany, D. I. (2013). Akuntansi Manajemen Lingkungan, Alat Bantu Untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan*

DAFTAR PUSTAKA

- Keuangan*.
- Cai, T. (2020). Globalization. In *Global Studies: Volume 1: Globalization and Globality*.
<https://doi.org/10.4324/9781351263207-2>
- Carter, A., & Chalk, P. (1998). Introduction: Threats to Liberal Democracy. *Australian Journal of Politics & History*.
<https://doi.org/10.1111/1467-8497.00024>
- Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: Moving toward new theory. In the *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*.
<https://doi.org/10.1108/09600030810882816>
- Chambers, R. (1981). Rural poverty unperceived: Problems and remedies. *World Development*.
[https://doi.org/10.1016/0305-750X\(81\)90073-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(81)90073-5)
- Dahl, R. A. (2020). A Preface to Economic Democracy. In *A Preface to Economic Democracy*.
<https://doi.org/10.1525/9780520341166>
- Daszak, P., Cunningham, A. A., & Hyatt, A. D. (2001). Anthropogenic environmental change and the emergence of infectious diseases in wildlife. *Acta Tropica*.
[https://doi.org/10.1016/S0001-706X\(00\)00179-0](https://doi.org/10.1016/S0001-706X(00)00179-0)
- Dinata, F. R. (2020). Pembelajaran Humanistik Dalam Mendorong Pengembangan Afeksi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 48–57.
- DR. H. ABDURRAHMAN, S. M. (2003). Pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam indonesia. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema*.
- Dwi Sulisworo, T. (2012). [DEMOKRASI]. *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan*.
- Dwiningrum, S. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Ebenstein, W., & Strong, C. F. (1950). *Modern Political Constitutions*.

- The Western Political Quarterly*.
<https://doi.org/10.2307/443510>
- Edy, S. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Effendi, R., & Malihah, E. (2008). ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA. In *Panduan Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya Dan Teknologi*.
- Effendi, T. N. (1992). Sumber Daya Manusia Di Indonesia; Analisis Data Sensus. *Population and Environment*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jp.10808>
- Ernawati, E., & Kurniawan, T. (2002). Partisipasi Publik, Konsep dan Metode. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 18(1), 1–30.
- Fachrurozi, M. H. (2016). Revolusi Demokrasi: Suatu Gagasan Memperbaiki Demokrasi Indonesia. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
<https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10768>
- Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*.
<https://doi.org/10.31078/jk1622>
- Fitriah, N. (2018). Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3643>
- Gauthier, P.-L. (2009). Roger Dale, Susan Robertson, Globalisation & Europeanisation in Education: (Ed.) (2009), Symposium Books, Oxford, 264 p. *Revue Internationale d'éducation de Sèvres*. <https://doi.org/10.4000/ries.623>
- Grima, J., López, J., & Ballesteros, B. (2002). Sustainable management of groundwater resources with regard to contaminated land RTD needs. *Brownfield Sites:*

Assessment, Rehabilitation and Development.

- Guan, Y., Chu, C., Shao, C., Ju, M., Dai, E., Chagas, C. da S., Pinheiro, H. S. K., Carvalho Junior, W. de, Anjos, L. H. C. dos, Pereira, N. R., Bhering, S. B., Pabum, D. M., Utbah, Z., Sudiana, E., Yani, E., Garut, K., Barat, J., Suryaningtyas, I. S. D. T., Dengan, B., ... Zhang, Z. (2016). *Media Konservasi*, 2(1), 11-40.
- Ngwengwe, B., & Hassan, N. H. (2020). Defining the characteristics of poverty and their implications for poverty analysis. In *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1768669>
- Handayani, S. (2006). *Pelibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Kompip Solo.
- Harahap, M. B., Roesminingsih, M. V., & Mudjito, M. (2020). Concept of Human Resources Development to Improve Teacher Performance: Multi-Case Study. *Studies in Learning and Teaching*. <https://doi.org/10.46627/silet.v1i3.52>
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara.*
- Hatu, R. (2010). Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis). *Jurnal Inovasi*, 7(04).
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision. Analysis and Practice*. Longman.
- IRMAWATI, I., Salim, A., & Rahman Fitra, T. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pendidikan Terhadap Komunitas Adat Terpencil Studi Kasus Suku Anak Dalam Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. (*Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*). <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7965>
- Isaacs, H. R., & Carter, G. M. (1958). The Politics of Inequality. *International Journal*. <https://doi.org/10.2307/40198340>
- Isbandi, R. A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset*

- Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press.
- Jalal, F. dan D. S. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa.
- Jolo, A. Y., & Gautama, R. S. (2018). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Kabupaten Halmahera Utara). *Techno: Jurnal Penelitian*. <https://doi.org/10.33387/tk.v7i01.355>
- Kadji, Y. (2013). Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya. *UGN*.
- Kelso, L., & Dyne, G. M. Van. (1971). The Ecosystem Concept in Natural Resource Management. *Bird-Banding*. <https://doi.org/10.2307/4511808>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2018). Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. *Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*.
- Koesbardiati, T. (2006). Teori-teori Munculnya Manusia Modern. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*.
- Lawalata, G. M. (2013). Prinsip-Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan. *Jurnal Transportasi*.
- Lipton, M. (1978). Why Poor People Stay Poor. Urban Bias in World Development. *Verfassung in Recht Und Übersee*. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1978-4-462>
- Ma'ruf, A., & Latri, W. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 44–55.
- Margherita, A. (2021). Human resources analytics: A systematization of research topics and directions for future research. *Human Resource Management Review*. <https://doi.org/10.1016/j.hrmmr.2020.100795>
- Martono, H. (2013). Laku Gunung Segara: Perubahan Sosial dengan Pendekatan Koreografi Lingkungan. *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan*. <https://doi.org/10.24821/resital.v12i2.494>
- Marwansyah. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia.

Manajemen Sumber Daya Manusia.

- Mattioda, R. A., Fernandes, P. T., Detro, S. P., Casela, J. L., & Junior, O. C. (2013). Principle of triple bottom line in the integrated development of sustainable products. *Chemical Engineering Transactions*. <https://doi.org/10.3303/CET1335033>
- Miller, P. (2006). IFC performance standards. *8th SPE International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production 2006*. <https://doi.org/10.2523/98840-ms>
- Moldovan, O. (2011). Modern Concepts In Human Resources Management. *Revista de Management Şi Inginerie Economică*,.
- Morison, J. (2004). e-democracy: on-line civic space and the renewal of democracy? *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*. <https://doi.org/10.1017/s0841820900003842>
- Mubarak, Z. (2010). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. *Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota*.
- Munasinghe, M. (1995). Making economic growth more sustainable. In *Ecological Economics*. [https://doi.org/10.1016/0921-8009\(95\)00066-6](https://doi.org/10.1016/0921-8009(95)00066-6)
- Nancu, D., Sima, V., & Gheorghe, I. G. (2020). *Influences of the Industry 4 . 0 Revolution on the Human Capital Development and Consumer Behavior: A Systematic Review*.
- Nedelko, Z. (2020). *Understanding Future Leaders: How Are Personal Values of Generations Y and Z Tailored to Leadership*.
- Nisbet, R. (2017). *History of the Idea of Progress*. Routledge.
- NOOR, F. (2018). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip*

- Fiqh Al-Bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
<https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p047>
- Norzita Jamil, & Che-Mat, S. H. (2014). Realiti Kemiskinan: Satu Kajian Teoritik. *Jurnal Ekonomi Malaysia*.
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*.
<https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Nuraeni, Nursalam, & Idawati. (2020). Implementasi Adiwiyata dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup. *Indonesian Journal of Primary Education*.
- Nuriyati, T., & Chanifudin, C. (2020). Pendidik Milenial di Era Globalisasi. *ASATIZA: Jurnal Pendidikan*.
<https://doi.org/10.46963/asatiza.v1i3.118>
- Nurkse, R. (1971). The Theory of Development and the Idea of Balanced Growth. In *Developing the Underdeveloped Countries*. https://doi.org/10.1007/978-1-349-15452-4_9
- Podmetina, D., Soderquist, K. E., Petraite, M., & Teplov, R. (2018). Developing a competency model for open innovation: From the individual to the organizational level. *Management Decision*. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0445>
- Porta, S., & Renne, J. L. (2005). Linking urban design to sustainability: Formal indicators of social urban sustainability field research in Perth, Western Australia. *Urban Design International*.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.udi.9000136>
- 7 Poveda, C. A., & Lipsett, M. (2011). A Review of Sustainability Assessment and Sustainability/Environmental Rating Systems and Credit Weighting Tools. *Journal of Sustainable Development*.
<https://doi.org/10.1080/1523908100365539>
- 4 Prawoto, N. (2009). Memahami kemiskinan dan strategi

- penanggungjawabnya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(April).
- Republic of South Africa. (2008). Millenium Development Goals: Goal 7 Ensure Environmental Sustainability. *Vasa*.
- Rico Motos, C. (2018). Representation, Participation and Models of Democracy. *Revista General De Derecho Constitucional*.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusuma. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Journal TAPIs*.
- Ruggerio, C. A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions. In *Science of the Total Environment*.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147481>
- Rumini, S. dkk. (1993). *Psikologi Pendidikan*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. *European Economic Review*.
[https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00125-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8)
- Saini, D. S. (2011). Book Review: Key Concepts in Human Resource Management. *Vision: The Journal of Business Perspective*. <https://doi.org/10.1177/097226291101500111>
- Salehi, A. (2013). Strategic human resource management. *Advances in Environmental Biology*.
https://doi.org/10.1007/978-1-349-27325-6_2
- Samekto, A. (2005). *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*. Citra Aditya Bakti.
- Samsuni, S. (2017). Manajemen sumber daya manusia. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*.
- Sarabhai, K. V. (2015). ESD for Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Education for Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1177/0973408215600601>

- Scott, A., & Pearse, P. (1992). Natural resources in a high-tech economy. Scarcity versus resourcefulness. *Resources Policy*. [https://doi.org/10.1016/0301-4207\(92\)90001-p](https://doi.org/10.1016/0301-4207(92)90001-p)
- Sen, A. K. (1999). Introduction - Development as Freedom. *Development as Freedom*.
- Septin, T. (2019). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam. *Keunggulan Bersaing Perusahaan Meningkatkan*.
- Setyobudi, F., & Marsudi, S. (2018). Pendidikan Lingkungan Hidup Di SMP Negeri 3 Kebumen Jawa Tengah. *JIPSINDO*. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v5i1.20180>
- Simanjuntak, T. (2020). Kehidupan Manusia Modern Awal di Indonesia: Sebuah Sintesa Awal. *AMERTA*. <https://doi.org/10.24832/amt.v29i2.1-17>
- Slamet, M. (2003). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press.
- Smith, A. (1776). An inquiry into the wealth of nations. *Strahan and Cadell, London*.
- Solikatun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisis Sosiologi*. <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Suartha, N. (2012). Esensi Bantuan Pemerintah Kabupaten Badung Terhadap Keberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 8(2), 85–92.
- Subiyanto, B. S. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *E-Magazine Warta BP2SDM*.
- Sugiyah. (2001). *Partisipasi Komite sekolah dalam penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional Di Sekolah dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten kulon progo*.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.

- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran politik barat: kajian sejarah perkembangan pemikiran negara, masyarakat dan kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sulila, I. (2016). Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas manajemen dan mutu produk pada kelompok kerajinan Karawo di Desa Bongo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(22), 96–102.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Ghalia Indonesia.
- Sumodiningrat, G. (2002). *Memberdayakan Masyarakat Perencana*. Kencana Nusadwipa.
- Sunarso, S. (2018). Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya). *Humanika*.
<https://doi.org/10.21831/hum.v10i1.21002>
- Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi. *Ilmiah CIVIS*.
- Surono, A. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 22. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.195>
- Suryono, A. (2001). Teori dan Isu Pembangunan. *Universitas Negeri Malang*, (Malang: UM Press), 17, 1–12.
- Suyono, R. S., & Tamin, O. Z. (2012). Integrated Sustainability Appraisal Dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia. *Simposium Nasional RAPI XI FT UMS*, 90–98.
- Syarif, M. (2013). Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam. *Media Akademika*, 3(28), 33–362.
- Syifaâ, R. (2008). Psikologi humanistik dan aplikasinya dalam pendidikan. *El Tarbawi*, 1(1), 99–114.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/tarbawi.voll.iss1.art8>
- Tilaar, H. A. R. D. R. N. (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Bina Aksara.
- Tyas, A. A. W. P., & Ikhsani, K. T. W. (2015). Sumber Daya Alam &

- Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Forum Ilmiah*.
- Umar, M. A. (2018). Bonus Demografi Sebagai Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Era Otonomi Daerah. *Gentamulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*.
- Veltmeyer, H., & Petras, J. (2008). Peasants in an era of neoliberal globalization: Latin America on the Move. *Theaomai*.
- Wackernagel, M., Rees, W., Wacker nagel, M., & Meredith Burke, B. (1997). M. Wackernagel, W. Rees Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth New Society Publishers, C. *Population and Environment*.
- Waluya, B. (2006). Konsep Lingkungan Hidup. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk SMA*, 1-10.
- Wanma, G. F., & Erari, B. (2009). Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang. 25-43.
- Wicaksono, A., & Nugroho, R. (2015). Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia dan Pengelolaan Tanah di Negara. *Bhumi*.
- Wirawan. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia. In *Depok*.
- Wisseman, W., Hasbullah, H., & Tindjabate, C. (n.d.). *Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Dd Desa Palintuma Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala*. 9(1), 70-79.
- Wong, S. (2015). The Wealth of Nations. *London Business School Review*. <https://doi.org/10.1111/2057-1615.12058>
- Zakariya, A. F. (2018). Pengorganisasian masyarakat hutan melalui sistem agroforestri menuju kampung iklim di Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Pustaka Kencana Prenada Media Group.

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARIUM

Biodiversity adalah komponen hayati dan non hayati membentuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang meliputi keanekaragaman genetik, spesies, ekosistem dan keanekaragaman budaya manusia.

Blue economy adalah model yang mendorong pelaksanaan secara berkelanjutan juga mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan Indonesia.

Dependensi adalah keadaan bergantung kepada orang lain karena belum dapat hidup sendiri (tentang orang).

Demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk; ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik; ilmu kependudukan.

Derivasi adalah pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar untuk membentuk kata;

Elitis adalah berhubungan dengan kelompok elite dalam masyarakat

Fisiografi adalah satu cabang ilmu Geografi yang mempelajari suatu wilayah daerah atau negara berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut.

Homeostatis adalah konsep analisis dalam mengontrol interaksi yang kompleks antara makhluk hidup dengan alam

Pluralis adalah kategori jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua dalam bahan yang mempunyai dualis.

Sintaksis adalah pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar.

Teologi adalah pengetahuan ketuhanan (mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci)

INDEX

Biodiversity, 136
Blue economy, 133
Dependensi, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Demografi, 156, 161
Derivasi, 10
Emansipatoris, 34, 37, 38
Elitis, 56, 57
Epistemologis, 38
Fisiografi, 111
Grass root radicalism, 46
Green ecolog, 137
Homeostatis, 111, 116
One dimensional man, 33
Mazhab Frankfurt, 35, 36, 38, 39
Multidimensi dan multispektrum, 9
Neo-Kantianisme, 34
Pluralis, 56, 77, 84
Post strukturalis, 56
Sintaksis, 3
Sistem sosio-ekologis, 138
Sosial therapy, 46
Spektrum, 9
Strukturalis, 56, 57
Teologi, 37
Triple Bottom Principles, 137
Urban bias, 96

RIWAYAT PENULIS

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom
Tempat/ tgl lahir : Sumenep, 15 Januari 1977
Alamat : Sumenep, Jawa Timur
Telepon & WA : 0823 3292 0307
Email : hidayatullah@wiraraja.ac.id
Website : www.mohammadhidayatullah.com

PENDIDIKAN

1. S3 Ilmu Sosial (Politik dan Pembangunan) Universitas Merdeka Malang, lulus 2020.
2. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, lulus tahun 2012.
3. Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta, lulus tahun 2002.

PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep, Maret 2015-sekarang. (Mata kuliah yang diampu; Ekonomi Politik Pembangunan; Teori dan Isu Pembangunan; Administrasi Pembangunan; Politik Lokal).
2. Kontributor Metro TV wilayah Madura, Mei 2011-sekarang.
3. Produser televisi lokal Madura Channel, Maret 2008-Maret 2011.

TENTANG PENULIS

PUBLIKASI JURNAL

1. "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Bumdes Budidaya Lele di Desa Patean Kecamatan Batuan." Diterbitkan oleh Jurnal Abdimas Indonesia, Volume 1 No. 2, Agustus 2021.
2. "Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Raas Melalui Pendampingan Standarisasi Produk dan Kemasan." Terbit di Jurnal Abdiraja, Volume 4 No. 1, Maret 2021.
3. "Integrating Science and Religion at Malaysian and Indonesian Higher Education." Terbit di Jurnal Al-Ta'lim, Volume 28, No. 1, 2021, (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
4. "Religious Behavior of Indonesian Muslims as Responses to the Covid-19 Pandemic." Terbit di Jurnal Al Adabiya, Volume 16, No. 1, Juni 2021, (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
5. "Government Response and Community Participation Overcoming Outbreak and Managing Its Impact Covid-19." Terbit di Jurnal Ijtima'iyya, Volume 13, No. 2, Desember 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
6. "The roles of technology in al-Quran exegesis in Indonesia." Terbit di Technology and Society, Volume 63, November 2020, (Sciencedirect, terindeks Internasional, Scopus Q1).
7. "Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia." Terbit di Asian Journal of Comparative Politics, Volume Mei 2020 (terindeks Internasional, Scopus Q2).
8. "Relation of Religion, Economy and Politics: Islamization of Malay Community through Trade and Kingdom." Terbit di Jurnal Al-Tahrir, Volume 20, No. 2, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
9. "Why Development Failed? Facts and Analysis of Development Failure in Sumenep." Terbit di Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 18, Nomor 1, Juni 2020

- (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
10. "Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep." Terbit di Jurnal Sospol, Volume 6, Nomor 1, April 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
 11. "COVID-19: Public support to handle economic challenges." Terbit di Jurnal Inovasi Ekonomi, Volume 5, No. 2, Maret 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
 12. "The Role of Technology and Social Media in Spreading the Qur'an and Hadiths by Mubalig." Terbit di Jurnal DINIKA, Volume 4, No. 1, Tahun 2019 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
 13. "Kiai and Political Relations Reconciling Politics And Religion in Indonesia." Terbit di Jurnal Tahrir IAIN Ponorogo, Volume 18, No. 2, November 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
 14. "Analisis Curse Theory Pada Sumber Daya Alam Migas Bagi Warga Madura." Terbit di Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Volume 14, No. 1, tahun 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
 15. "Integration of Islam and Local Culture: *Tandhe'* in Madura." Terbit di Jurnal Miqot, UIN Sumatera Utara, Vol. XLII No.1 Januari-Juni 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
 16. "Corporate Social Responsibility Strategi Komunikasi Perusahaan Migas." Terbit di Jurnal Nomosleca Volume 3, No. 2, Oktober 2017 (terakreditasi Nasional).

PUBLIKASI PROSIDING

1. "The Strategies of Religious Leaders to Become Regional Heads in Indonesia," Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia.
2. "The Role of Local People in Improving Education of the Archipelago and Remote Communities of Indonesia."

TENTANG PENULIS

- 4 Terbit di *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (ASSEHR), Atlantis Press, Volume 267, Desember 2018 (terindeks Internasional, Thomson Reuters).
3. "Spice Route and Islamization on the West Coast of Sumatra in 17th-18th Century." Terbit di *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 302, Januari 2019, Atlantis Press (terindeks Internasional Thomson Reuters).
4. "Empowerment Salt Farmers to Alleviate Poverty." International Conferences Sdgs 2030 Challenges And Solutions, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Agustus 2017, (terakreditasi Nasional).

PUBLIKASI BUKU

1. Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Model Hexa Helix. Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Desember 2021.
2. Negara Demokrasi Menghadapi Covid-19: Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan, diterbitkan oleh Edulitera Malang, September 2021.
3. Pengantar Ekonomi Politik Pembangunan, diterbitkan oleh Unitomo Press, Surabaya, September 2021
4. Perilaku Voters pada Masyarakat Multikultural, diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2021.
5. Kutukan Demokrasi, diterbitkan oleh Edulitera Malang, 2021.
6. Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Studi Pembangunan (LKSP) Jakarta, 2020.
7. "Participation in building human resources: Independent strategies for facing demographic

expansion in remote island." Terbit di CRC Press Taylor & Francis Group, Nopember 2020. (terindeks Internasional Scopus).

8. Teori Sosial Empirik yang Sering Digunakan Untuk Penelitian Ilmiah; Skripsi, Tesis dan Disertasi. Diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2019.
9. Teori Sosial dan Pertentangannya. Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press, 2018.
10. Media dan Pelayanan Publik. Diterbitkan oleh LSPP Jakarta, 2014.

PUBLIKASI DI MEDIA

1. "Kerikil Sepatu Kekuasaan," Terbit di www.bermedia.id, 12 April 2021.
2. "Responses by Islamic Mass Organizations and Ummah in Indonesia to Reduce the Number of Covid-19 Victims." Terbit di Asia Research Institute, September 2020.
3. "COVID-19 Tests Government Solidity and Middle Class Solidarity." Terbit di ISA Social Transformation and Sociology of Development, Edisi 09, Agustus 2020.
4. "Eid Al-Fitr and Religious Holidays: Challenges of Covid-19 in the Muslim World." terbit di The Sociological Review, edisi Solidarity and Care, 20 Mei 2020.
5. "Melawan Covid-19 Dengan Cinta." Terbit di Harian Bhirawa, 5 April 2020.
6. "Tak Ada (Salahnya) Madura Provinsi." Terbit di Majalah SULUH MADURA, edisi II Oktober 2016.
7. "UMKM Berjaringan Eksis di Era MEA." Terbit di Majalah ASEAN, edisi 12 Juni 2016.
8. "Rekonsiliasi Pasca Pilkada." Terbit di Majalah Parlemen, edisi Januari 2016.

TENTANG PENULIS

SPEAKERS

1. Pembicara pada acara "Webinar Kebangsaan Memperingati Kemerdekaan ke 76 Republik Indonesia," yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sapeken Sumenep (Himpass) pada tanggal 18 Agustus 2021, pukul 09.00-12.00 secara daring, via zoom. Judul Materi yang disampaikan "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh."
2. Pembicara pada acara "Literasi Digital Nasional" yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada 12 Juli 2021, pukul 09.00-12.00 WIB secara daring, via zoom meeting. Judul materi "Perubahan Interaksi Sosial pada Era Digital."
3. Pembicara pada acara "Literasi Digital Nasional" yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada Kamis, 10 Juni 2021, pukul 09.00-12.00 WIB secara daring, via zoom meeting. Judul materi "Mendeteksi Ancaman Keamanan Digital di Media Sosial."
4. Pembicara pada Diskusi Publik dengan topik "Demokrasi Kita Mau Kemana?" yang digelar oleh Center for Indonesia Reform (CIR) bekerja sama dengan Data Sight pada tanggal 19 Juni 2021 secara daring via zoom. Judul Materi "Mengapa demokrasi mengutuk, dan bagaimana keluar dari kutukan demokrasi?"
5. Pembicara pada "Refleksi Indonesia Tahun 2020, Apakah Baik-Baik Saja?" Diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR), Sabtu, 26 Desember 2020.
6. Pembicara pada "Seminar Nasional Public Speaking." Diselenggarakan oleh UKM Broadcasting Universitas Wiraraja, Sabtu, 26 Desember 2020.
7. Pembicara pada "Transintegration in Lecture Series entitled, Ekonomi Islam Dalam Oligarki Politik, Mampukah Bertahan? Diselenggarakan oleh Fakultas

DASAR-DASAR TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN

- Dakwah UIN STS Jambi, Rabu, 18 November 2020.
8. Pembicara pada “Pelatihan Menjadi Jurnalis.” Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang, 29-30 Oktober 2020.
 9. Pembicara pada “Bedah Buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh RANAH Institut, Padang, Sumatera Barat, 16 Oktober 2020.
 10. Pembicara “Ngobrol Inspiratif, Diskursus Politik, Demokrasi Terancam Dikorupsi.” Diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja, 12 September 2020.
 11. Pembicara “Bedah Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), 5 September 2020.
 12. Pembicara “Diskusi Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Center for Indonesia Reform (CIR), 29 Agustus 2020.
 13. Pembicara “Mimbar Virtual, Politik Dinasti Antara Etis dan atau Hak Politik?” Diselenggarakan oleh Barisan.co, 28 Juli 2020.
 14. Pembicara “Bedah Buku, Menegosiasi Ulang Indonesia.” Diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan FISIP Universitas Wiraraja, 16 Mei 2020.

PRESENTERS

1. Presenter pada Presenter The 1st International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST) “HUMANITY AND THE CHANGING OF SOCIAL AND POLITICAL LANDSCAPE IN POST COVID-19 WORLD” yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, pada tanggal 15-16 September 2021, secara

TENTANG PENULIS

- daring via zoom. Judul penelitian yang dipresentasikan adalah "Covid-19 and Money Politics in Direct Regional Head Elections."
2. Presenter pada The Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung pada 30-31 Agustus 2021. Materi presentasi dengan judul "Poverty and the Excessive Role of Women Batik Craftsmen in Indonesia."
 3. Presenter pada Konferensi Internasional Da'wah dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo Semarang, pada tanggal 29 Juli 2021 secara daring, via zoom meeting. Materi presentasi dengan judul "Failure of State Communication in Countering Terrorism to Muslim and Islamic Mass Organizations".
 4. Presenter pada International Conference on Humanities and Social Sciences 2021 (ICHSoS) diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang yang digelar secara daring, pada tanggal 18-19 Juni 2021. Judul artikel yang dipresentasikan "Covid 19 and Medical Personnel in Social Choice Theory."
 5. Presenter pada "1st International Conference on Innovation in Science, Health and Technology (ICISHT), Clientelism Politics People's Representative." Diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo, 10-11 Desember 2020.
 6. Presenter pada "Conference and Workshop, The Pandemic in Indonesia and the World: Reflections and the Way Forward." Diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN STS Jambi Indonesia, pada 18-19 Desember 2020.
 7. Presenter pada "The 3rd International Symposium on Religious Life (ISRL), Religious Life, Ethics and Human Dignity in the Disruptive Era." Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama

- dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada 2-5 Desember 2020.
8. Presenter pada "The 2020 Annual Conference Indonesian Association for Public Administration. Strengthening Governance Capacity and Public Administration Amidst Pandemic and New Normal Era." Diselenggarakan oleh IAPA, 11 November 2020.
 9. Presenter pada International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS) 2019, Magister Program State of Islamic Studies (IAIN) Salatiga, Central Java, 6-7 August, 2019, by the title "Political Investors: Political Elit Oligarchy and Mastery of Regional Resources."
 10. Presenter pada International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2018, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 22-23 Oktober 2018.
 11. Presenter pada 5th Asia-Pacific Education Conference (AECON 2018), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 13-14 Oktober 2018.
 12. Presenter pada "The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS)." Diselenggarakan oleh Jurnal Al-Tahrir di IAIN Ponorogo, 10-12 Oktober 2018.
 13. Presenter pada "Indonesia Development Forum 2018, Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur)." Diselenggarakan oleh Bappenas RI, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
 14. Presenter "Seminar Nasional, Perkembangan Terkini, Teori, Riset dan Praktik Administrasi Publik." Diselenggarakan oleh FISIP Universitas Negeri Jember, 14-15 Februari 2018.
 15. Presenter pada "International Islamic Research Forum (IIRF)." Diselenggarakan oleh IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 27-28 November 2017.
 16. Presenter pada "Seminar Internasional Studi Islam, Islam

TENTANG PENULIS

a Friendly Cultural Religion.” Diselenggarakan oleh IAIN Pamekasan, Jawa Timur, pada 21-22 Oktober 2017.

17. Presenter pada “International Conference on Sustainable Development Goals (2030): Challenges and Solutions.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, pada 11-12 Agustus 2017.

REVIEWER

1. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, STISIPOL Wira Bhakti Denpasar, Bali, Agustus 2021.
2. Jurnal E-Saintika, Undikma, Nusa Tenggara Barat, 2021-sekarang.
3. Environment, Development and Sustainability (ENVI) Journal, Scopus Q3, 2019-2020.
4. Jurnal Public Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, 2018-sekarang.
5. Journal of Governance Innovation, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, April 2019-sekarang.
6. Journal of Community Service and Empowerment, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020-sekarang.
7. Tabuah, Rumah Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, 2020-sekarang.

PENGALAMAN PENELITIAN DIBIYAI

1. Ketua Penelitian “Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Perspektif Hexa Helix”, dibiayai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep tahun 2021, sebesar Rp 40.5000.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pariwisata.

2. Ketua penelitian, “Why Development Failed”, Penelitian Dosen Pemula (PDP) dibiayai oleh Kemenristek Dikti tahun 2019, sebesar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya artikel yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi Pembangunan terakreditasi nasional Sinta 3. Terbit tahun 2020.

PENGALAMAN PENGABDIAN DIBIYAI

1. Anggota pengabdian “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep” tahun 2020, bekerjasama dengan SKK Migas dan Kangean Energy Indonesia (KEI), sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Outnya artikel terbit di jurnal pengabdian Abdi Raja tahun 2021, dan buku pedoman ber-HKI.
2. Ketua pengabdian masyarakat “Menggagas Desa Digital di Wilayah Kepulauan Sapeken, tahun 2019, dengan skema dana internal Universitas Wiraraja sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Outnya program desa digital di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Selain itu artikel yang terbit di Journal of Community Service and Empowerment (JCSE) tahun 2020.
3. Anggota pengabdian masyarakat “Melindungi Hak Paten dan Kekayaan Intelektual di Desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep,” tahun 2019, dengan skema dana internal Universitas Wiraraja Sumenep sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya, artikel yang terbit di Journal of Community Service and Empowerment (JCSE) tahun 2021.

TENTANG PENULIS

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Direktur Center for Indonesian Reform (CIR), Desember 2020-sekarang
2. Penasihat Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) 2014-sekarang
3. Ketua Paguyuban Jurnalis Merah Putih (JMP) Kabupaten Sumenep 2011-2013
4. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep 2013-2014.

PENGALAMAN TUGAS

1. Pembina Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Wiraraja 2015-2020.
2. Tim seleksi (Perwakilan Kementerian Kominfo di daerah) Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode 2017-2021. Februari-Juli 2017.
3. Juri Anugerah Jurnalistik Migas (AJM) KEI-SKK Migas, 2016.

AWARD

1. Best paper pada Indonesia Development Forum 2018 dengan topik "Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur), Bappenas, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
2. Best Paper pada International Islamic Research Forum (IIRF) IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27-28 November 2017.
3. Pemenang ketiga, Lomba Menulis Majalah Swa tentang CSR, tahun 2007

DASAR-DASAR TEORI DAN ISU PEMBANGUNAN

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
2	blog.uib.ac.id Internet Source	<1%
3	www.scribd.com Internet Source	<1%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
5	kuliahtantan.blogspot.com Internet Source	<1%
6	mpr.go.id Internet Source	<1%
7	Submitted to 8936 Student Paper	<1%
8	Cahyat A.. "Bagaimana kemiskinan diukur?: beberapa model pengukuran kemiskinan di Indonesia", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2004 Publication	<1%
9	world-at.blogspot.com Internet Source	<1%
10	123dok.com Internet Source	<1%
11	Popi Tuhulele. "Peluang dan Tantangan Penerapan Prinsip Permanent Soverignty Over Natural Resources di Indonesia", SASI, 2020	<1%

12	eprints.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.zonasiswa.com Internet Source	<1 %
14	adoc.pub Internet Source	<1 %
15	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
16	siskarahmayuni.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	elqorni.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
19	www.blog.ub.ac.id Internet Source	<1 %
20	emakahonline.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	repository.stikestulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
22	Salasiah Dan Hasbiah. "TINJAUAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM Mendukung Pembangunan Di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur", DEDIKASI, 2020 Publication	<1 %
23	aboutfilsafat.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	docplayer.info Internet Source	<1 %
25	johannessimatupang.wordpress.com	

<1 %

26

jurnaliainpontianak.or.id

Internet Source

<1 %

27

oceannaz.wordpress.com

Internet Source

<1 %

28

Mohammad 'Ulyan. "PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA SEBAGAI SOLUSI DEGRADASI KEJUJURAN", NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2020

Publication

<1 %

29

dosen.univpancasila.ac.id

Internet Source

<1 %

30

sumarsonoblog.wordpress.com

Internet Source

<1 %

31

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

32

M Nazir Salim. "Pengantar Redaksi", BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2019

Publication

<1 %

33

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

<1 %

34

www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

Internet Source

<1 %

35

Taufikur Rahman. "Rethinking Ajaran Zakat", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011

Publication

<1 %

36

cakar zamanindonesia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

37

www.acehportal.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On